



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEMISKINAN STRUKTURAL
MASYARAKAT PETANI
(Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor)**

TESIS

MERY CHRISTINA NAINGGOLAN

1006744300

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEMISKINAN STRUKTURAL MASYARAKAT
PETANI
(Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)**

**MERY CHRISTINA NAINGGOLAN
1006744300**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMINATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEMISKINAN DAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mery Christina Nainggolan

NPM : 1006744300

Tanda tangan : 

Tanggal : 3 Juli 2012

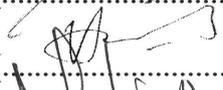
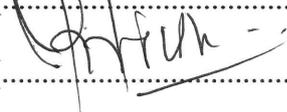
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mery Christina Nainggolan
NPM : 1006744300
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani
(Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa
Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang
Kabupaten Bogor)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos) pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Priadi Permadi, M.Si (.....)
Penguji : Rissalwan Habdy lubis, S.Sos, M.Si (.....)
Penguji : Dra. Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 July 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih setia dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)**

Dalam kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Priadi Permadi, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua petani dan masyarakat di desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor atas kerendahan hati, bantuan dan kesediaan waktunya sebagai nara sumber selama proses penelitian ini. Yang terakhir namun terutama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas kasih sayangnya yang tak terselami.

Akhir kata, saya sebagai penulis berharap bahwa penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para penulis yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis di masa yang akan datang.

Jakarta, 3 Juli 2012

Mery Christina Nainggolan

**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mery Christina Nainggolan

NPM : 1006744300

Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Mery Christina Nainggolan)

ABSTRAK

Nama : Mery Christina Nainggolan
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan dan mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Tesis ini mengangkat tema analisis kemiskinan struktural masyarakat petani pada kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kondisi serta faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dimana faktor-faktor penyebabnya adalah: adanya ketergantungan, ketidakberdayaan, keterbatasan masyarakat petani, dan juga ketidakadilan dan kekayaan struktural yang merupakan dampak dari pola-pola organisasi institusional yang ada; serta disparitas pembangunan yang ada di sana.

Kata kunci : Kemiskinan, Petani, Pedesaan

ABSTRACT

Name : Mery Christina Nainggolan
Study Program : Master's Degree of Social Welfare Science
Title : Analysis of Structural Poverty in Farmer Society (A Case Study in farmer village Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)

Most of poor in Indonesia live in the rural and work in agricultural sector. This research analyzes the structural dimension of poverty in farmer society in the case of farmer village Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. This research is a descriptive qualitative research. The result of this research is the description of condition and all sorts of reasons of structural poverty in Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, those are: the dependence, powerless of the farmer society, and also the structural injustice and wealth in its society as the affect of its institutional organization pattern; and the development disparity in the village.

Key words : Poverty, Farmer, Rural

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH.....	Iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	10
1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.3. Teknik Pemilihan Informan.....	13
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.5. Teknik Analisis Data.....	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Desa dan Petani.....	20

2.1.1. Definisi dan Konsep.....	20
2.1.2. Ciri-ciri Kehidupan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan.....	22
2.2. Aspek Struktural Pada Masyarakat Desa.....	23
2.3. Perubahan Sosial Pada Masyarakat Desa.....	25
2.4. Teori Kemiskinan.....	27
2.4.1. Definisi dan Konsep Kemiskinan.....	27
2.4.2. Indikator Kemiskinan.....	32
2.4.3. Kemiskinan Struktural.....	35
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
3.1. Letak Geografis dan Keadaan Alam.....	42
3.2. Demografi.....	43
3.2.1. Kependudukan.....	43
3.2.2. Mata Pencaharian Penduduk.....	44
3.2.3. Kondisi Perumahan Penduduk.....	45
3.2.4. Infrastruktur.....	46
3.2.5. Pendidikan Penduduk.....	47
3.2.6. Jenis Usaha Petani.....	48
3.2.7. Bantuan Pemerintah.....	49
4 TEMUAN LAPANGAN.....	51
4.1. Kondisi Kemiskinan Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir.....	51
4.1.1. Keterbatasan Akses Pendidikan.....	51
4.1.2. Perbedaan Upah dan Rendahnya Penghasilan.....	53
4.1.3. Keterbatasan Akses Pada Tanah (Luas & Status Kepemilikan LahanPertanian.....	60
4.1.4. Keterbatasan Akses Terhadap Perumahan Sehat & Sanitasi	62

4.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Petani Dusun Ciaruteun Ilir	63
4.2.1. Dampak Pola-pola Organisasi Institusional.....	63
4.2.1.1. Ketergantungan Masyarakat Miskin Terhadap Pihak Kelas Sosial Ekonomi Di atasnya.....	63
4.2.1.2. Ketidakadilan dan Kekayaan Struktural.....	65
4.2.1.3. Sempitnya Peluang Masyarakat Miskin Untuk Memiliki dan Menguasai Aset Produksi Terutama Lahan dan Modal	67
4.2.1.4. Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin.....	71
4.2.2. Adanya Disparitas Pembangunan.....	71
4.2.2.1. Masalah Pemerataan Akses Layanan Publik dan Infrastruktur.....	71
4.2.2.2. Ketiadaan Kebijakan yang Lebih Berpihak Pada Petani Miskin.....	73
5 ANALISIS.....	75
5.1. Kondisi Kemiskinan Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir.....	75
5.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Petani Dusun Ciaruteun Ilir.....	78
5.2.1. Dampak Pola-pola Organisasi Institusional.....	78
5.2.1.1. Ketergantungan Masyarakat Miskin Terhadap Pihak Kelas Sosial Ekonomi Di atasnya.....	79
5.2.1.2. Ketidakadilan dan Kekayaan Struktural.....	83
5.2.1.3. Sempitnya Peluang Masyarakat Miskin Untuk Memiliki dan Menguasai Aset Produksi Terutama Lahan dan Modal	84
5.2.1.4. Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin.....	86
5.2.2. Adanya Disparitas Pembangunan.....	89

5.2.2.1. Masalah Pemerataan Akses Layanan Publik dan Infrastruktur.....	89
5.2.2.2. Ketiadaan Kebijakan yang Lebih Berpihak Pada Petani Miskin.....	92
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	94
6.1. Kesimpulan.....	94
6.1.1. Kondisi Kemiskinan Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Iilir.....	94
6.1.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Pada Masyarakat Petani Dusun Ciaruteun Iilir.....	95
6.2. Rekomendasi.....	96
DAFTAR REFERENSI	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2011.....	2
Tabel 1.2	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2010-Maret 2011.....	3
Tabel 1.3	Kondisi Tenaga Kerja dan Pengangguran tahun 1997-2005	5
Tabel 1.4	Jadwal dan Kegiatan Penelitian.....	13
Tabel 1.5	Kerangka <i>Sampling</i>	15
Tabel 3.1	Pemanfaatan Lahan Wilayah Desa Ciaruteun Ilir.....	42
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Ciaruteun Ilir.....	43
Tabel 3.3	Mata Pencaharian Penduduk Dusun Ciaruteun Ilir.....	45
Tabel 3.4	Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Desa Ciaruteun Ilir.....	47
Tabel 3.5	Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Ciaruteun Ilir.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Relasi Antara Pola-pola Organisasi Institusional Yang Ada Dalam Masyarakat Dengan Kemiskinan Struktural...	89
Gambar 5.2	Relasi Antara Disparitas Pembangunan dan Kemiskinan Struktural.....	93



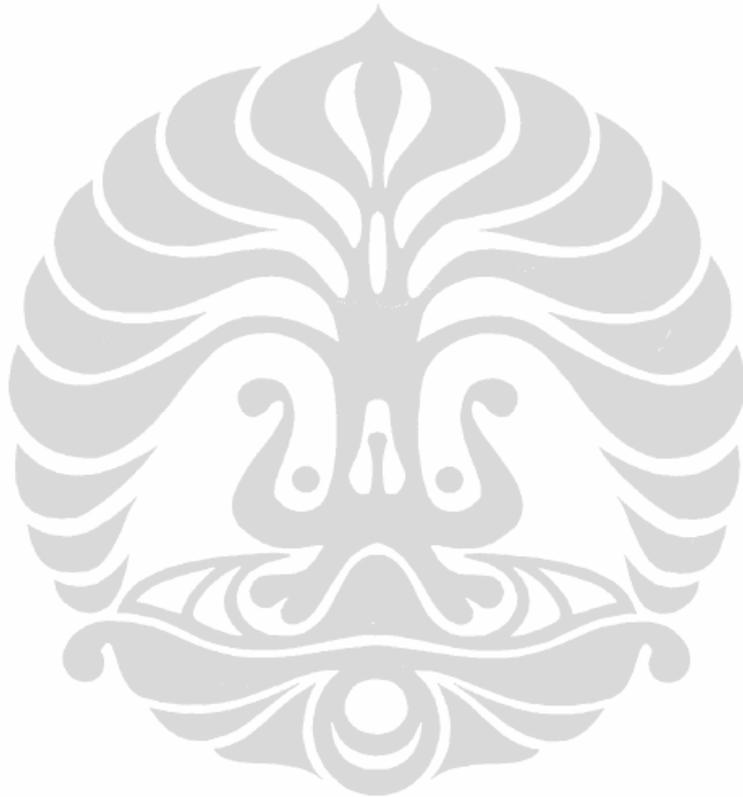
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara, Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Ringkasan Temuan Lapangan Hasil Wawancara

Lampiran 3 Denah Lokasi Penelitian

Lampiran 4 Foto-foto di Lokasi Penelitian



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama kurang lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, sempat terjadi pengurangan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari sekitar 60 persen menjadi 11 persen, walaupun di atas garis kemiskinan masih banyak penduduk yang berada dalam situasi agak miskin (*near poor*) yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan (Tukiran et.al., 2010 h. 44). Selama periode 1970-1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan secara cepat, dari 70 juta orang menjadi 22,5 juta orang. Penurunan tersebut terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Namun, jumlah persentase penduduk miskin kembali meningkat pada tahun 1998. Hal itu berkaitan erat dengan krisis ekonomi pada saat itu (Prosiding Seminar Nasional PSE-Balitbang Pertanian Bogor, 2007, h.2). Kemudian jumlah dan persentase penduduk miskin berangsur-angsur menurun seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin menurun dari 38,70 juta tahun 2000 menjadi 35,10 juta tahun 2005. Kemudian, kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 telah memicu kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006. Pada tahun tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang atau sekitar 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta atau sekitar 17,75 persen pada Maret 2006. Kemudian pada Maret 2007 penduduk miskin di Indonesia sebesar 37,17 juta orang (16,58 persen), atau mengalami penurunan sebesar 2,13 juta penduduk miskin. Hingga pada bulan Maret tahun 2011 penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang, mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sebesar 31,02 juta orang (Berita Resmi Statistik BPS, 2011).

Distribusi penduduk miskin di Indonesia tidak merata. Lebih dari 57 persen penduduk miskin berada di Jawa, sementara 21 persen dari mereka berada di Pulau Sumatera serta sisanya tersebar di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia (Lihat tabel 1.1). Sebaran ini membawa implikasi pada karakteristik kemiskinan yang sangat dipengaruhi oleh wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi dua penduduk miskin di Indonesia menjadi dua kelompok, pertama,

kelompok rentan (*vulnerable poor*) yang sering dikenal juga dengan *transitory poor*, yaitu mereka yang tinggal di sekitar garis kemiskinan dan sangat terpengaruh dengan faktor eksternal. Sebagian besar penduduk di Indonesia termasuk dalam kelompok rentan. Kelompok yang kedua adalah penduduk miskin kronis (*chronic poor*), yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok ini mendominasi di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelompok rentan pada umumnya memiliki aktifitas ekonomi, tetapi berada di skala subsisten, sementara kelompok kronis mungkin memiliki fasilitas ekonomi dan mungkin pula tidak, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Sebaran yang tidak merata dari kelompok rentan dan kelompok kronis mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia juga disebabkan oleh faktor kesenjangan wilayah (Bappenas, 2011). Berikut ini adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau di Indonesia, yang bersumber dari data Susenas di tahun 2011:

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2011

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2 135,75	4 315,91	6 451,66	10,63	13,80	12,56
Jawa	7 518,72	9 208,27	16 726,99	9,32	16,12	12,14
Bali dan Nusa Tenggara	658,13	1 415,78	2 073,91	12,63	17,57	15,63
Kalimantan	265,44	704,11	969,55	4,49	8,70	6,92
Sulawesi	354,98	1 789,60	2 144,58	6,00	15,35	12,20
	113,74	1 538,52	1 652,26	5,70	35,20	25,95
Indonesia	11 046,75	18 972,18	30 018,93	9,23	15,72	12,49

Sumber : Data Susenas Maret 2011 (<http://www.bps.go.id>)

Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan, pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan

daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. Seperti diungkapkan Sumodiningrat (1999) bahwa kemiskinan timbul karna ada sejumlah daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai (Rachyuningsih, 2007, h. 30).

Mengacu pada pendapat Sumodiningrat (1999) di atas, kita bisa melihat bagaimana kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan keterisolasian dan keterbelakangan seperti tertera dalam laporan Susenas per Maret 2011, dilaporkan bahwa dari total jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 30,02 juta orang (12,49%), ada sebanyak 11,05 juta orang miskin di perkotaan dan sebanyak 18,97 juta orang miskin di pedesaan. Laporan ini jelas menjadi cermin, bahwa daerah-daerah yang belum sepenuhnya tertangani dan jauh dari akses pembangunan sangat rentan menjadi kantong-kantong kemiskinan. Berikut ini tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, yang bersumber dari data Susenas pada tahun 2010 dan 2011:

Tabel 1.2
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2010- Maret 2011

Daerah / Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)	Presentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2010	11,10	9,87
Maret 2011	11,05	9,23
<u>Pedesaan</u>		
Maret 2010	19,93	16,56
Maret 2011	18,97	15,72
<u>Kota & Desa</u>		
Maret 2010	31,32	13,33
Maret 2011	30,02	12,49

Data Susenas Maret 2010 dan Maret 2011 (<http://www.bps.go.id>)

Kemiskinan di pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian rakyat. Berdasarkan data statistik Susenas seperti yang tertera di atas , sebanyak 63,20 % dari jumlah total penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan lebih kurang 57% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah jika

dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan tidak meratanya penguasaan aset (Berita Resmi Statistik BPS, 2011).

Terkait dengan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai program yang dilaksanakan secara lintas sektor/lembaga/departemen. Upaya tersebut juga dilakukan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program terkait. Anggaran yang dikeluarkan untuk program-program kemiskinan selama ini sangat besar. Dana tersebut sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian lagi merupakan pinjaman dari lembaga donor asing. Dari tahun ke tahun, anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut meningkat secara signifikan. Pada tahun 2007, pemerintah telah menargetkan anggaran sebesar Rp.51 triliun atau sekitar 10% dari total APBN, kemudian pada tahun 2009 meningkat drastis lagi hingga mencapai Rp.131 triliun. Anggaran ini terkonsentrasi pada tiga hal, yaitu perlindungan sosial dan intervensi langsung, pelayanan dasar, serta peningkatan daya beli melalui peningkatan pertumbuhan dan pemantapan stabilitas harga. Namun permasalahannya adalah bahwa tidak semua anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinikmati oleh penduduk miskin. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya program yang belum terfokus dan menyentuh masyarakat miskin secara langsung. Hal ini turut menyebabkan target penanggulangan kemiskinan masih sulit dicapai (Tukiran. et.al, 2010, h. 73).

Salah satu masalah yang sangat terkait dengan kemiskinan adalah masalah tenaga kerja, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi ketika orang tidak dapat bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang seringkali dihadapkan pada besarnya tingkat pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat dilihat dari sulitnya mencari pekerjaan bagi penduduk usia produktif dan besarnya jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan banyaknya tenaga kerja atau usia produktif yang tidak terserap oleh lembaga

formal maupun informal. Jumlah kesempatan kerja baru yang tersedia tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja baru, sebagai akibatnya pengangguran pun tak terelakkan (Brodjonegoro, P.S. et.al., 2007. h 8). Berikut ini, tabel gambaran kondisi tenaga kerja dan angka pengangguran di tahun 1997 hingga tahun 2005:

Tabel 1.3
Kondisi Tenaga Kerja dan Pengangguran Tahun 1997-2005

Indikator	1997	1999	2001	2003	2005
Penduduk	201,35	206,52	209,39	215,28	220,97
Angkatan Kerja (Juta)	91,32	94,85	98,81	100,32	111,24
Tenaga Kerja (Juta)	87,05	88,82	90,81	90,78	100,44
Pengangguran (Juta)	4,28	6,03	5,33	9,53	10,80
Tingkat Pengangguran (Juta)	4,68	3,36	5,39	9,50	10,30
Pemutusan Hubungan Kerja (Ribu)	41,72	107,9	124,83	128,74	7,70
Tenaga Kerja Menurut Sektor					
Pertanian (%)	41,18	43,21	43,88	46,26	44,02
Industri (%)	19,01	17,84	17,54	12,84	16,86
Jasa (%)	39,81	38,95	38,58	40,90	39,12

Sumber: Soeprono, 2006

Kelangkaan peluang kerja di luar sektor pertanian menyebabkan angkatan kerja yang terus bertambah di pedesaan hanya dapat diserap sektor pertanian. Meskipun demikian, produktifitas tenaga kerja pertanian cenderung tetap rendah, karena memang latar belakang pendidikannya yang juga rendah. Walaupun berbagai pendidikan formal dilakukan, namun tetap saja peningkatan kualitas pekerja pertanian ini terbatas. Terbatasnya lulusan sekolah formal bagi pekerja pertanian dapat dilihat dari mereka yang lulus sekolah dasar. Sebagian besar (42,32 persen) petani dengan nilai produksi terbesar di Indonesia hanya mengenyam pendidikan hingga SD, dan hanya 14,55 persen petani yang tamat SMP. Kondisi ini menunjukkan rendahnya mutu atau kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sektor pertanian Indonesia. Rendahnya kualitas petani Indonesia tersebut merupakan salah satu sebab utama dari rendahnya produktivitas para petani di Indonesia. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan,

jika dilihat dari usia petani. Sebanyak 47,57 persen dari petani yang memiliki produksi terbesar di Indonesia berusia lebih dari 50 tahun (Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Pangan, Juli 2011). Umur rata-rata petani Indonesia yang cenderung sudah tua sangat berpengaruh terhadap produktifitas sektor pertanian Indonesia. Petani yang sudah tua biasanya cenderung bersikap konservatif dalam menerima inovasi teknologi. Karena begitu kecilnya jumlah pekerja pertanian yang mengenyam pendidikan normal hingga SLTA, maka hal ini merupakan kendala bagi petani dalam menyerap informasi baru, khususnya yang berkaitan dengan proses difusi-inovasi teknologi baru di seputar pertanian (Soekartawi, 1996, h.25).

Masalah lain yang fundamental yang dihadapi petani kita adalah masalah struktural, yaitu tipologi skala usaha yang umumnya kecil (gurem) yaitu 70 persen yang memiliki lahan dibawah 0,5 ha. Lahan kita secara keseluruhan memang luas tapi 75 persen adalah hutan atau perkebunan yang dikuasai segelintir konglomerat, sisanya untuk pangan dan holtikultura. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, diperlukan pembangunan pemukiman dengan semua fasilitasnya, jaringan jalan, tempat rekreasi, pabrik-pabrik dan sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian yang terpaksa dirubah peruntukannya menjadi lahan non pertanian. Dan sejalan dengan berubah fungsinya lahan pertanian ini, persawahan barupun banyak dicetak di kawasan-kawasan yang tidak memungkinkan. Tidak jarang perluasan sawah dilaksanakan di kawasan yang sebenarnya tidak cocok untuk tujuan itu. Sebagai contoh tanah gambut yang dikonversikan menjadi sawah cepat sekali menurun mutunya sehingga rencana untuk dapat berpanen ganda hanya berhasil secara terbatas. Dengan struktur aset seperti ini, tentu kita akan kesulitan dalam mencapai ketahanan pangan nasional, karena produktivitas sudah sangat sulit dilakukan (Soetrisno, 2002, h.40).

Selain akibat dari akses terhadap lahan yang sempit, kerentanan petani gurem sebagai mayoritas penduduk miskin pedesaan di Indonesia juga diakibatkan oleh penyebab fluktuasi harga komoditas pertanian yang cenderung menurun, sementara harga-harga sarana produksi dan kebutuhan hidup lainnya berkecenderungan meningkat. Biaya operasional pertanian semakin tinggi sebagai akibat ketergantungan pada input-input luar seperti pupuk, pestisida, bibit dan

teknologi pertanian. Pada sisi tata niaga perdagangannya, mata rantai distribusi komoditas yang panjang membuat nilai harga komoditas pertanian di tingkat petani cenderung menurun sehingga umumnya yg mendapat keuntungan terbesar adalah para pedagang perantara (tengkulak) dan pedagang besar (Soetrisno, 2002, h.45).

Beberapa langkah-langkah khusus sudah dilakukan pemerintah Indonesia yang dimaksudkan untuk membantu para petani. Program Bimbingan Massal atau BIMAS pernah diluncurkan, akan tetapi golongan miskin struktural yang tidak mempunyai usaha tidak dapat menggunakan sumber kredit tersebut. Di bidang pertanian secara resmi hanya para petani pemilik tanahlah yang dapat memperoleh fasilitas-fasilitas Bimas, sedangkan golongan petani tanpa tanah atau yang biasa disebut buruh tani, tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam program ini. Di bidang pendidikan dasar pun pemerintah berusaha untuk membuka kesempatan bagi masyarakat seluas mungkin untuk mengirim anak-anak ke sekolah. Sumbangan pemeliharaan Pendidikan atau SPP dihapuskan, namun keringanan yang sebenarnya berarti besar itu tidak dapat dinikmati pula oleh golongan miskin struktural, oleh karena di luar SPP dalam praktek masih ada pembiayaan-pembiayaan bagi anak sekolah yang tidak dapat dipikul oleh orang-orang dari golongan itu. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa pengadaan sumber sumber daya dan pelayanan sosial yang besar sering kali tidak sampai pada golongan miskin, faktor-faktor apa yang menjadi kesulitan untuk mencapai golongan yang paling miskin, apakah ada hubungannya dengan pola organisasi sosial dan dengan pola pengaturan institusional, khususnya di daerah pedesaan (Soemardjan et.al., 1984, h.10).

Kebijaksanaan perdagangan yang umum diterapkan di sektor pertanian adalah mengenakan pajak ekspor dan bea masuk yang relatif kecil untuk komoditas impor pertanian. Ketika pemerintah memberlakukan pajak ekspor maka terjadilah transfer pendapatan dari petani ke pemilik pabrik olahan, dari daerah yang memproduksi ke daerah yang memproses (dari desa ke kota dan dari luar Jawa ke Jawa karna umumnya pabrik-pabrik yang ada di kota-kota di Jawa). Sementara itu kebijaksanaan bea masuk yang sangat kecil bagi komoditas pertanian menyebabkan serbuan produk-produk impor yang masuk dengan produk

petani, sehingga harga lokal jatuh (Soetrisno, 2002, h.46). Dengan kondisi demikian, jelas kebijaksanaan makro dan perdagangan kita tidak memihak pada petani, tapi lebih memilih memihak pada konsumen. Kesulitan akses kredit, kecilnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur pendukung pertanian dan tidak adanya subsidi, dan langkanya pupuk pada musim tanam, sulitnya pemasaran dan sebagainya merupakan fakta lapangan yang mendiskriminasi pertanian.

Penelitian-penelitian yang berkaitan tentang analisis kemiskinan struktural sebelumnya sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terkait kemiskinan struktural diantaranya, penelitian yang dilakukan Turtiantoro (1995) yang mengangkat tema analisis dimensi struktural kemiskinan dalam perspektif Tannas, dimana penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan gambaran struktur sosial yang ada di pedesaan di wilayah Jawa Tengah; kemudian menganalisa dampak sosial yang timbul di daerah pedesaan tersebut dilihat dari perspektif Tannas; serta menganalisa struktur sosial, peranan dan prospeknya bagi keberadaan golongan masyarakat miskin di pedesaan Jawa Tengah. Sementara itu, Sulaksono (2003) melakukan penelitian yang mengangkat tema analisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor-faktor struktural apa saja yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan terutama di kalangan masyarakat nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Propinsi Bengkulu; serta mengetahui upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Propinsi Bengkulu.

Dari tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, belum banyak ditemukan penelitian yang terkait dengan kemiskinan masyarakat, khususnya pada masyarakat petani dengan tema analisis yang berfokus pada dimensi strukturalnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema analisis kemiskinan masyarakat petani dengan analisis dimensi struktural, yang menggambarkan kondisi kemiskinan sekaligus mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan dan struktural pada masyarakatnya, dengan membahas pola-pola organisasi institusional yang ada

yang kemudian memberi dampak pada ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kungkungan struktural dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat tersebut.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fakta (BPS, 2011) bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan (sekitar 63%) dan mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (sekitar 57%), maka apabila konsentrasi penanggulangan kemiskinan dititikberatkan pada sektor pertanian, tentu akan memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Namun sebelum melaksanakan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat petani, terlebih dahulu diperlukan identifikasi secara mendalam faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan masyarakat tersebut. Terkait dengan penyebabnya, masalah kemiskinan di pedesaan tidak terlepas dari masalah struktural (Mas'ood, 1994, h.25). Bertolak dari fakta ini, maka penelitian ini mengangkat tema analisis dimensi struktural pada kemiskinan masyarakat petani, dengan mengambil lokasi penelitian di Dusun Ciaruteun Ilir.

Dusun Ciaruteun Ilir merupakan salah satu dari empat dusun yang berada di Desa Ciaruteun Ilir di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah, yang pertama berdasarkan pertimbangan bahwa sumber penghasilan utama Dusun Ciaruteun Ilir adalah dari pertanian dengan komoditi utama sayuran. Dari hasil studi dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa Dusun Ciaruteun Ilir merupakan dusun yang mata pencaharian mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian, dan Dusun Ciaruteun Ilir merupakan dusun dengan jumlah petani terbanyak dibanding tiga dusun lainnya yang ada di Dusun Ciaruteun Ilir. Dari total penduduknya yang berjumlah 2700 orang ada sebanyak 930 orang yang bekerja sebagai petani. Kemudian, pertimbangan yang kedua adalah bahwa masyarakat Dusun Ciaruteun Ilir masih banyak yang miskin, berdasarkan data kantor Desa Ciaruteun Ilir, ada sebanyak 800 orang miskin yang mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai atau BLT pada tahun 2008 di Dusun Ciaruteun Ilir (kantor desa Ciaruteun Ilir, 2010).

Dari rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah :

1. Bagaimana kondisi kemiskinan struktural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir?
2. Apa-apa saja yang merupakan faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural dan pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian dalam tesis ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan kondisi kemiskinan struktural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir
2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik: diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang
2. Manfaat Praktis: diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk kebijakan yang akan diambil pemerintah atau lembaga independen, terkait dengan penanggulangan kemiskinan di pedesaan khususnya desa petani.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan menjadi landasan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan penelitian ini adalah karena pendekatan kualitatif dapat menelaah secara holistik dan menyeluruh permasalahan penelitian baik permasalahan yang bersifat general maupun spesifik dan kompleks. Penelitian kualitatif dapat diterapkan apabila sifat masalah yang akan diteliti menuntut suatu penelitian eksplorasi, membutuhkan waktu yang

panjang dan memiliki kelonggaran prosedur. Keunggulan lain pendekatan kualitatif adalah keleluasaan pendekatan ini dalam kedalaman informasi yang diperoleh (Creswell, 1994, h.34).

Menurut Meriam (1988) , bahwa suatu penelitian dapat diterapkan secara kualitatif apabila memenuhi 6 asumsi sebagai berikut: (1) peneliti lebih memperhatikan proses dibandingkan hasil (2) peneliti lebih tertarik pada makna (meaning) (3) diri si peneliti merupakan instrumen utama pengumpulan dan analisa data (4) penelitian melibatkan kerja pengamatan lapangan (fieldwork) (5) penelitian bersifat deskriptif dan (6) proses penelitian bersifat induktif (Creswell, 1994:145). Mengacu pada pandangan Cresswell di atas, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dari kemiskinan struktural dan kultural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Iir dengan dukungan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, maka digunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Babbie (1992) sebagai berikut:

“A major purpose of many social scientific studies is to describe situations and events. The researcher observes and then describes what was observed. Because scientific observation is careful and deliberate, however, scientific descriptions are typically more accurate and precise than casual descriptions.”(h.85-86)

(Tujuan utama dari studi-studi ilmiah sosial adalah untuk menggambarkan keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian. Peneliti mengamati dan kemudian menggambarkan apa yang telah diamati tersebut oleh karena pengamatan ilmiah dilakukan cermat dan hati-hati, maka bagaimanapun juga penjelasan secara ilmiah biasanya akan lebih tepat dan sesuai dari penjelasan secara sederhana atau sambil lalu.)

Sementara itu, Alston and Bowles (1988) berpendapat bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah *“... to find out in more precise detail than exploratory research “the what” of social phenomena.”* (h.35) (“... untuk mencari jawaban “apa” dari sebuah fenomena sosial yang lebih mendalam dibandingkan penelitian eksploratori). Pendapat tersebut didukung juga oleh Neuman (1997) yang

menyatakan bahwa, “*Descriptive research presents a picture of the specific detailsof a situation, social setting or relationship.*”(h. 19-20) (Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran dari sebuah situasi, keadaan sosial atau hubungan kekerabatan secara terperinci).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripsi yang mencoba menggambarkan hasil analisis mengenai kondisi kemiskinan struktural dan kultural pada masyarakat desa Ciaruteun Ilir dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Sementara itu, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Cresswell, penelitian studi kasus adalah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu (Cresswell, 2010, h. 343).

1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Alasan pemilihan lokasi di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir ini adalah berdasarkan pertimbangan pertama, dari hasil studi dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa dusun Ciaruteun Ilir ini merupakan dusun yang mata pencaharian mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian. Dari total 2567 penduduknya ada sebanyak 930 orang yang bekerja sebagai petani. Pertimbangan kedua, ada banyak penduduk yang miskin di dusun ini, berdasarkan data kantor Desa Ciaruteun Ilir, ada sebanyak 800 orang miskin yang mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai atau BLT pada tahun 2008 di Desa Ciaruteun Ilir (kantor desa Ciaruteun Ilir, 2010).

Waktu penelitian dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Januari 2012 hingga Mei 2012, dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jadwal dan Kegiatan Penelitian

No	Waktu dan Kegiatan	Informan	Keterangan
1	30 Januari – 6 Februari 2012 Observasi dan mengumpulkan data	Tokoh masyarakat lokal (Kepala desa, ketua RT dan ketua RW)	Menghimpun data dari informan dengan teknik wawancara langsung ke lokasi penelitian (kantor desa dan pemukiman desa Ciaruteun Ilir)
2	9 Mei – 15 Mei 2012 Mengumpulkan data	Para petani dan buruh tani	Menghimpun data dari informan dengan teknik wawancara langsung ke lokasi penelitian (lahan pertanian dan pemukiman desa Ciaruteun Ilir)
3	16 Mei – 16 Juni 2012		Mereduksi, mengorganisasikan dan menginterpretasi data

1.5.3. Tehnik pemilihan informan

Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (1984) adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012, h.112). Sedangkan menurut Neuman (1997) menyatakan, bahwa responden dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (h.417). Sementara itu, menurut Faizal (1990), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dibutuhkan peneliti (h.54).

Dengan demikian sumber data terdiri dari para informan yang terdiri dari orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan serta mengetahui dan mengerti masalah yang menjadi topik penelitian serta didukung oleh dokumen berupa naskah-naskah, data tertulis dan foto.

Untuk dapat memperoleh informasi secara produktif dari mereka yang kita teliti, menurut Faizal (1990) yang terpenting adalah terjadinya hubungan harmonis antara peneliti dengan informan/ pihak yang diteliti, sehingga terjadi arus bebas dan keterusterangan dalam komunikasi informasi yang berlangsung, tanpa ada kecurigaan apapun dan tanpa daya untuk saling ‘menutup diri’ (h.54).

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling*, dimana mereka secara sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan atas dasar pengetahuan mereka yang berkaitan langsung dengan penelitian dimaksud. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Malo (1986) bahwa, dalam menentukan siapa yang termasuk sampel penelitiannya, seorang peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang atau informan yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian (h.103).

Para informan dalam penelitian ini yang diwawancarai yaitu para pelaku pertanian baik petani, buruh tani, dan tuan tanah, dan kepala desa Ciaruteun Ilir. Dalam menentukan informan ini didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Petani yaitu para petani yang menggarap lahan dengan luas terbatas (dibawah 0,1 ha), lahan yang mereka garap adalah lahan milik sendiri atau lahan sewaan/ kontrakan.
2. Buruh tani yaitu para buruh yang sama sekali tidak memiliki atau menguasai sebidang lahan pun untuk digarap. Sebagian besar para buruh ini bekerja musiman di lahan para petani atau tuan tanah. Buruh wanita biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan dari pada buruh pria, seperti mencabut rumput dan memetik hasil panen. Buruh tani biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat seperti mencangkul dan menyiram tanaman. Biasanya mereka mendapatkan upah harian.
3. Tuan tanah yaitu petani organik dan non organik yang memiliki lahan cukup luas, yaitu 0,5 ha sampai 1 ha. Tuan tanah yang dipilih sebagai informan adalah dua orang tuan tanah yang menjabat sebagai salah satu ketua RT dan ketua RW di Dusun Ciaruteun Ilir.
4. Kepala desa Ciaruteun Ilir

Berikut ini, adalah tabel informan yang diwawancara dan informasi yang didapatkan dari masing-masing informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.5
Kerangka *Sampling*

No	Informasi	Informan	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi petani • Strategi petani untuk bertahan hidup • Bantuan pemerintah 	Buruh tani	10
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi • Luas dan status kepemilikan lahan • Jenis usaha tani • Penggunaan teknologi pertanian • Modal • Pemasaran hasil tani • Bantuan pemerintah 	Petani	10
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi petani di Dusun Ciaruteun Ilir • Luas dan status kepemilikan lahan • Jenis usaha tani • Penggunaan teknologi pertanian • Modal • Pemasaran hasil tani • Bantuan pemerintah 	Tuan tanah	2
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi petani di desa Ciaruteun Ilir • Luas dan status kepemilikan lahan • Infrastruktur pertanian • Jenis usaha tani • Penggunaan teknologi pertanian • Modal • Pemasaran hasil tani • Bantuan pemerintah 	Kepala desa	1
	Jumlah		23

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kajian dokumen-dokumen dan pengumpulan atau pembuatan material audio visual (Creswell, 2010, h.300)

a. Studi literatur dan dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian dan data karakteristik demografi dari wilayah penelitian melalui pengkajian dokumen yang tersedia, seperti laporan kantor, koran, arsip-arsip data desa. Studi literatur adalah studi yang dilakukan melalui literatur seperti buku, jurnal, makalah dan artikel serta hasil penelitian sebelumnya. Studi ini dilakukan untuk membantu memperluas cakrawala pemikiran dan membantu untuk lebih mendalami teori dan isu-isu terkait tema yang sedang diteliti, serta memperoleh konsep/ kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, digunakan pedoman wawancara semi terstruktur, dengan alasan memungkinkan informan melangsungkan wawancara secara santai dan informal, namun tetap memberikan batasan pada informan agar percakapan tidak keluar dari konteksnya. Dari segi kedalaman data yang ingin diperoleh, maka wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka (*open ended*), hal ini dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh informan.

c. Observasi dan Pengumpulan Materi Visual

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung perilaku, aktivitas individu-individu dan kondisi konkrit masyarakat berikut potensi yang ada di lokasi penelitian. Moleong (2001) mengungkapkan alasan penggunaan teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, yaitu :

- a) Pengamatan memungkinkan peneliti melihat, merasakan dan memaknai dunia beserta beragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya, sebagaimana informan melihat, merasakan dan memaknainya.
- b) Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama-sama antara peneliti dengan informan penelitiannya (h.116) .

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat aktivitas para petani dalam kehidupan sehari-harinya di tempat tinggal mereka maupun di lahan pertanian. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap kondisi lahan pertanian, juga infrastruktur seperti kondisi jalan umum di desa, dan kondisi pemukiman

penduduk. Sementara itu pengumpulan material visual dilakukan dengan cara mendokumentasikan lokasi penelitian dan aktivitas pertanian di lokasi penelitian ke dalam foto sebagai data pendukung.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informasi. Menurut Moleong (2001), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (h.103). Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tahap-tahap menurut Sarantakos (1993). Tahapan tersebut terdiri dari tiga tahap umum, yaitu: *data reduction*, *data organization* dan *interpretation* yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data), pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan, dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang diteliti. Dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa lagi yang diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya, metode apa yang akan digunakan untuk menganalisis yang akhirnya akan membawa kepada kesimpulan.
2. *Data organization* (organisasi data) yang telah ditentukan sebelumnya meliputi beberapa kategori. Tahap ini adalah tahap proses pengumpulan (*assembling*) informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian.
3. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran), tahap ini meliputi proses pengidentifikasian pola-pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*), dan penjelasan (*explanations*), yang akan membawa kepada kesimpulan yang

telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan (Alston&Bowles, 1998, h.195) .

Untuk memperkecil bias ataupun kesalahan yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara yang memungkinkan terjadi, analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (pemeriksaan silang dari berbagai perspektif). Dimana menurut Mikkelsen (1999), bahwa dimungkinkan untuk mencapai triangulasi dalam strategi penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan pengambilan sampel untuk tujuan tertentu dan memasukkan multi perspektif (h.291). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keakuratan data terhadap bahasan penelitian yang ditujukan untuk check dan recheck hasil wawancara antara petani, buruh tani, tuan tanah dan kepala desa.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai konsep yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya yaitu teori dan konsep mengenai desa dan petani, ciri-ciri kehidupan pada masyarakat petani di pedesaan, aspek struktural pada masyarakat desa, perubahan sosial pada masyarakat desa, dan teori kemiskinan secara umum serta kemiskinan struktural secara khusus.

BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai profil umum Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir yang meliputi kondisi letak geografis dan keadaan alam, serta demografi yang meliputi jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, kondisi perumahan, infrastruktur dan fasilitas layanan publik, jenis usaha tani dan bantuan dari pemerintah yang ada.

BAB 4 TEMUAN LAPANGAN

Pada bab ini diuraikan bagaimana kondisi kemiskinan struktural masyarakat petani berdasarkan temuan lapangan yang ada pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir, yang meliputi keterbatasan akses pendidikan, perbedaan upah buruh tani dan rendahnya penghasilan petani, keterbatasan akses pada tanah, serta keterbatasan akses terhadap perumahan sehat dan sanitasi.

BAB 5 ANALISIS

Bab ini berisi analisa deskriptif kondisi kemiskinan masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir berdasarkan temuan lapangan di Bab 4, kemudian dideskripsikan juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kemiskinan secara struktural di dusun ini, yang dikaitkan dengan teori yang ada pada Bab II.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam laporan penelitian ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, dan rekomendasi yang coba dikemukakan oleh penulis sebagai alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Dusun Ciaruteun Ilir.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Desa dan Petani

2.1.1. Definisi dan Konsep

Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Bergel (1955), misalnya mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Sementara itu, Landis (1948) memilah definisi desa berdasarkan tujuan analisa, yakni untuk tujuan analisa sosial-psikologik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya, sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian. Berbeda dengan ketiga definisi di atas, Koentjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu tempat (Raharjo, 2004, h:29-30).

Menurut Sorokin dan Zimmerman (1970), karakteristik desa ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan solidarita sosial. Berikut ini penjelasannya menurut beberapa ahli:

1. Untuk jenis mata pencaharian, pertanian dan usaha-usaha kolektif adalah merupakan ciri kehidupan ekonomi pedesaan. Dengan demikian pertanian dan desa memiliki keterkaitan yang erat
2. Untuk ukuran komunitas, mengacu kepada suatu unit teritorial tertentu dalam mana suatu komunitas desa berada. Dalam hal ini. Ukuran komunitas desa lebih kecil dibanding dengan ukuran komunitas kota.
3. Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk, yang diukur dari unit teritorialnya, secara umum desa memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Mengapa tingkat kepadatan penduduk desa rendah, hal ini berkaitan dengan pertanian, karena kehidupan mereka dari sektor pertanian yang memerlukan lahan yang luas
4. Dalam hal lingkungan fisik, masyarakat desa lebih langsung berhadapan dengan dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik dibandingkan dengan masyarakat kota. Dalam hal ini, masyarakat desa lebih banyak

berhubungan langsung dengan tanah

5. Mengenai diferensiasi sosial, secara ringkas dapat dirumuskan bahwa desa memiliki tingkat diferensiasi sosial yang rendah jika dibandingkan dengan kota. Diferensiasi sosial dalam hal ini adalah pengelompokan-pengelompokan yang ada dalam suatu masyarakat baik dalam jumlah, variasi maupun kompleksitasnya.
6. Mengenai stratifikasi sosial (pelapisan sosial), masyarakat desa lebih sedikit (sederhana) pelapisan sosialnya dibanding dengan masyarakat kota. Terdapat kecenderungan pada masyarakat desa untuk mengelompok pada lapisan menengahnya. Selain itu, mobilita sosial masyarakat desa lebih rendah dibanding dengan masyarakat perkotaan. Mobilita sosial yang dimaksud disini adalah baik yang bersifat horisontal, yakni perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun yang vertikal, yakni pergeseran status dari lapisan sosial yang satu ke yang lainnya.
7. Mengenai interaksi sosial, secara umum dirumuskan bahwa jumlah kontak sosial pada masyarakat desa jauh lebih sedikit dan tidak bervariasi dibandingkan dengan masyarakat kota. Hal ini disebabkan: 'area kontak' pada masyarakat desa lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat kota; kemudian keseluruhan hubungan diantara masyarakat pedesaan terjadi dalam dunia sosial mereka yang kecil; hubungan yang terjadi dalam masyarakat pedesaan umumnya lebih bersifat personal.
8. Mengenai solidarita sosial pada masyarakat pedesaan, umumnya lebih didasarkan atas kesamaan-kesamaan. Sebagai konsekwensinya, masyarakat desa cenderung menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat informal dan non-kontraktual (Raharjo, 2004, h.40-45)

Menurut Redfield (1986), yang dimaksud dengan petani adalah seorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah, yang dia sendiri sudah terikat dengan ikatan tradisi dan perasaan. Bagi petani, tanah tidak hanya bersifat material semata, yang hanya diproduksi secara otomatis, tanah juga merupakan simbol kehormatan, perekat dan status sosial. Pandangan hidup bagi petani adalah bahwa kegiatan produktif adalah kebaikan utama, karena itu pertanian dianggap lebih baik dari perdagangan (h.2).

Berdasarkan jenis pertaniannya, ada dua konsep teoritis mengenai petani, pertama 'petani subsistensi' dan kedua 'petani rasional'. Menurut Scott (1981), petani subsistensi adalah petani yang melengkapinya kebutuhan hidupnya sendiri dengan ciri utama tidak berorientasi kapital dan mementingkan selamat atau tak berani berspekulasi (h.3). Sementara menurut Popkin (1986), petani rasional adalah petani yang cukup rasional menghadapi perubahan, dimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi di luar diri mereka (h.2).

2.1.2. Ciri-ciri Kehidupan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan

Pandangan hidup satu kaum tani tertentu cenderung mempunyai kesamaan dengan pandangan hidup kaum tani yang lainnya, meski berada di wilayah yang berbeda di seluruh bumi. Beberapa pandangan hidup kaum tani yang cenderung memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu: memiliki ikatan pribadi dengan tanah, memiliki keterikatan kepada desa atau komunitas lokal, menganggap keluarga sebagai sesuatu yang penting secara sentral, memiliki sikap hormat terhadap tempat tinggal dan kebiasaan nenek moyang, memiliki etika yang sederhana dan bersifat duniawi, menganggap perkawinan adalah sebagai persiapan bagi kemakmuran ekonomi, memiliki kecurigaan tertentu sekaligus penghargaan terhadap kehidupan kota dan memiliki keharusan untuk menghasilkan tanaman penghasil uang (Redfield, 1986, h. 86).

Menurut Koentjaraningrat (1982), walaupun penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, namun dalam komunitas desa di seluruh Indonesia banyak terdapat sumber mata pencaharian hidup yang lain. Penduduk desa pada umumnya terlibat dalam bermacam-macam pekerjaan di luar sektor pertanian, dan mengerjakan dua sektor tersebut pada waktu yang bersamaan, sebagai pekerjaan primer dan sekunder. Banyak di antara para petani mempunyai mata pencaharian tambahan sebagai penjaja sayur-sayuran atau menjadi pedagang barang kerajinan tangan atau kebutuhan rumah tangga di pasar. Para petani yang dalam bukan-bulan sewaktu kesibukan produksi pertanian sedang menurun, sering pergi merantau secara musiman untuk bekerja menjadi buruh pekerjaan umum dalam proyek-proyek pemugaran atau pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan serta saluran irigasi, atau untuk menjadi buruh bangunan dalam proyek-proyek

perumahan di kota-kota, atau menjadi tukang becak di kota-kota (h.25).

Ikatan antara pelindung (patron) dan klien, adalah satu bentuk asuransi sosial yang terdapat dimana-mana di kalangan petani di Asia Tenggara. Seorang patron menurut defenisinya adalah seorang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Seorang patron bisa saja seorang tuan tanah, seorang pejabat kecil atau pedagang. Klien yang mengandalkan perlindungan dari seorang patron yang lebih berpengaruh, sekaligus juga berkewajiban untuk menjadi anak buahnya yang setia dan selalu siap untuk melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor kekurangan tanah dan ketiadaan kesempatan kerja di luar bersama sama memaksa petani untuk melakukan pilihan-pilihan tragis dan sebaliknya memungkinkan orang lain untuk menarik keuntungan keuntungan yang tinggi dari keadaan sulit petani itu. Dalam hal ini, seorang patron yang biasanya merupakan tuan tanah dan pedagang atau tengkulak akan memanfaatkan kesempatan ini (Scott, 1981, h. 41).

2.2. Aspek Struktural pada Masyarakat Desa

Kehidupan manusia kerap dilekati oleh nilai, itulah sebabnya mengapa dalam masyarakat selalu terjadi pelapisan-pelapisan. Keberadaan nilai memberi “harga” pada peyandangannya. Siapa yang memperoleh lebih banyak hal yang bernilai, semakin terpandang dan tinggi kedudukannya. Apa yang dipandang bernilai tinggi dalam kehidupan manusia tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Secara umum hal hal yang mengandung nilai berkaitan dengan harta/ kekayaan, jenis mata pencaharian, pengetahuan/ pendidikan, keturunan, keagamaan, dalam masyarakat yang masih bersahaja unsur unsur biologis (usia, jenis kelamin) juga merupakan hal hal yang mengandung nilai. Bagi masyarakat desa pertanian yang dipandang bernilai adalah lahan pertanian yang dipandang bernilai adalah lahan pertanian. Maka seberapa besar pemilikan atau perusahaan seseorang terhadap lahan pertanian akan menentukan seberapa tinggi kedudukannya di tengah masyarakat mereka (Raharjo, 2004. h.104).

Konsep struktur sosial menurut Piritim Sorokin (1928) dibagi menjadi dua, yakni struktur sosial vertikal dan struktur sosial horisontal. Struktur sosial vertikal, atau startifikasi sosial, atau pelapisan sosial, menggambarkan kelompok-

kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis, berjenjang. Sehingga dalam dimensi struktur ini kita melihat adanya kelompok masyarakat yang berkedudukan tinggi (lapisan atas), sedang (lapisan menengah), dan rendah (lapisan bawah). Atau, bisa lebih bervariasi dari sekedar tiga lapisan ini. Struktur sosial horisontal atau diferensiasi sosial menggambarkan kelompok-kelompok sosial tidak dilihat dari tinggi rendahnya kedudukan kelompok itu satu sama lain, melainkan lebih tertuju kepada variasi atau kekayaan pengelompokan yang ada dalam satu masyarakat. Sehingga lewat dimensi struktur horisontal ini yang kita lihat adalah adanya kekayaan atau kompleksitas pengelompokan yang ada dalam satu masyarakat. Semakin maju atau berkembang masyarakatnya, semakin bervariasi dan kompleks pengelompokannya, bukan saja kuantitatif tapi juga kualitatif (Raharjo, 2004, h. 96).

Hierarki status yang konvensional di kalangan orang miskin di pedesaan biasanya adalah: petani-pemilik tanah kecil, petani penyewa, dan buruh. Di sebagian Asia Tenggara, kategori-kategori ini merupakan realitas sosial dalam hal-hal yang menyangkut preferensi dan status di pedesaan meskipun dalam kenyataannya, dari segi penghasilan, bisa terjadi banyak tumpang tindih di antara kategori-kategori ini. Petani kecil yang marginal, yang menggarap tanahnya sendiri, seringkali lebih miskin dari petani-penyewa, yang dapat menyewa lahan yang besar. Begitu pula, petani-penyewa yang marginal seringkali lebih miskin dari buruh apabila ada pasaran yang baik untuk tenaga kerja (Scott, 1981, h. 54).

Sementara itu, menurut Scott, dalam masyarakat pertanian, pemilik tanah umumnya dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada penyewa tanah, dan penyewa tanah dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada buruh lepas oleh karena, meskipun dari segi penghasilan mungkin tidak, masing-masing mewakili satu loncatan kuantum dalam kepercayaan terhadap subsistensi. Oleh karena itu, jaminan terhadap krisis merupakan prinsip stratifikasi yang lebih aktif dalam pandangan petani dibandingkan dengan penghasilan (Scott, 1981, h.56).

Smith dan Zopf (1970) mengetengahkan adanya lima faktor yang determinan terhadap sistem pelapisan sosial vertikal atau stratifikasi sosial masyarakat desa:

“Pertama, luas pemilikan tanah dan sejauh mana pemilikan tanah itu terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang atau sebaliknya terbagi merata pada warga desa. Kedua, pertautan antara sektor pertanian dan industri. Ketiga, bentuk-bentuk pemilikan atau penguasaan tanah. Keempat, frekuensi perpindahan petani dari lahan pertanian satu ke lahan pertanian lainnya. Kelima, komposisi rasial penduduk.” (Raharjo, 2004:113).

2.3. Perubahan Sosial Pada Masyarakat Desa

Untuk mengungkapkan aspek-aspek dinamis dalam masyarakat, umumnya Sosiologi menggunakan konsep proses sosial dan perubahan sosial. Proses sosial lebih melihat interaksi yang terjadi antara orang atau kelompok maupun lembaga sosial, sedangkan perubahan sosial lebih melihat pergeseran atau perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari proses-proses tersebut. Perubahan sosial menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya proses perubahan. Faktor-faktor penyebabnya bisa bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang internal adalah penambahan dan penyusutan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, dan konflik atau pemberontakan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang eksternal adalah peristiwa-peristiwa fisik sebagai contoh bencana-bencana alam yang besar, peperangan dan kontak dengan atau pengaruh dari kebudayaan lain (Raharjo, 2004, h.190)

Salah satu perubahan sosial yang berdasarkan penyebab internal adalah perubahan struktural. Perubahan struktural meliputi struktur fisik desa, struktur biososial, struktur pelapisan sosial vertikal (stratifikasi sosial) dan horisontal (diferensiasi sosial). Perubahan struktural yang akan dibahas disini adalah struktur biososial dan stratifikasi sosial, berikut penjelasannya:

1. Secara umum, struktur biososial menyangkut dominasi kedudukan sosial kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Eksistensi struktur biososial didasarkan atas kelebihan fisik kaum laki-laki yang dengan begitu

menempatkannya sebagai kaum yang lebih mampu berperan dalam mencari rejeki. Ketergantungan kaum wanita terhadap kaum laki-laki dengan demikian menjadi penyebab mengapa kaum wanita berada dalam kedudukan sosial yang lebih rendah, ini berarti apabila kaum wanita tidak memiliki ketergantungan lagi terhadap kaum laki-laki, maka kedudukannya menjadi tidak rendah lagi.

2. Perubahan yang terjadi pada sistem pelapisan sosial masyarakat desa pertanian dapat dilihat pada persoalan semakin menyempitnya pemilikan dan penguasaan tanah sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin padat. Pelapisan sosial yang didasarkan atas luas pemilikan dan penguasaan lahan pertanian ini kemudian memberi dampak pada jumlah buruh tani yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pelapisan sosial vertikal pada masyarakat desa terpecah menjadi dua kelas sosial yang senjang, yakni petani kaya dan petani miskin yang semakin miskin. Perbedaan yang bersifat senjang ini kemudian sering disebut polarisasi sosial. Dalam kondisi semakin menyempitnya pemilikan lahan pertanian para petani, seseorang dapat menguasai lahan pertanian yang luas lewat sistem persewaan. Lewat sistem ini, maka dapat menghadirkan 'tuan tanah'.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kikuchi (1987) dan Sayogyo (1970), perubahan struktural dalam masyarakat pertanian di pedesaan di Indonesia dapat dilihat pada kondisi dimana masyarakat desa sebagai masyarakat yang terdeferensiasi. Deferensiasi yang terjadi bisa berupa polarisasi sosial dan bisa berupa stratifikasi sosial (Raharjo, 2004, h. 210-225)

Menurut Rogers, et.al., (1988), perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Sementara menurut Soemardjan (1964), perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga sosial, dan merupakan suatu proses yang berkembang dari pranata-pranata sosial. Perubahan tersebut akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat termasuk perubahan pada sistem nilai sosial, sikap, dan pola perilaku dan hubungan antar orang seorang atau antar kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila

perubahan tersebut cukup berarti, atau cukup besar, maka perubahan tersebut dapat membawa kehidupan baru dalam bidang sosial dan ekonomi suatu masyarakat (Sugihen, 1997, h.56).

Salah satu model perubahan sosial adalah model sosiologi konflik. Model sosiologi konflik melihat bahwa masyarakat itu mempunyai berbagai unsur yang saling bertentangan yang dalam berbagai hal dapat menimbulkan letupan-letupan yang mengganggu kestabilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu unsur yang dilihat sebagai konflik adalah kekuasaan yang tidak merata atau sering tertumpu pada sejumlah kecil orang-orang tertentu, yang mungkin diperoleh karena kekayaan atau cara lain. Kompetisi dan persaingan yang ada di dalam suatu sistem sosial atau organisasi dapat dipandang juga sebagai konflik. Oleh karena itu, proses sosial yang dominan adalah bahwa orang atau sekelompok orang selalu berupaya untuk mendapatkan berbagai kelebihan (keuntungan atau kekuasaan) dari orang atau kelompok lain. Penyelewengan atau manipulasi atas berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari yang lain memperlihatkan kecenderungan konflik (Sugihen, 1997, h. 65)

2.4. Teori Kemiskinan

2.4.1 Defenisi dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan telah ada sejalan dengan peradaban manusia. Bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia, berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya semakin bervariasi dan kompleks. Proses peradaban umat manusia, terutama dalam proses transformasi ekonomi ternyata tidak mampu ditangkap oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat berhasil memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia sehingga mereka menjadi kelompok yang makmur secara ekonomi, namun sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses dan menangkap perubahan di sekitarnya akan tertinggal dan akan memunculkan kemiskinan dalam masyarakat yang bersangkutan (Tukiran et.al., 2010, h.32).

Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Dimensi ekonomi adalah sisi yang paling sederhana

untuk melihat ukuran kemiskinan, yaitu seberapa banyak orang bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sementara itu, dari dimensi sosial dan budaya bisa diukur kemiskinan dengan melihat bagaimana orang itu memiliki watak-watak yang tidak produktif seperti apatis, apolitis, fatalistik, tidak berdaya dan lain-lain. Sedangkan melalui dimensi struktural dan politik, kemiskinan bisa diukur dengan melihat seberapa besar seseorang memiliki kekuatan politik atau sarana untuk terlibat dalam partisipasi politik, yang mana hal ini mempengaruhi posisi seseorang untuk tetap berada di lapisan bawah atau atas dalam struktur sosial (Rachyuningasih, 2007, h.30).

Salah satu isu dalam persoalan kemiskinan adalah rendahnya partisipasi seseorang di dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, yang diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, yang dipandang sebagai akibat ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan, seseorang akan sulit memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dengan kondisi seperti ini, seseorang akan terjebak di dalam lingkaran kemiskinan (*poverty trap*). *Poverty Trap* atau Perangkap kemiskinan merupakan inti dari masalah kemiskinan menurut Chamber (1988) yang terdiri dari lima unsur yaitu: (a) Kemiskinan itu sendiri; (b) kelemahan fisik; (c) keterasingan/kadar isolasi; (d). Kerentanan/kerawanan; (e) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini berkaitan antara satu dengan yang lain dalam satu jaringan interaksi timbal balik sehingga perangkap kemiskinan benar-benar mematikan peluang hidup masyarakat dan keluarga miskin (h.39).

Kerentanan menurut Chamber (1988) dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat, seperti datangnya bencana alam, gagalnya panen atau penyakit yang menimpa keluarga miskin. Jadi kerentanan merupakan kondisi dimana suatu keluarga miskin tidak memiliki kesiapan baik mental maupun material dalam menghadapi situasi sulit. Akibatnya keluarga miskin banyak menjual harta benda dan aset produksinya sehingga semakin rentan dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan adalah cerminan dalam kasus dimana elit desa memfungsikan dirinya sebagai oknum

yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang miskin. Manifestasi lain dari ketidakberdayaan dilihat seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak memperoleh subsidi (h.42).

Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan yang merupakan besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak (Tukiman et al., 2010, h. 286). Sementara itu gagasan yang lebih makro dinyatakan Sumodiningrat (1999) bahwa kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai (Rachyuningsih, 2007, h.40)

BPS membagi kelompok miskin di Indonesia menjadi dua, pertama, sebagian besar penduduk miskin adalah kelompok rentan (*vulnerable poor*) yang sering dikenal juga dengan *transitory poor*, yaitu mereka yang tinggal di sekitar garis kemiskinan dan sangat terpengaruh dengan faktor eksternal. Kelompok yang kedua adalah penduduk miskin kronis (*chronic poor*), yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok rentan pada umumnya memiliki aktifitas ekonomi, tetapi berada di skala subsisten, sementara kelompok kronis mungkin memiliki fasilitas ekonomi dan mungkin pula tidak, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Sebaran yang tidak merata dari kelompok rentan dan kelompok kronis mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia juga disebabkan oleh faktor kesenjangan wilayah (Bappenas, 2011).

Menurut Sumodiningrat (1999), kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif atau kemiskinan

struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya (h.19).

Menurut Mas'ood (1994), untuk memahami kemiskinan berdasarkan akar penyebabnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, Kemiskinan alamiah, yaitu suatu kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya sumber atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Artinya secara alamiah kemiskinan memang ada bukan karena adanya kelompok atau individu yang ada dalam masyarakat yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan buatan (artifisial), yaitu struktur sosial yang ada membuat masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Kemiskinan inilah yang selanjutnya sering disebut sebagai kemiskinan struktural (h.15).

Sementara itu Baswir (1999) menyatakan ada tiga konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik pada segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Sedangkan, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat itu (h.21).

Mardimin (2000) menyebutkan bahwa kemiskinan dikategorikan ke dalam lima pengertian yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan situasional (natural), kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural:

1. Kemiskinan absolut adalah keadaan dimana seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. Orang yang dalam kondisi seperti ini dikategorikan kedalam kemiskinan absolut. Kemiskinan ini sangat ditentukan oleh nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Nutrisi tersebut akan mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhkan, terutama untuk dapat bekerja. Di Indonesia garis batas

minimum kebutuhan hidup yang ditentukan BPS sebesar 2100 kalori per kapita per hari.

2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain.
3. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural terjadi jika seseorang atau sekelompok orang tinggal di daerah-daerha yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya mereka menjadi miskin. Dengan kata lain kemiskinan itu terjadi sebagai akibat dari situasi yang tidak menguntungkan seperti kemarau panjang, tanah tandus, gagal panen dan bencana alam.
4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena kultur masyarakatnya. Masyarakat rela dengan keadaan miskinnya karena diyakini sebagai upaya untuk membebaskan diri dari sikap serakah yang pada gilirannya akan membawa kepada ketamakan. (h. 23-24)

Kartasasmita (1996) mengatakan bahwa ada dua konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, mereka sudah merasa kecukupan atau tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak terlalu tergerak berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran umum yang dipakai. Dengan pendekatan absolut misalnya mereka dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin (h.239).

Sementara itu Sunarso (1996) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat terjadi oleh beberapa faktor yaitu faktor situasional, kultural dan struktural. Penyebab situasional, mengacu kepada keadaan alam, yang tidak mendukung masyarakat dalam memperjuangkan hidupnya. Dan penyebab kultural mengacu kepada keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya atau tidak mampu mengembangkan dirinya (powerless), yang juga berkaitan dengan latar belakang sosio-kulturnya (Mardimin, 2000, h.24).

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah pada sejumlah atau segolongan orang, dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Kemiskinan sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, budaya, sosial, struktural dan politik, dimana kelima aspek ini sangat mempengaruhi kesempatan seseorang untuk berdaya dan memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Substansi kemiskinan sebenarnya adalah kondisi kehilangan akses terhadap sumber sumber kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar inilah yang menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan, dan berdampak pada keterisolasian, keterbelakangan dan masalah sosial lainnya.

2.4.2. Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan, dilihat dari kesulitan mendapatkan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.

5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah sulitnya memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih . Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan terhadap sumber air, dan rendahnya sumber mutu air.
7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan yang dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah pedesaan, daerah pesisir dan pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
10. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
11. Beratnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup (Bappenas, 2009).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik menggunakan garis kemiskinan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin tidaknya seseorang. Garis kemiskinan merupakan besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Berdasarkan kondisi tersebut kemudian didapat garis kemiskinan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi ekonomi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu dibawah garis kemiskinan atau kelompok miskin dan di atas garis kemiskinan atau kelompok tidak miskin. Garis kemiskinan untuk daerah pedesaan menurut BPS per Maret 2011 adalah sebesar Rp. 213.395,- per kapita per bulan,

atau sekitar Rp.7.000,- per hari. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul konsumsi Maret 2011. Berikut ini beberapa penjelasan teknis mengenai pengukuran kemiskinan oleh BPS:

1. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari perhitungan ini, dapat dihitung Head Count Index yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan per bulan Maret 2011 sama sejak Maret 1998, yaitu dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM) dari paket komoditi dan referensi populasi yang sama. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari untuk “populasi referensi”, yaitu populasi 20% penduduk di atas garis kemiskinan sementara. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi padian, umbi umbian, ikan, daging, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah rata rata pengeluaran “populasi referensi” untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 41 jenis komoditi di pedesaan (BPS, 2011).

Sementara itu UNDP menetapkan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) untuk merumuskan kemiskinan. IKM difokuskan pada deprivasi/ ketertinggalan dalam tiga dimensi, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan peluang pada saat dilahirkan untuk bertahan hidup hingga usia 40 tahun; pengetahuan yang diukur

melalui persentase buta huruf penduduk usia 15 tahun+ dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yakni air bersih, memanfaatkan layanan kesehatan modern, dan ketidakmampuan pemenuhan gizi (Tukiran et.al., 2010, h.137).

2.4.3. Kemiskinan Struktural

Menurut Sumodiningrat (1999), kemiskinan relatif (struktural) adalah suatu kondisi dimana seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya (h.19). Sementara, menurut Soedjatmoko (1983), kemiskinan struktural tidak terlepas dari kesulitan untuk mencapai golongan yang paling miskin yang ada hubungannya dengan pola organisasi sosial dan pola pengaturan institusional di daerah pedesaan. Pola organisasi sosial adalah hubungan antar manusia yang disahkan secara sosial, yang menentukan hak dan kewajibannya dan sifat hubungannya dengan orang lain. Sebagai contoh, kontrak sewa, kontrak kerja, pola bagi hasil di bidang pertanian, pola pewarisan tanah bahkan harga. Yang dimaksud dengan struktur adalah pola-pola organisasi sosial yang mantap, yang luas, stabil dan yang mampu meneruskan diri (*self reproducing*). Seseorang lahir dalam suatu, atau lebih tepat dalam berbagai struktur sosial. Atas kekuatan sendiri ia tak mampu untuk menguasai atau merubah struktur itu. Misalnya, anak buruh nelayan yang berhutang pada juragannya sangat kecil kemungkinannya untuk lepas dari kehidupan di dalam struktur itu. Berbicara tentang struktur adalah berbicara tentang pola-pola organisasi institusional dalam masyarakat, yang melindungi semua sektor. Suatu institusi atau lembaga, adalah suatu rangkaian hubungan antar manusia yang teratur dan disahkan secara sosial, yang menentukan hak, kewajiban dan sifat hubungannya dengan orang-orang lain. Suatu kontrak kerja atau kontrak sewa, pola bagi hasil di bidang pertanian, pola pewarisan tanah adalah merupakan lembaga. Lembaga-lembaga ini penting karena mereka menjamin kemantapan, kepastian dan *predictability* dalam interaksi sosial dan menentukan pola tata tertib dalam masyarakat. Tanpa lembaga-lembaga ini, hubungan sosial ini bisa menjadi kacau. Pola hierarki dalam suatu masyarakat, pola diskriminasi, termasuk diskriminasi rasial, sifat dualistis dalam masyarakat

dan pola pola asimetris, pola-pola ketergantungan yang timpang dalam pembagian kekuatannya dan yang eksploitatif sifatnya, semua ini adalah pola struktural. Dan faktanya di negara-negara yang sedang berkembang, kemiskinan itu memiliki konteks struktural, dan struktur-struktur sosial untuk sebagian besar mempengaruhi kemiskinan (Soemardjan et. al., 1984, h. 48).

Kemiskinan struktural menurut Soemardjan (1984) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan tersebut misalnya, para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Selain itu, yang termasuk juga golongan miskin struktural adalah para kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau dengan kata lain dinamakan *unskilled laborers*. Selain itu, golongan miskin struktural meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, yang disebut juga golongan ekonomi lemah. Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan kekurangan pangan saja. Kemiskinan struktural juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, dan termasuk juga kekurangan perlindungan dari hukum dan pemerintah (h.5).

Kemiskinan struktural timbul karena sebaliknya ada juga kecukupan atau kekayaan struktural, yaitu kekayaan yang dinikmati oleh golongan-golongan dalam masyarakat yang karena kedudukan dan peranannya dalam masyarakat lebih memudahkannya untuk memanfaatkan sumber sumber modal, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan di dalam masyarakat, sehingga mereka tidak mengalami kemiskinan. Berdasarkan pengamatan ini, maka para ahli ekonomi membagi masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu 20% dari jumlah penduduk yang terkaya -secara relatif- dinamakan golongan atas. Kemudian di bawah golongan atas itu diambil 40% dari jumlah penduduk yang penghasilan dan penghidupannya dapat menempatkan para pemiliknya menjadi golongan menengah. Dibawah golongan itu lagi sebanyak 40% meliputi mereka yang hampir miskin dan miskin secara struktural (Soemardjan et.al, 1984, h. 8).

Orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin secara struktural pada umumnya sadar akan nasibnya yang berbeda daripada nasib yang lebih baik dari golongan-golongan yang lain. Di antara para golongan ini mungkin ada yang ingin melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan mengusahakan kehidupan yang secara ekonomis lebih memuaskan, akan tetapi keinginan itu hanya akan dapat dicapai secara individual dan dengan usaha yang melebihi kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh para anggota lain dalam golongan itu. Sebagai golongan, sukar sekali bagi mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi para anggotanya secara menyeluruh, karena suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi seseorang belum tentu dapat diluaskan agar dapat menguntungkan seluruh golongan secara permanen (Soemardjan et.al., 1984, h. 5).

Menurut Soedjatmoko (1983), adanya ketimpangan-ketimpangan struktural itu tidak hanya menghalangi berkembangnya suatu ekonomi nasional, melainkan juga memantapkan struktur ketidakadilan sosial. Ketimpangan ketimpangan itu meliputi hubungan pusat dengan daerah pada umumnya, hubungan antar daerah tertentu dengan daerah lainnya, hubungan antar kota dengan desa, hubungan antar sektor modern dan sektor tradisional, dan hubungan sektor asing dan sektor domestik dan nasional. Ketimpangan struktural harus dihadapi secara langsung untuk mengatasinya, dengan usaha pembangunan daerah, usaha pembangunan daerah pedesaan, dan peningkatan kesempatan kerja sebagai suatu tujuan utama strategi pembangunan (Soemardjan et.al., 1984, h.48).

Sementara itu, menurut Mas'ood, bila perspektif tentang kemiskinan dibidikkan ke pedesaan, maka ciri khas dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat dari pihak si miskin kepada pihak kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan inilah yang berperan besar dalam memerosotkan kemampuan kaum miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak mempunyai kemampuan untuk menetapkan upah dan petani tidak bisa menentukan harga hasil taninya sendiri. Sebagai dampaknya, orang-orang miskin tidak dapat berbuat banyak atas eksplotasi dan proses marjinalisasi karena tidak adanya pilihan alternatif untuk menentukan nasib ke arah yang lebih

baik (Rachyuningsih, 2007, h.38)).

Selain beberapa faktor-faktor penyebab seperti yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah beberapa faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural yang lain:

1. Menurut Sunarso, kemiskinan struktural terjadi karena ketidakmerataan distribusi pendapatan, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, manajemen dan partisipasi dalam pembangunan (Mardimin, 1996, h.48).
2. Menurut Sumodiningrat (1999), kemiskinan struktural (relatif) erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan, sehingga menimbulkan kemiskinan struktural (h.19).
3. Menurut Baswir (1999), kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi serta tatanan perkonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu (h.21).
4. Menurut Mardimin (2000), kemiskinan struktural lebih menunjuk kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Mereka tetap miskin atau menjadi miskin bukan karena tidak mau memperbaiki nasib hidupnya tetapi karena usaha yang mereka lakukan selalu kandas dan terbentur pada sistem atau struktur masyarakat yang berlaku (h.52).
5. Menurut Kartasasmita (1996), kemiskinan struktural disebabkan oleh keadaan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan yang akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula. Ketimpangan ini pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang, dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan antara

masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal inilah yang menyebabkan kemiskinan baik absolut maupun relatif (struktural) (h.240).

6. Menurut Mas'ood (1994), kemiskinan struktural muncul karena struktur sosial yang ada membuat suatu kelompok masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Kemiskinan struktural lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan yang sering kali hadir akibat adanya modernisasi atau pembangunan ekonomi, yang kemudian mengakibatkan anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (h.37).
7. Menurut Tulung (2008), ketiadaan kebijakan yang lebih berpihak pada petani miskin, seperti penurunan harga pupuk dan harga kebutuhan sehari-hari serta pembatasan impor dan akses pasar mengakibatkan para petani miskin menjadi tidak berdaya. Ketiadaan kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural (h.5).
8. Menurut Suyanto (2008), adanya kungkungan struktural menyebabkan masyarakat miskin kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari proses pemiskinan struktural (h.28).
9. Menurut Suyanto (2008), sempitnya peluang masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama tanah dan modal. Dalam hal ini masyarakat miskin tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebab tidak mempunyai surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal, diakibatkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari (h.29).
10. Menurut Soetrisno (2008), salah satu penyebab kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan. Orang miskin seringkali ditekan atau ditipu oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya

memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin, hal ini mengakibatkan bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (h.30).

11. Menurut Selo Soemardjan (1984), kemiskinan struktural juga meliputi kekurangan pendidikan. Rendahnya pendidikan para petani menyebabkan para petani memiliki keterbatasan untuk menyerap teknologi pertanian. Hal ini kemudian menyebabkan para petani tersebut mengerjakan semua pekerjaannya secara manual. Hal ini tentu memberi dampak pada produktivitasnya dalam bekerja, karena keberadaan teknologi juga tentu memberi dampak pada efektivitas dan efisiensi kerja. Maka pendidikan yang rendah yang merupakan akibat masalah pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan struktural (h.5).
12. Menurut Tulung (2008), ketiadaan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan baik kesenjangan akibat globalisasi, demokratisasi ataupun lobi-lobi domestik yang kuat juga merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural (h.28).
13. Menurut World Bank dan Asian Development Bank (2008), bahwa adanya diskriminasi dan disparitas pembangunan yang terjadi wilayah desa dan kota menjadi pemicu munculnya kemiskinan struktural di desa. Diskriminasi dan disparitas pembangunan yang termasuk dalam hal ini adalah masalah ketimpangan pemerataan akses infrastruktur dan layanan publik (h.38).
14. Menurut Mustofa, bahwa masalah kemiskinan struktural apabila dipahami dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran adalah masalah jauh dekatnya rakyat dengan sumber daya ekonomi, sosial dan politik serta jauh tidaknya pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar oleh hasil-hasil pengelolaan sumberdaya-sumberdaya tersebut. Kemiskinan struktural adalah sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, yang terwujud sebagai proses pemerataan massal dan perampasan hak-hak dasar (Soemardjan, 1984, h.13)

Dalam mengatasi kemiskinan struktural, golongan miskin tidak hanya memerlukan pengadaan kredit dan fasilitas-fasilitas lain. Yang perlu dirubah adalah struktur sosial, struktur-struktur yang membuat mereka terus menerus tergantung dari pihak lain dan terus dieksploitasi oleh pihak itu. Dalam hal ini sangat diperlukan organisasi-organisasi yang meningkatkan kemampuan desa, termasuk golongan miskin, untuk mengatur diri sendiri dalam keperluan-keperluan tertentu, seperti : pengelolaan irigasi, pengurusan lumbung desa, pemasaran dan perkreditan. Dalam hal ini, organisasi adalah sarana untuk mengurangi ketimpangan dalam *bargaining power* antara golongan miskin dan golongan yang lebih kaya (Soemardjan, 1984, h.7).

Demikianlah, kemiskinan struktural sangat terkait dengan interaksi antara birokrasi dan keperluan otonomi serta inisiatif dari masyarakat dan rakyat sendiri, termasuk golongan yang miskin. Hal ini terkait dengan interaksi antara planning dan implementasinya, dimana suatu rencana atau kebijakan harus memperhitungkan aparaturnya pelaksanaan dan cara penerimaannya oleh masyarakat. Sebagai contoh kasus implementasinya pada otonomi daerah, yang harus dapat diartikan pula dalam hubungannya dengan proses perencanaan dan turut sertanya daerah dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan sepanjang kebijaksanaan ini menyangkut secara spesifik kehidupan masyarakat daerah, dalam hal ini khususnya masyarakat golongan miskin.

BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Dusun Ciaruteun Ilir adalah salah satu dusun yang berada di Desa Ciaruteun Ilir berada di wilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Selain Dusun Ciaruteun Ilir, dusun lain yang ada di Desa Ciaruteun Ilir yaitu dusun Munjul, Pabuaran, Tegal Salam dan Ciaruteun Ilir, 10 Rukun Warga (RW), dan 35 Rukun Tetangga (RT). Sebelah utara Desa Ciaruteun Ilir ini berbatasan dengan Kecamatan Rumpin, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciampea, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cijujung, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Leuweng Kolot. Dusun Ciaruteun Ilir berjarak kira-kira 6 km dari Kecamatan Cibungbulang, dan kira-kira 17 km dari Ibukota Kabupaten Bogor, posisinya yang berada di kaki gunung Salak membuat daerah ini beriklim sejuk. Dialiri dua sungai yaitu sungai Ciaruteun dan sungai Ciantean, Desa Ciaruteun Ilir memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang cocok untuk pertanian. Dengan luas wilayah 400 ha, sebagian besar lahan desa ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pemanfaatan lahan wilayah di desa ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemanfaatan Lahan Wilayah Desa Ciaruteun Ilir

No	Lahan	Luas
1.	Pemukiman	106,00 ha
2.	Kebun & sawah	272,00 ha
3.	Lapangan olah raga	3,00 ha
4.	Perkantoran	5,00 ha
5.	Tanah/ bangunan pendidikan	0,50 ha
6.	Tanah/ bangunan peribadatan	0,50 ha

Sumber: Profil Desa Ciaruteun Ilir, 2011

3.2. Demografi

3.2.1. Kependudukan

Rata-rata wanita di Dusun Ciaruteun Ilir menikah pada umur 15 sampai 17 tahun, sementara laki laki menikah pada usia sekitar 20 tahun. Umumnya keluarga muda di dusun ini memiliki dua sampai empat orang anak. Mayoritas penduduk yang tinggal di dusun ini adalah penduduk asli suku Sunda, suku lain yang menetap adalah suku pendatang yaitu suku Jawa, Betawi dan Batak. Ada sebanyak 2700 penduduk yang menetap di Dusun Ciaruteun Ilir ini. Sementara itu jumlah total penduduk Desa Ciaruteun Ilir 10.165, sebanyak 5.168 diantaranya laki laki dan 4.997 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di desa ini adalah anak-anak dengan kelompok umur 0-9 tahun. Berikut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di desa ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Ciaruteun Ilir

No.	Kelompok Umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	00 – 04 tahun	534	606	1140
2.	05 – 09 tahun	566	636	1202
3.	10 – 14 tahun	570	282	852
4.	15 – 19 tahun	558	547	1105
5.	20 – 24 tahun	421	493	914
6.	25 – 29 tahun	385	367	752
7.	30 – 34 tahun	340	373	713
8.	35 – 39 tahun	302	331	633
9.	40 – 45 tahun	317	321	638
10.	45 – 49 tahun	220	214	434
11.	50 – 54 tahun	224	175	399
12.	55 – 59 tahun	168	177	345
13.	60 – 64 tahun	235	224	459
14.	65 – 70 tahun	164	113	277
15.	70 tahun ke atas	164	113	277
Total		5.168	4.997	10.165

Sumber: Profil Desa Ciaruteun Ilir, 2011

3.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar (722 orang) penduduk di Dusun Ciaruteun Ilir bekerja di sektor pertanian, sebagian lagi berprofesi sebagai pedagang hasil tani, tukang ojek dan buruh bangunan, sisanya menggantungkan hidup sebagai buruh pabrik, pekerja bengkel, supir angkutan, pengrajin, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta. Tidak banyak penduduk di desa ini yang pergi merantau ke luar kota untuk bekerja atau ke luar negeri untuk menjadi TKI, mereka lebih memilih untuk bekerja di sekitar kabupaten Bogor sebagai buruh bangunan untuk yang laki laki dan sebagai pembantu rumah tangga untuk yang wanita. Pekerjaan pertanian biasanya dilakukan oleh penduduk yang berumur di atas 35 tahun. Generasi muda yang belum menikah biasanya lebih memilih pekerjaan non pertanian, karena pekerjaan pertanian dianggap sangat melelahkan, remaja pria biasanya bekerja sebagai tukang ojek. Hanya wanita usia produktif yang sudah menikah biasanya mau bekerja serabutan di kebun, sementara bagi yang belum menikah memilih menganggur atau mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Wanita yang bekerja di kebun biasanya hanya mengerjakan pekerjaan ringan seperti menyiangi, membersihkan rumput atau memetik hasil tani ketika musim panen. Upah mereka tergantung hasil kerja setiap harinya. Upah yang mereka dapatkan sangat sedikit, sebagai contoh wanita yang bekerja memanen daun kemangi dari jam 06.00 pagi sampai jam 01.00 siang dibayar hanya sekitar Rp.10.000 sampai Rp.17.000. Upah yang mereka terima tergantung dari jumlah ikatan yang mereka kerjakan. Pria usia produktif di desa ini pada umumnya bekerja sebagai petani, namun tidak semua petani memiliki lahan sendiri, sebagian besar petani di sini mengerjakan lahan orang lain yang disewa per panen atau dikontrak per tahun. Bagi yang tidak sanggup menyewa lahan tani, mereka menjadi buruh tani yang bekerja di kebun orang lain, pekerjaan yang dilakukan seperti menyiram, memberi pupuk dan pestisida, mencangkul, menanam bibit dan mengangkut hasil panen. Buruh tani laki laki biasanya diberi upah sekitar Rp.17.000 sampai Rp25.000 per harinya, dengan upah sebesar ini mereka biasanya juga mendapatkan makan siang dan rokok dari juragan tani. Sebagian buruh tani memperoleh upah sekitar Rp.35.000, dengan upah sebesar ini biasanya mereka tidak mendapatkan fasilitas makan dan rokok. Di sela waktu lowongnya, beberapa petani di desa ini memiliki pekerjaan

tambahan sebagai ojek atau bekerja sampingan mengisi waktu lowongnya di kebun petani lain. Berikut ini tabel struktur mata pencaharian penduduk di desa ini:

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Penduduk Dusun Ciaruteun Ilir

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	722 orang
2.	Petani	930 orang
3.	Pegawai negeri	10 orang
4.	TNI/Polri	4 orang
5.	Swasta	15 orang
6.	Buruh Pabrik	10 orang
7.	Pengrajin	5 orang
8.	Tukang bangunan	140 orang
9.	Penjahit	3 orang
10.	Tukang las	50 orang
11.	Tukang Ojek	275 orang
12.	Bengkel	76 orang
13.	Sopir angkutan	62 orang
14.	Lain lain	255 orang

Sumber: Profil Dusun Ciaruteun Ilir, Desa Ciaruteun Ilir, 2010

3.2.3. Kondisi Perumahan Penduduk

Dari hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar rumah di dusun ini adalah rumah semi permanen, rumah-rumah ini umumnya dihuni keluarga petani. Sebagian rumah di desa ini sudah dibangun permanen, rumah-rumah ini biasanya merupakan rumah elit desa seperti ketua RT, RW serta tuan tanah dan tengkulak yang ada di dusun ini. Beberapa rumah masih menggunakan anyaman bambu dan papan, rumah-rumah yang tidak permanen umumnya adalah rumah para buruh tani di dusun ini. Rumah-rumah di desa ini umumnya kecil hanya memiliki satu atau dua kamar tidur. Satu rumah kerap dihuni oleh dua atau tiga generasi keluarga, karena banyak keluarga muda yang belum memiliki rumah

masih tinggal di rumah orangtuanya, sehingga banyak rumah yang terlihat sempit dan sesak. Rata-rata rumah di desa ini sudah dialiri listrik. Sebagian besar rumah penduduk memiliki kamar mandi dengan sumur gali atau sumur pompa sebagai sumber air bersih, namun masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan karena tidak memiliki ventilasi udara yang cukup sehingga udara dalam rumah menjadi lembab, dan masih banyak yang tidak memiliki jamban. Kebiasaan buang air besar di sembarang tempat seperti di kali atau di kebun, atau menumpang di jamban milik tetangga masih merupakan sesuatu yang lazim.

3.2.4. Infrastruktur

Desa Cairuteun Ilir memiliki kantor desa dengan satu balai pertemuan dan sebanyak 10 poskamling yang tersebar di empat dusun. Untuk sarana peribadatan, terdapat sebanyak 15 mushola dan 10 masjid. Masyarakat desa yang tidak memiliki kamar mandi biasanya memanfaatkan satu sumber air dan MCK umum di desa ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, cuci, mandi dan kakus. Terdapat satu irigasi dan dua aliran sungai di desa ini yang bisa dimanfaatkan petani untuk mengairi kebun. Lokasi irigasi yang ada berada di dusun Tegal Salam, salah satu tetangga Dusun Ciaruteun Ilir. Irigasi yang ada ini tidak berfungsi dengan baik, seringkali tidak menyala pada siang hari di Dusun Ciaruteun Ilir, karena itu, petani di desa ini memanfaatkan dua aliran sungai yang ada di desa ini dan juga air hujan secara tradisional untuk pertanian yaitu dengan cara membuat empang untuk menampung air hujan.

Kondisi jalan umum menuju Dusun Ciaruteun Ilir rusak parah dan berbatu. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada perbaikan jalan. Kira-kira tahun 2006 yang lalu sempat ada perbaikan jalan, namun dalam kurun waktu setahun setelahnya jalan umum di desa ini kembali rusak parah. Tidak ada angkutan umum yang beroperasi di desa ini, satu-satunya sarana yang ada hanyalah ojek dengan tarif yang relatif mahal untuk penduduk dusun ini, hal ini semakin menyulitkan akses penduduk untuk keluar dan masuk dusun.

Sarana dan prasarana kesehatan di Dusun Ciaruteun Ilir terbatas, hanya ada satu dokter yang membuka praktek dan satu puskesmas dengan jumlah paramedis yang sangat minim. Berikut tabel sarana dan prasarana kesehatan di desa ini:

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Desa Ciaruteun Ilir

No	Fasilitas	Jumlah (unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	10
3.	Dokter Puskesmas	1
4.	Dokter praktek	1
5.	Bidan Desa	1
6.	Bidan praktek	3
7.	Kader Posyandu	30
8.	Dukun beranak terlatih	5

Sumber: Profil Desa Ciaruteun Ilir, 2010

3.2.5. Pendidikan Penduduk

Dusun Ciaruteun Ilir dengan total penduduk sebanyak 2700 orang ini dihuni sebagian besar penduduk yang mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar, namun umumnya tidak lulus. Sebagian besar penduduk dusun ini putus sekolah karena terkendala biaya. Jarak sekolah yang terlalu jauh semakin menyulitkan penduduk untuk mendapatkan kesempatan bersekolah. Terdapat satu PAUD dan dua Sekolah Dasar dan satu Madrasah di Desa Ciaruteun Ilir, namun tidak ada satupun sekolah SMP maupun SLTA. Sekolah SMP dan SLTA terdekat berada di kecamatan Cibungbulang atau sekitar 6 kilometer dari desa ini. Anak anak harus berjalan kaki begitu jauh untuk menempuh sekolahnya jika tidak memiliki uang sekitar Rp. 15.000,- untuk ongkos pulang pergi naik ojek, sebab tidak ada angkutan umum yang masuk ke dusun ini. Meskipun ada beberapa keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya, tetapi banyak anak anak di Dusun Ciaruteun Ilir yang malas untuk melanjutkan sekolah. Masyarakat di sini secara umum menganggap bahwa sekolah sampai lulus SD sudah cukup, tidak perlu sekolah sampai tinggi karena dana untuk sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk bertani. Berikut ini tabel komposisi penduduk Dusun Ciarruteun ilir berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Ciaruteun Ilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD/ sederajat	1129 orang
2.	Tamat SD/ sederajat	1273 orang
3.	Tamat SLTP/ sederajat	229 orang
4.	Tamat SLTA/ sederajat	109 orang
5.	Tamat Akademi	12 orang
6.	Tamat Sarjana	15 orang

Sumber: Profil Dusun Ciaruteun Ilir, Desa Ciaruteun ilir, 2010

3.2.6. Jenis Usaha Petani

Pada tahun 90-an petani petani di dusun ini mengganti tanaman padinya dengan tanaman *cashcrop*. *Cashcrop* merupakan jenis tanaman siap jual yang memiliki waktu tanam yang relatif singkat. Jenis tanaman *cashcrop* yang ditanam adalah berbagai jenis sayuran seperti bayam, chasim, kangkung, selada, terong, jagung, kucai dan kemangi. Petani di sini lebih memilih untuk menanam *cashcrop* seperti sayuran dengan alasan keterbatasan lahan dan jangka waktu panen sayur lebih cepat dibandingkan padi. Sebagian besar petani di desa ini merupakan petani gurem, yang memiliki lahan yang sempit (kurang dari 0.5 ha). Seiring perkembangan waktu, banyak lahan tani yang dijual kepada para developer perumahan, sehingga semakin lama lahan tani yang ada semakin lama semakin sempit. Dengan keterbatasan lahan yang mereka miliki akan sulit untuk mendapatkan penghasilan yang cukup jika hanya menanam padi. Untuk memanen sayuran seperti bayam hanya diperlukan waktu kira kira sebulan, sementara untuk memanen padi diperlukan waktu hingga empat bulan lamanya. Dengan jangka waktu panen yang lebih singkat maka petani dapat menjual hasil taninya lebih cepat sehingga kemudian penghasilan akan didapatkan lebih cepat juga, selain itu harga jual sayur pun relatif lebih menguntungkan petani. Karna itu, saat ini hanya tinggal sedikit petani yang mengerjakan sawah di dusun ini.

Umumnya petani di dusun ini menanam sayuran non organik, hanya sebagian kecil dari mereka yang menanam tanaman organik. Sementara itu

beberapa petani lain mengaku ada yang sempat mencoba menanam tanaman organik namun terkendala pada modal, karena dibutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli pupuk organik. Selain itu petani organik agak kesulitan jika harus memasarkan hasil taninya di sekitar kabupaten Bogor, hal ini disebabkan ketidakseimbangan permintaan dan produksi organik yang ada di sekitar Bogor, sementara itu untuk pasar di luar Kabupaten Bogor petani kesulitan akses untuk menjangkaunya.

Secara umum, hasil tani di dusun ini dijual ke pasar tradisional melalui pengumpul yang ada di desa atau dibawa langsung oleh si petani sendiri. Untuk sayuran organik, ada petani yang menjual hasil taninya ke supermarket, dan ada juga yang diimport sampai ke Taiwan lewat ICDF atau International Cooperation and Development Fund Taiwan, yaitu satu organisasi Taiwan bekerja sama dengan IPB yang membantu memasarkan hasil tani organik petani di sekitar Bogor ke Taiwan . Diperlukan uji kelayakan hasil tani yang cukup ketat untuk memasarkan sayuran organik di ICDF. Beberapa petani yang pernah mencoba memasarkan hasil taninya ke ICDF mengaku pernah harus menanggung rugi menjual murah sayurannya di pasar tradisional, karena sayurannya dikembalikan dari ICDF karena tidak lolos uji. Hingga saat ini hanya tersisa tiga orang petani organik saja yang tetap menjual hasil taninya ke ICDF. Sementara itu seorang petani organik yang lain, menjual hasil tani organiknya lewat SPI (Serikat Petani Indonesia).

3.2.7. Bantuan pemerintah

Ada beberapa bantuan yang pernah diberikan pemerintah di Desa Ciaruteun Ilir. Beberapa diantaranya adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), dan kredit usaha dari PNPM.

Ada sekitar 800 orang penerima BLT di Dusun Ciaruteun Ilir pada tahun 2009, bantuan ini diserahkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Pada saat itu pelaksanaan pendataan dan penyebaran informasi tidak transparan sehingga banyak keluarga yang tidak mampu yang tidak kebagian bantuan BLT. Ironisnya banyak keluarga yang mampu yang turut menerima BLT, padahal masih banyak keluarga tidak mampu yang lebih layak dan berhak menerimanya. Akibatnya,

sempat terjadi demonstrasi masyarakat di kantor kepala desa pada tahun 2009. Mereka memprotes cara kerja pembagian BLT yang tidak adil dan transparan. Begitu juga dengan pelaksanaan bantuan kredit dari PNPM, warga desa mengaku hanya sedikit dari mereka yang ikut mendapatkan kredit. Banyak dari mereka yang merasa tidak dilibatkan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu kalau ada bantuan kredit dari PNPM.

Untuk bantuan pertanian, pemerintah pernah memberikan bantuan satu unit motor becak pengangkut hasil tani, mesin pencacah pembuat pupuk organik dan bangunan RPH (Rumah Penyimpanan Hasil). Rumah ini ditujukan untuk tempat penyimpanan sementara hasil tani organik yang ada di Desa Ciaruteun Ilir. Bantuan ini kemudian diserahkan kepada salah satu ketua RW yang memiliki kelompok tani di desa untuk dikelola. Namun seiring waktu, mesin pencacah, RPH dan motor becak yang diberikan ini tidak dioperasikan untuk kepentingan bersama petani di desa selayaknya tujuan yang seharusnya. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan pada petani-petani lain di desa.

Banyak penduduk mengaku sering tidak tahu informasi bantuan apa yang sedang diberikan di desa, karena tidak ada sosialisasi dari ketua RT atau ketua RW setempat. Sebagian kecil petani mengaku sering diajak untuk ikut dalam rapat rencana pemberian bantuan dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering sekali hanya sedikit dari mereka yang dilibatkan.

Distribusi bantuan yang diberikan di Dusun Ciaruteun Ilir sering kali tidak merata dan adil, warga yang mendapat kesempatan kerap kali adalah warga yang masih punya hubungan keluarga dengan kepala desa, ketua RT, dan ketua RW. Ini menjadi indikasi bahwa praktek korupsi dan nepotisme di antara elit desa ini marak terjadi. Pengalaman ini menyebabkan sebagian besar masyarakat miskin di desa seperti keluarga buruh tani menjadi cenderung apatis pada rencana rencana bantuan selanjutnya. Mereka menjadi pasrah, karena elit desa tak pernah berpikah pada mereka.





BAB 4

TEMUAN LAPANGAN

Bab ini merupakan temuan lapangan hasil penelitian analisis kemiskinan struktural masyarakat petani yang merupakan studi kasus terhadap masyarakat petani di desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama yaitu gambaran kondisi kemiskinan di Dusun Ciaruteun Ilir yang dijabarkan dengan menggunakan indikator kemiskinan oleh Bappenas, sub bab kedua yaitu faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural di Dusun Ciaruteun Ilir.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini ada sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 10 orang petani dan 10 orang buruh tani, 2 orang tuan tanah sekaligus ketua RT dan ketua RW serta satu orang kepala desa Ciaruteun Ilir. Temuan lapangan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka (*open ended*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur.

4.1. Kondisi Kemiskinan Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir

4.1.1. Keterbatasan Akses Pendidikan

Terdapat satu PAUD dan dua Sekolah Dasar dan satu Madrasah di Dusun Ciaruteun Ilir, namun tidak ada satupun sekolah SMP maupun SLTA di sini. Sekolah SMP dan SLTA yang terdekat berada di kecamatan Cibungbulang atau sekitar 6 km dari dusun ini. Anak anak yang hendak bersekolah harus menyediakan uang sebesar Rp. 14.000,- untuk ongkos pulang pergi naik ojek, sebab tidak ada angkutan umum di desa ini. Uang sejumlah Rp.14.000,- tentu bukan jumlah yang kecil buat para petani dan buruh tani di sini. Bagaimana tidak, jika rata-rata pendapatan para petani hanya sekitar Rp.850.000,- per bulannya, maka pendapatan mereka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari saja. Terlebih lagi buruh tani yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar Rp.27.000, dengan jumlah pendapatan sekecil ini kebutuhan dasar mereka sehari-hari saja pun belum tentu terpenuhi. Terkait hal ini, berikut salah satu kutipan wawancara dengan kepala desa Ciaruteun Ilir dan para petani:

“Di sini cuma ada sekolah SD sama Madrasah. Kalau SMP, sama SLTA *mah* belum ada. Sekolah SD ada dua, SD 01 sama 02 negeri. Ada juga PAUD yang

baru beberapa berdiri tahun, itu yang buat anak-anak usia dini. Penduduk di desa ini biasanya cuma sekolah sampai SD, itu juga banyak yang nggak lulus. Biasanya sih kendalanya di biaya, mbak. Kalau di desa ini kan adanya cuma sekolah SD, kalau sekolah SMP-SLTA itu jauh, mbak. Adanya di kecamatan Cibungbulang, kira-kira 6 km dari sini. Kalau jalan kaki, ya jauh. Ongkos ke sananya juga mahal, karena mesti naek ojek, nggak ada angkutan umum di sini, mbak. Kalau naik ojek, ongkosnya Rp.7000 sekali jalan. Makanya kalau orang tua yang nggak mampu, terpaksa anak-anaknya putus sekolah...” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 February 2012)

“Nggak ada, mbak. Istri saya juga nggak lulus SD. Di sini *mah*, kalau mau sekolah SMP, atau SMA susah. Kan disini adanya cuma SD, kalau mau sekolah SMP sama SMA mesti keluar kampung, di Cibungbulang. Jauh, mbak. Ongkosnya mahal. Makanya di kampung ini *mah*, rata-rata orang paling cuma sekolah sampai SD, kalau bisa sampai SMA mah paling yang mampu aja. Biasanya naik motor ke sekolahnya.” (Bpk. PE, 11 Mei 2012)

“Nggak ada mbak, istri saya juga tidak lulus SD. Kan waktu jaman kita dulu susah. Kalau ada uang mending dibuat modal untuk tani sama orang tua, ya kita sekarang anak anaknya dirusuh nerusin. Kalo di desa ini juga jarang yang sekolah sampai SMP SMA gitu mbak. Sekolah tinggi-tinggi juga ntar kerjanya tani juga ya, buat apa sayang.” (Bpk. SA, 13 Mei)

“Nggak ada yang sekolah sampai SMA, mbak. Semua anak saya cuma sekolah SD, itu juga pada nggak lulus. Nggak punya uang saya buat sekolahin, mbak.” (Bpk.SAK, 15 Mei 2012)

“Istri saya lulus SD mbak. Kalau anak anak saya masih SD semua. Ya nanti kalau ada biaya cukup dilanjutkan sampai SMP saja. Lagi pula di desa ini nggak ada sekolah SMP dan SMA, adanya di kecamatan Cibungbulang, kesananya mesti ngongkos ojek lagi mbak, mahal, ya ga kuat kalau semua anak saya disekolahkan sampe SMA nanti.” (Bpk. TI, 13 Mei 2012)

Selain keterbatasan penghasilan para petani dan buruh tani, ketidaktersediaan sekolah SMP dan SLTA di wilayah Ciaruteun Ilir, jarak sekolah SMP dan SLTA ada yang terlalu jauh dari wilayah pemukiman Ciaruteun Ilir, ketidaktersediaan angkutan umum, biaya transportasi yang mahal, besarnya

tanggungannya keluarga yang disebabkan oleh banyaknya anak juga menjadi alasan bagi masyarakat dusun ini untuk memilih tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Sebagian dari mereka justru tidak sempat lulus SD, atau bahkan sama sekali tidak bersekolah, terutama para generasi tua. Penghasilan petani dan buruh tani yang terbatas sementara mereka memiliki jumlah anak yang banyak tentu menuntut para petani untuk mendahulukan kebutuhan pangan keluarganya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan beberapa informan:

“Saya punya 8 anak, semua sekolah SD tapi nggak ada yang lulus. Suami saya juga nggak sekolah dulunya, mbak. Susah, nggak ada biaya buat sekolah, *mah*. Buat makan aja susah, mbak.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

“Dulu orang tua saya nggak punya cukup uang buat nyekolahkan saya mbak, karena anaknya banyak, jadi saya cuma sekolah SD, itu juga nggak lulus. Istri saya juga cuma lulus SD...” (Bpk. UT, 15 Mei 2012)

“Nggak ada yang sampai lulus SMA ya, semua anak saya (13 orang) cuma lulusan SD atau Madrasah.” (Ibu AR, 14 Mei 2012)

4.1.2. Perbedaan Upah Buruh Tani dan Rendahnya Penghasilan Petani

Berdasarkan hasil temuan lapangan, terlihat bahwa penghasilan buruh tani di desa Ciaruteun Ilir sangat kecil. Penghasilan buruh tani pria di desa ini berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.25.000,-/hari jika mendapat makan siang dan rokok dari majikannya, dan ada yang mendapat Rp. 35.000,-/hari jika tidak mendapat makan siang dan rokok. Untuk menambah penghasilan, beberapa buruh tani mengerjakan pekerjaan tambahan lain seperti membantu menyiram atau mencangkul di kebun orang lain, atau ngojek pada waktu sore hari setelah pulang kerja. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa upah buruh tani pria lebih besar dari pada buruh tani wanita, karena biasanya buruh tani pria mengerjakan pekerjaan yang lebih berat dan jam kerjanya lebih lama bila dibandingkan buruh tani wanita. Sehubungan jumlah upah buruh tani pria, berikut komentar dari beberapa buruh tani pria:

“Ya semua (dikerjakan), mbak. Nyangkul, nyiram, kasih obat (pestisida), nyabut rumput sama nanam bibit. Kalau kayak sekarang lagi panen gini, saya metik sama ngiket daun kacang. Ini semua satu petak saya yang kerjain berdua

sama mas Utek teman saya kerja disini. Kalau nggak kelar hari ini, ya dilanjut besok. Kalau misalnya suka hujan kayak tadi pagi gitu, saya suka nunggu dulu sampai agak reda, baru kerja. Tapi ya biar hujan juga kita tetap kerja, mbak. Kalau nggak, kan kita nggak dibayar, nggak bisa makan. Seharinya saya dapat Rp.20.000, trus siangnya dikasih makan siang sama rokok sama Pak Ucu (majikan). Nggak ada kalau kerja tambahan, *mah*. Saya kerja cuma disini aja, mbak. Disini juga saya kan datang dari pagi jam 06.00, terus kerja sampai jam 05.00 sore.” (Bpk. TA, 15 Mei 2012).

“Saya jagain sapinya Pak PU di sini. Pak PU itu majikan saya di sini. Ya pekerjaannya ngasih makan, ngurusin sampilah. Saya kan nginepnya di sini. Terus saya juga bantu-bantu kerjaan kayak nyangkul, nyiram, nanam bibit, ya semuanya, mbak. Di sini saya dapatnya Rp.35.000,-/harinya mbak. Itu nggak dikasih makan siang sama rokok lagi. Dikasihnya tiap minggu, mbak. Sekarang *sih* lagi bantu-bantu kerja juga di kebon orang lain, mbak. Tapi itu kan nggak terus-terusan, mbak. Kalau kebetulan lagi butuh, ya saya dipanggil.” (Bpk. AD, 13 Mei 2012)

“Sekarang *sih* saya lagi nyangkul sama nyiram, biasanya suka metik sayuran kalau panen, nggak tentu ya, tergantung lagi ada kerjaan apa, gitu mbak. Kalau sekarang *sih*, saya lagi nyangkul sama nyiram. Upahnya Rp.35.000,-/hari, itu nggak dapat makan sama rokok.” (Bpk. SA, 15 Mei 2012)

“Ya semua saya kerjakan\, mbak. Nyangkul, nyiram, kasih obat (pestisida), nyabut rumput sama nanam bibit. Kalau kayak sekarang lagi panen gini, saya metik sama ngiket daun kacang. Ini semua satu petak saya yang kerjain berdua sama mas Utek teman saya kerja disini. Kalau nggak kelar hari ini, ya dilanjut besok. Kalau misalnya suka hujan kayak tadi pagi gitu, saya suka nunggu dulu sampai agak reda, baru kerja. Tapi ya biar hujan juga kita tetap kerja, mbak. Kalau nggak, kan kita nggak dibayar, nggak bisa makan. Seharinya saya dapat Rp.20.000, trus siangnya dikasih makan siang sama rokok sama Pak Ucu. Nggak ada kalau kerja tambahan, *mah*. Saya kerja cuma disini aja, mbak. Disini juga saya kan datang dari pagi jam 06.00 sudah disini sampai jam 05.00 sore. Jadi pulang ke rumah udah sore. Nggak sempat kerja di tempat lain lagi.” (Bpk. TA, 15 Mei 2012)

“Kerjaan saya nyangkul, menyangi, nyiram, kasih obat (pestisida), nyabut rumput sama nanam bibit. Ya semuanya, mbak. Tergantung lagi butuhnya apa. Kayak sekarang lagi musim panen sayur kangkung gini, ya saya sehari-harinya metik, terus ngiket, lalu ngangkut. Nanti kalau habis panen ya saya nyabutin rumput liar, terus nanam sama nyiram lagi. Dapatnya dikit, ya cuma Rp.20.000,-/hari. Kalau yang lain (kuli yang lain) saya nggak tahu ya dibayarnya berapa. Kita dikasih makan siang sama rokok. Kita dibawain nasi sama pak Ucu, majikan saya. Biasanya tiap siangnya kita makan sama-sama yang lain (buruh lain) di saung. Kita dikasih upahnya biasanya kita setiap sekali seminggu. Sesekali-sekali kalau ada waktu saya suka ngojek sore-sore pake motor teman, mbak. Ya iseng-iseng buat nambah-nambah pendapatan mbak.” (Bpk. ABM, 13 mei 2012)

Sementara itu, upah buruh wanita lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan para buruh tani pria. Meski ada buruh tani wanita yang mendapatkan upah Rp.35.000,-/ hari. Namun jumlah ini sudah tergolong besar untuk ukuran upah buruh tani wanita di desa Ciaruteun Ilir, karena umumnya buruh tani musiman tidak mendapatkan upah sebanyak ini. Ibu Janaah, misalnya seorang buruh tani yang bekerja menetap pada satu orang majikan mendapatkan upah Rp.35.000/harinya, upah ini sudah termasuk ongkos ganti makan siang. Berdasarkan temuan lapangan, ditemukan bahwa dua orang buruh wanita dari empat orang yang diwawancarai di desa ini hanya mendapat upah antara Rp.12.000,- hingga Rp.17.000,- saja, upah ini pun mereka dapatkan tanpa fasilitas makan siang dari majikan, pembayaran upah biasanya dilakukan setiap hari sehabis kerja. Terkait dengan hal ini, berikut hasil wawancara dengan beberapa buruh tani wanita:

“Kerjaan saya metik sama iket sayuran kalau panen, ya suka suka cabutin rumput juga, mbak. Saya biasanya dapat Rp.17.000,-/harinya, itu nggak dikasih makan siang, mbak. Itu saya mesti ngikat 2500 ikat kemangi, mbak. Nanti kalau dah kelar, diitungin sama bapaknya (juragan). Terus baru dibayar upahnya. Saya nggak punya pekerjaan tambahan, ya ini juga nggak setiap hari mbak, kalau lagi dipanggil aja.” (ANR, 14 Mei 2012)

“Kerjaan saya ngikat kemangi kayak gini, di rumah neng. Kalau ngiket ke kebon saya sudah nggak kuat. Panas, capek. Kalau gini di rumah saya masih

kuat. Jadi kemanginya dianterin petaninya ke sini. Seharinya saya dapat Rp.5000,-, itu nggak dapat makan. Kalau ngiket kemangi di rumah gini memang dapatnya dikit, neng. Kan nggak sama kalau kerja ngiket di kebon. Nggak punya kerjaan tambahan saya, ya saya cuma bisa ngikat kemangi di rumah aja, sudah tua.” (Ibu AR, 14 Mei 2012)

“Kerjaan saya ya gini neng, metik dan ikat sayuran waktu panen. Sekarang ya lagi ngiket kemangi gini. Saya dapat upah rata rata Rp.12.000,- seharinya, itu nggak dapat makan siang lagi. Itu saya mesti ikat 2000 ikatan kemangi. Kalo saya nggak bisa ngikat sebanyak itu, ya upahnya nggak sampai Rp.12.000,-, neng. Ini juga kan saya kerja ngiket kemangi nggak setiap hari, kalau udah habis panen ya udah, selesai gitu. Terus, ya nunggu lagi dipanggil sama petani lain. Jadi saya kerjanya nggak setiap hari. Makanya pendapatannya juga nggak setiap hari, neng. Nggak punya kerjaan tambahan lagi. Saya *mah* bisanya kerja begini aja (memanen sayuran). Udah tua. Ini juga saya suka udah nggak kuat kalau duduk terus di kebon sampe siang terik, panas terus saya gampang capek, neng. Kemaren juga saya nggak kerja sehari, sakit saya, capek banget rasanya badannya.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan beberapa buruh tani wanita di desa ini ditemukan bahwa sebagian besar buruh wanita di desa ini adalah buruh musiman, mereka bekerja berpindah-pindah, karena biasanya hanya dipanggil bekerja ketika musim panen. Karena itu, pendapatan mereka juga tidak pasti dan tidak selalu ada setiap hari, karena panggilan untuk bekerja tidak selalu ada. Hasil temuan lapangan menunjukkan tiga orang dari empat orang buruh wanita yang diwawancarai adalah buruh wanita musiman yang bekerja berpindah-pindah sesuai dengan panggilan petani lain di musim panen. Para buruh tani wanita ini biasanya bekerja di kebun dari jam 06.00 pagi sampai jam 01.00 siang. Jenis pekerjaan mereka diantaranya memetik sayuran ketika panen, mengikat, dan mencabut rumput liar. Sekilas mungkin kedengarannya tidak berat. Buruh tani yang bekerja mengikat kemangi misalnya, untuk mendapatkan upah Rp.12.000,- saja, mereka harus bisa mengerjakan ikatan kemangi sebanyak 2000 ikat. Jika kurang dari jumlah itu, maka upahnya akan dipotong, atau jika ingin mendapatkan upah lebih, maka mereka harus mampu mengerjakan ikatan kemangi lebih banyak

lagi. Berikut ini salah satu kutipan hasil wawancara dengan salah seorang buruh tani wanita:

“Saya dapat upah rata rata Rp.12.000,- seharinya, itu nggak dapat makan siang lagi. Itu saya mesti ikat 2000 ikatan kemangi. Kalo saya nggak bisa ngikat sebanyak itu, ya upahnya nggak sampai Rp.12.000,-, neng. Ini juga kan saya kerja ngiket kemangi nggak setiap hari, kalau udah habis panen ya udah, selesai gitu. Terus, ya nunggu lagi dipanggil sama petani lain. Jadi saya kerjanya nggak setiap hari. Makanya pendapatannya juga nggak setiap hari, neng.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

Sebagian wanita, terutama yang sudah tua, memilih untuk bekerja di rumah saja, karena alasan agar tidak terlalu capek dibandingkan jika harus turun ke kebun. Biasanya petani akan mengantarkan sayuran ke salah satu rumah, dan para wanita berkumpul di sana untuk mengikat sayuran. Namun, upah buruh tani yang bekerja di rumah sangat kecil jika dibandingkan dengan upah buruh wanita yang bekerja di kebun. Seorang buruh tani wanita yang diwawancarai misalnya, hanya mendapatkan upah Rp.5000/hari dengan bekerja mengikat kemangi di rumah, upah ini didapatkan tanpa tambahan fasilitas makan siang. Berikut salah satu kutipan hasil wawancara dengan salah satu buruh tani wanita:

“Seharinya saya dapat Rp.5000,-, itu nggak dapat makan. Kalau ngiket kemangi di rumah gini memang dapatnya dikit, neng. Kan nggak sama kalau kerja ngiket di kebun.” (Ibu AR, 14 Mei 2012)

Hasil temuan lapangan menunjukkan, sebagian besar buruh tani pria mempunyai istri yang juga bekerja sebagai buruh tani musiman, selain itu ada juga yang berdagang kecil-kecilan di rumah, namun ada juga yang tidak bekerja, hanya mengurus anak-anak di rumah. Disebabkan pekerjaan istri para buruh tani yang bekerja sifatnya tidak menetap, maka jumlah pendapatan total para buruh tani jika digabung dengan pendapatan istrinya juga tidak menentu, karena para buruh wanita musiman hanya akan bekerja tergantung panggilan/ kebutuhan musim panen. Mirip dengan para buruh tani pria, hasil temuan lapangan juga menunjukkan dua dari empat buruh tani wanita memiliki suami yang pekerjaannya tidak tetap, sebagai buruh tani dan tukang ojek. Rata-rata total pendapatan harian buruh tani bila digabung dengan pendapatan istri/ suaminya

adalah sekitar Rp.22.000,- hingga Rp.45.000,-. Terkait dengan total pendapatan para buruh tani dengan istri/ suaminya per hari, berikut ini beberapa komentar buruh tani:

“Nggak tentu ya. Rata rata bisa Rp. 45.000,-/hari, mbak. Ya tergantung kalau istri saya lagi ada kerjaan metik kemangi, dia bisa dapat Rp.12.000,- sampai Rp.15.000,- sehari. Kalau lagi nggak ada ya, pendapatan cuma dari saya. Pernah juga kita berdua nih sama-sama lagi nggak dipanggil-panggil buat “nguli”, ya kita nggak ada pendapatan, mbak. Nggak makan. Paling nunggu dikasih kiriman sama anak dari Jakarta, itu juga kadang-kadang kalau kita minta aja dikasih, kan mereka juga pas-pasan disananya, mbak.” (Bpk. SAK, 15 Mei 2012).

“Nggak tentu ya, kalau bapak pas dapat kerjaan ngikat juga ya kita sama sama dapat Rp.12.000,- jadi digabung dapat Rp.24.000,-. Tapi kalau bapak dapat kerjaan kuli cangkul atau nyiram bisa lebih banyak dikit dapatnya. Tapi itu juga sama kayak saya, nggak tentu kan tergantung panggilan dari orang-orang yang lagi butuh bapak, gitu. Jadinya nggak tentu pendapatannya setiap harinya. Bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa kalau lagi sama-sama nggak ada kerjaan.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

“Nggak tentu ya. Rata rata bisa Rp. 45.000,-/hari, mbak. Ya tergantung kalau istri saya lagi ada kerjaan metik kemangi, dia bisa dapat Rp.12.000,- sampai Rp.15.000,- sehari. Kalau lagi nggak ada ya, pendapatan cuma dari saya. Pernah juga kita berdua nih sama-sama lagi nggak dipanggil-panggil buat “nguli”, ya kita nggak ada pendapatan, mbak. Nggak makan. Paling nunggu dikasih kiriman sama anak dari Jakarta, itu juga kadang-kadang kalau kita minta aja dikasih, kan mereka juga pas-pasan disananya, mbak.” (Bpk. SAK, 15 Mei 2012)

“Kira kira Rp.37.000,-/hari. Istri saya kerja di kebon orang juga, bantuin ngikat sayuran, mbak. Upahnya Rp.17.000,- seharinya.” (Bpk. UT, 15 Mei 2012)

“Berapa ya, mungkin ada kira kira Rp.35.000. Nggak tentu *sih* ya. Istri saya suka jualan gorengan sama kue-kue gitu di rumah, tapi ya tiap hari dapatnya nggak tentu. Ya katakan rata-rata kalau digabung pendapatan kita segitu kali, ya.” (Bpk. TA, 15 Mei 2012)

Sementara itu dari hasil wawancara dengan beberapa informan petani di Ciaruteun ilir ditemukan bahwa penghasilan bersih petani di desa ini sekitar Rp. 450.000 hingga Rp.1.500.000 setiap bulannya, jumlah ini sudah dikurangi dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk sarana produksi pertanian. Jumlah penghasilan bersih para petani biasanya tidak tetap, hal ini dikarenakan harga sayuran di pasar bisa naik dan turun. Dalam sebulan, petani di desa ini bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp. 400.000,- hingga Rp.1.500.000 untuk sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan pestisida, upah buruh tani hingga ongkos sewa atau kontrak lahan. Beberapa petani yang diwawancara memaparkan bagaimana kesulitan mereka jika harga sayur sedang jatuh, sementara biaya sarana produksi saat ini tidak murah, justru selalu naik dari waktu ke waktu. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani, ditemukan bahwa semua istri petani yang diwawancara tidak memberi kontribusi dalam keuangan rumah tangganya, karena mereka tidak bekerja, hal ini disebabkan karena para ibu biasanya bertanggung jawab penuh pada urusan anak-anak dan rumah tangganya. Beberapa dari mereka hanya sesekali bekerja membantu suaminya di kebun ketika masa panen tiba, mereka biasanya membantu memetik dan mengikat sayuran yang dipanen. Beberapa petani melakukan hal ini agar tidak mengeluarkan biaya lagi untuk mengupah orang lain memetik hasil taninya. Untuk menambah penghasilannya, beberapa petani terkadang bekerja juga untuk membantu mencangkul atau menyiram di kebun orang lain atau sesekali menjadi tukang ojek di sekitar desa. Terkait dengan jumlah penghasilan pokok dan penghasilan tambahannya berikut ini salah satu kutipan hasil wawancara dengan beberapa orang petani:

“Tergantung bagus apa nggak harga sayurnya *sih* mbak, kalau misalnya nih bayam banyak yang lagi panen, trus sayurnya lagi bagus-bagus ya harganya jatuh. Rata-rata saya bisa kantongin kira-kira Rp.1.100.000,- lah per bulannya. Kalau pas harga bagus ya bisa lebih. Tapi kalau enggak, ya bisa nombok juga, mbak. Soalnya kan harga pupuk sekarang udah mahal, apa-apa juga mahal, ya kalau harga sayurnya jatuh kita jadi rugi, mbak” (Bpk. PEP, 12 Mei 2012)

“Bersihnya *sih* cuma sekitar Rp.400.000,-/bulan. Tambahannya kalau saya suka nguli (jadi kuli) bantu nyangkul sama nyiram di kebun orang. Kalau jadi kuli saya dibayar Rp.25.000,-seharinya. Tapi ya ga tentu mbak, kalau dipanggil

aja. Istri saya nggak ada penghasilannya, cuma bantu-bantu saya sesekali di kebun.” (Bpk. RA, 12 Mei 2012)

“Ada kali sekitar Rp.500.000 ya. Ya lebih kurang segitu dah. Paling paling ada tambahan kalo saya sekali kali kerja nguli di kebon orang. Biasanya saya nyangkut atau nyiram dibayar Rp30.000 seharusnya” (Bpk. SA, 13 Mei 2012)

“Nggak tentu *sih* ya mbak, kalau harga sedang bagus ya paling kira kira Rp. 400.000,- – Rp.500.000,-/bulan.” (Bpk. UM, 15 Mei 2012)

Sementara itu, beberapa petani dengan lahan yang cukup luas atau tuan tanah di desa ini memiliki penghasilan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan para petani yang memiliki atau menggarap lahan dengan luas terbatas. Petani-petani yang memiliki lahan cukup luas di desa Ciaruteun Ilir biasanya adalah mereka-mereka yang memiliki kedudukan di desa (elit desa). Berikut salah satu kutipan hasil wawancara dengan seorang petani yang juga salah seorang ketua RT di desa Ciaruteun Ilir:

“Kalau penghasilan kotor saya sebulan ada sekitar Rp.3.000.000,- dari hasil tani non organik, trus kalo yang organik bisa dapat kira-kira Rp.4.000.000,-. Jadi totalnya kira-kira Rp.7.000.000,- lah. Itu masih kotor ya. Belum dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluaran saya sebulan bisa kira-kira Rp.1.300.000,- , jadi bersihnya yang saya dapat ya bisa kira-kira Rp.5.700.000,- lah” (Bpk. DA, 2 February 2012)

“Bersihnya yang saya dapat ya bisa kira-kira Rp.5.500.000,- sampai Rp.6.000.000,- lah” (Bpk. UC, 2 February 2012)

4.1.3. Keterbatasan Akses Pada Tanah (Luas dan Status Kepemilikan lahan Pertanian)

Tidak semua petani di desa Ciaruteun Ilir memiliki lahan sendiri. Dari hasil wawancara dengan 22 petani informan, hanya 6 orang petani yang menggarap lahan milik sendiri, sisanya hanya menggarap lahan sewaan, kontrakan, gadaian atau hanya menjadi buruh tani. Yang memiliki lahan cukup luas adalah beberapa ketua RT dan ketua RW di desa. Beberapa petani menggarap lahan tani milik saudara atau orangtuanya sendiri, namun meskipun masih memiliki hubungan saudara dengan si pemilik tanah, mereka tetap harus

membayar sewa lahan yang digarap. Berikut ini kutipan wawancara dengan beberapa petani penggarap dan seorang petani yang juga ketua RW di desa Ciaruteun Ilir:

“30 garit atau sekitar 300m². Ini lahan punya kakak saya. Ya bisa dibilang sewa jugalah. Cuma yang saya setor tiap bulan nggak tentu, tergantung gimana pendapatan saya. Kalau pas harga jelek juga, kakak saya pengertianlah.” (Bpk. RA, 12 Mei 2012)

“Luas lahan yang saya kerjakan ini 1 petak (lebih kurang 200m²). Tanah gadaian ini, mbak. Jadi sewaktu waktu bisa diambil yang punya nanti kalau dia sudah punya uang.” (Bpk. HU, 12 Mei 2012)

“Lahan ini semuanya lebih kurang 1000m², ada kali, mbak. Ini lahannya sebagian sudah milik saya, tapi sebagian lagi di sebelah sana saya sewa Rp. 250.000,-/ bulan, biasanya saya bayar setelah panen, mbak.” (Bpk.UD, 13 Mei 2012)

“ Luas semuanya ini kira-kira 600m. Ini lahannya saya sewa milik orang tua.” (Bpk. PEP, 12 Mei 2012)

“Ini kebun gadaian orang, mbak. Nanti sewaktu-waktu bisa diambil lagi sama yang punya. Luasnya kira-kira 500m².” (Bpk. PE, 11 Mei 2012)

“Ini lahan milik saya sendiri. Sebagian ini tanah warisan dari orang tua, sebagian lagi saya beli sendiri. Luas lahannya berapa ya, kalau yang organik kira-kira 4000m², kalau yang organik kira-kira 1 ha.” (Bpk. UC, ketua RW desa Ciaruteun Ilir, 2 February 2012)

Lahan sewaan biasanya sistem pembayarannya setelah petani menerima hasil panen, sementara lahan kontrakan dibayar kontraknya per tahun, dan lahan gadaian bisa sewaktu-waktu ditarik kembali oleh si pemilik. Sebagian besar petani yang diwawancara mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membeli lahan sendiri, para petani yang memiliki lahan sendiri pun mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki sekarang ini adalah lahan warisan dari orang tua, jadi bukanlah lahan yang mereka beli sendiri. Karena ketidakmampuan membeli atau bahkan menyewa lahanlah, maka banyak dari masyarakat desa Ciaruteun ilir yang hanya jadi buruh tani. Namun menurut informasi dari bapak kepala Desa, belum ada data resmi berapa jumlah pasti buruh tani dan jumlah petani penggarap yang

ada di Ciaruteun Ilir sekarang. Untuk luas lahan garapan, terlihat jelas dari hasil temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa lahan yang digarap petani di desa Ciaruteun sangat kecil. Rata-rata lahan yang mereka garap tidak sampai 1000m² atau hanya dibawah 0,1 Ha. Seperti dikemukakan bapak kepala desa, bahwa rata-rata lahan petani di desa Ciaruteun hanya sekitar satu atau dua petak saja (1 petak=200m²). Yang memiliki lahan luas pun hanya sedikit, hanya elit desa atau orang-orang yang punya jabatan di desa, seperti ketua RW atau RT. Berikut kutipan dari hasil wawancara dengan bapak kepala desa Ciaruteun Ilir:

“...Ya bangsa-bangsa 1 petak atau 2 petak ada kali kalau lahan petani di sini, 1 petak itu sama dengan 20 garit (1 garit =20mx1m). Kalau yang punya lahan luas *mah*, itu Pak RW Ucu, Pak RT Dayat sama Pak RT endang. Mereka itu yang ikut gapoktan (gabungan kelompok tani) disini. Mereka kan petani organik di sini, mbak. Di sini petaninya nggak semua punya lahan sendiri. Banyak juga yang garap punya saudaranya gitu. Sebagian nyewa, biasanya dibayar setelah panen gitu, mbak. Sebagian lagi kontrak lahan, ini bayarnya biasanya per tahun. Ada juga tanah gadaian, mbak. Sekali-kali bisa ditarik kembali gitu tanahnya sama yang punya. Tapi di sini sebenarnya banyak yang cuma jadi kuli (buruh tani). Tapi jumlah pastinya berapa, kita belum data lagi, mbak.” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 February 2012)

4.1.4. Keterbatasan Akses Terhadap Perumahan Sehat dan Sanitasi

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar rumah di Ciaruteun Ilir adalah rumah semi permanen, rumah-rumah ini umumnya dihuni keluarga petani. Namun beberapa rumah masih menggunakan anyaman bambu dan papan, rumah-rumah yang tidak permanen umumnya adalah rumah para buruh tani di dusun ini. Rumah-rumah di desa ini umumnya kecil hanya memiliki satu atau dua kamar tidur. Satu rumah kerap dihuni oleh dua atau tiga generasi keluarga, karena banyak keluarga muda yang belum memiliki rumah masih tinggal di rumah orangtuanya, sehingga banyak rumah yang terlihat sempit dan sesak. Sebagian besar rumah penduduk memang sudah memiliki kamar mandi dengan sumur gali atau sumur pompa sebagai sumber air bersih, namun masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar

kesehatan karena tidak memiliki ventilasi udara yang cukup sehingga udara dalam rumah menjadi lembab, dan masih banyak yang tidak memiliki jamban. Kebiasaan buang air besar di sembarang tempat seperti di kali atau di kebun, atau menumpang di jamban milik tetangga masih merupakan sesuatu yang lazim. Terkait dengan hal ini, berikut hasil kutipan wawancara dengan kepala Desa Ciaruteun Ilir:

“Di Ciaruteun Ilir, rumah-rumah udah banyakan yang semi permanen ya, tapi biasanya juga nggak terlalu besar, apalagi di sini banyak yang tinggal masih satu rumah sama orang tuanya walaupun sudah berkeluarga. Jadi dalam satu rumah suka ada beberapa keluarga, gitu. MCK umum ada satu dibangun sama pemerintah, tapi adanya nggak di dusun sini, di Tegal Salam, dusun sebelah. Gratis, nggak dipungut bayaran sih. Tapi orang-orang dari sini kejauhan kalau mesti ke sana. Rata-rata keluarga di sini sudah punya kamar mandi semua, tapi yang punya WC nggak semua, mbak. Masih banyak yang ke kali kalau mau buang air besar, atau ya paling numpang di rumah tetangga. Listrik semua rumah rata-rata sudah ada.” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 februari 2012)

4.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir

4.2.1. Dampak Pola-pola Organisasi Institusional

4.2.1.1. Ketergantungan Masyarakat Miskin Terhadap Pihak Kelas Sosial Ekonomi di Atasnya

Para buruh di Ciaruteun Ilir dibayar dengan upah yang kecil meski harus mengerjakan pekerjaan yang tidak ringan. Mereka mau tidak mau menerimanya, karena tidak memiliki pilihan lain. Buruh tani wanita biasanya menerima upah lebih rendah dari pada laki-laki karena jam kerja yang lebih sedikit, namun mereka juga harus mengerjakan pekerjaan yang tidak sedikit. Terkait dengan hal ini, berikut hasil wawancara dengan para buruh tani:

“Ya semua (dikerjakan), mbak. Nyangkul, nyiram, kasih obat (pestisida), nyabut rumput sama nanam bibit. Kalau kayak sekarang lagi panen gini, saya metik sama ngiket daun kacang. Ini semua satu petak saya yang kerjain berdua sama mas Utek teman saya kerja disini. Kalau nggak kelar hari ini, ya dilanjut

besok. Kalau misalnya suka hujan kayak tadi pagi gitu, saya suka nunggu dulu sampai agak reda, baru kerja. Tapi ya biar hujan juga kita tetap kerja, mbak. Kalau nggak, kan kita nggak dibayar, nggak bisa makan. Seharinya saya dapat Rp.20.000, trus siangnya dikasih makan siang sama rokok sama Pak Ucu (majikan). Nggak ada kalau kerja tambahan, *mah*. Saya kerja cuma disini aja, mbak. Disini juga saya kan datang dari pagi jam 06.00, terus kerja sampai jam 05.00 sore.” (Bpk. TA, 15 Mei 2012).

“Saya dapat upah rata rata Rp.12.000,- seharinya, itu nggak dapat makan siang lagi. Itu saya mesti ikat 2000 ikatan kemangi. Kalo saya nggak bisa ngikat sebanyak itu, ya upahnya nggak sampai Rp.12.000,-, neng. Ini juga kan saya kerja ngiket kemangi nggak setiap hari, kalau udah habis panen ya udah, selesai gitu. Terus, ya nunggu lagi dipanggil sama petani lain. Jadi saya kerjanya nggak setiap hari. Makanya pendapatannya juga nggak setiap hari, neng.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

Beberapa informan yang pernah kesulitan keuangan namun tidak berani berhutang kepada rentenir atau jasa kredit lainnya lebih memilih untuk berhutang sembako atau pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya ke warung langganannya di desa. Hal ini mereka lakukan karena berhutang sembako atau kebutuhan pertanian di warung dirasakan lebih aman, karena ada warung yang memberi kredit tapi tidak memberatkan karena tanpa bunga. Berikut ini salah satu kutipan wawancara dengan salah satu petani:

“Saya nggak pernah pinjam, mbak. Nggak berani. Paling kalau lagi nggak punya uang, saya ngutang pupuk ke warung langganan saya, mbak. Kalau ke langganan saya dekat sini *mah*, orangnya baik mbak, harganya nggak dinaikin kalau saya *ngebon* (ngutang), kalau di warung lain *mah* suka dinaikin kalau *ngebon* mbak. Disini *mah*, saya dikasih harga pupuk Rp.4000 sekarungnya sama kalau bayar kontan. Jadinya saya belinya disitu terus. Saya bayarnya kalau udah panen. Ya lumayan membantulah buat saya.” (Bpk.UM, 15 Mei 2012)

“Nggak pernah pinjam kalo dari bank keliling *mah*. Paling-paling kalau mendesak banget, paling suka ngutang sembako dulu di warung.” (Bpk. ABM, 13 Mei 2012)

“Nggak pernah pinjam dari bank keliling, mbak. Paling kalau nggak ada uang, saya utang beli sembako di warung.” (UT, 15 Mei 2012)

Selain mengandalkan warung untuk berhutang sembako atau pupuk, masih ada juga petani di Ciaruteun Ilir yang masih memanfaatkan jasa pinjaman rentenir atau bank keliling di desanya hingga saat ini, meski dengan bunga dan cicilan yang tidak ringan. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu petani:

“Koperasi *sih* nggak pernah mbak, nggak ada di sini. Sekarang *sih* saya masih pinjam dari bank keliling (rentenir).” (Bpk. EN, 11 Mei 2012)

4.2.1.2. Ketidakadilan Struktural dan Kekayaan Struktural

Sebagian besar petani yang diwawancara mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membeli lahan sendiri, para petani yang memiliki lahan sendiri pun mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki sekarang ini adalah lahan warisan dari orang tua, jadi bukanlah lahan yang mereka beli sendiri. Karena ketidakmampuan membeli atau bahkan menyewa lahanlah, maka banyak dari masyarakat Dusun Ciaruteun ilir yang hanya jadi buruh tani. Untuk luas lahan garapan, terlihat jelas dari hasil temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa lahan yang digarap petani di desa Ciaruteun sangat kecil. Rata-rata lahan yang mereka garap tidak sampai 1000m² atau hanya dibawah 0,1 Ha. Seperti dikemukakan bapak kepala desa, bahwa rata-rata lahan petani di desa Ciaruteun hanya sekitar satu atau dua petak saja (1 petak=200m²). Yang memiliki lahan luas pun hanya sedikit, hanya elit desa atau orang-orang yang punya jabatan di desa, seperti ketua RW atau RT. Dalam hal ini terlihat jelas dominasi lahan yang dimiliki oleh elit desa yang bisa memiliki lahan hingga 1 ha, sementara para petani hanya memiliki lahan kira-kira 200 m² hingga 0,1 ha. Terkait hal ini berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Ciaruteun Ilir dan seorang petani:

“...Ya bangsa-bangsa 1 petak atau 2 petak ada kali kalau lahan petani di sini, 1 petak itu sama dengan 20 garit (1 garit =20mx1m). Kalau yang punya lahan luas *mah*, itu Pak RW Ucu, Pak RT Dayat sama Pak RT endang. Merek lahannya bisa mencapai 5000m² sampai 1 ha. Mereka itu yang ikut gapoktan (gabungan kelompok tani) disini. Mereka kan petani organik di sini, mbak. Di sini petaninya nggak semua punya lahan sendiri. Banyak juga yang garap

punya saudaranya gitu. Sebagian nyewa, biasanya dibayar setelah panen gitu, mbak. Sebagian lagi kontrak lahan, ini bayarnya biasanya per tahun. Ada juga tanah gadaian, mbak. Sekali-kali bisa ditarik kembali gitu tanahnya sama yang punya. Tapi di sini sebenarnya banyak yang cuma jadi kuli (buruh tani).” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 Februari 2012)

“30 garit atau sekitar 300m². Ini lahan punya kakak saya. Ya bisa dibilang sewa jugalah. Cuma yang saya setor tiap bulan nggak tentu, tergantung gimana pendapatan saya. Kalau pas harga jelek juga, kakak saya pengertianlah.” (Bpk. RA, 12 Mei 2012)

Hasil wawancara di lapangan dengan beberapa buruh tani dan petani di desa Ciaruteun Ilir menunjukkan sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah, beberapa dari mereka justru ada yang tidak mengetahui sama sekali bantuan apa yang pernah dibagikan di desanya. Salah satu petani mengaku sering diajak rapat jika ada rencana pemberian bantuan. Namun pada saat pelaksanaan pemberian bantuan, mereka justru tidak dilibatkan. Beberapa buruh tani pun mengaku bahwa mereka tidak pernah didata sewaktu akan ada pemberian bantuan, padahal mereka sering dengar ada bantuan di desa, namun biasanya hanya keluarga atau orang-orang terdekat dari ketua RT dan ketua RW saja yang biasanya mendapat bantuan. Salah satu buruh tani yang diwawancara mengaku pernah mendapat Raskin, dengan menebus beras sebesar Rp. 20.000,- untuk 20 liter pada ketua RT. Berikut ini kutipan wawancara dengan dua informan buruh tani:

“Pernah dengar PNPM, tapi kita *sih* nggak pernah ikutan mbak, biasanya paling paling ketua RT hanya mementingkan keluarga-keluarga dekatnya aja. Kita *mah* nggak pernah diajak.” (Ibu AR, 14 Mei 2012)

“Nggak pernah dapat bantuan. Nggak pernah dikabarin kita, mbak. Kalau misalnya nih ya, ada rapat gitu, kita *mah* selalu diajak, mbak. Tapi disana ya kita diam aja, yang ngomong *mah* cuma orang-orang pintar mbak. Kayak ketua RT apa RW, gitu. Habis rapat nih ya, kalau ntar ada bantuan mah, tahu-tahu ya udah ada aja, kita *mah* nggak pernah diajak, mbak.” (Bpk. AD, 13 Mei 2012)

Pada tahun 2009, ada indikasi kecurangan pada proses pelaksanaan pemberian bantuan BLT di desa Ciaruteun Ilir. Beberapa informan yang

diwawancara pun mengaku tidak mengetahui berita mengenai rencana pemberian bantuan, menurut mereka banyak masyarakat yang berunjuk rasa ke kantor kepala desa, mereka memprotes pendataan dan distribusi BLT yang tidak transparan. Mereka menuntut hak karena mereka merasa pantas untuk mendapatkan BLT, namun justru banyak keluarga lain yang lebih mampu yang menerimanya. Terkait dengan hal ini, berikut salah satu kutipan hasil wawancara dengan kepala desa Ciaruteun Ilir dan salah dua orang petani:

“Kalau bantuan untuk masyarakat umum *sih*, paling ada bantuan BLT tahun 2008 sama tahun 2009. Ada sekitar 800an orang yang terima, mbak. Ya begitu mbak. Dulu sempat ada demo juga di kantor desa ini. Masyarakat banyak yang datang ke sini marah-marah karena nggak dapat BLT. Padahal jatah juga kan nggak banyak, cuma sekitar 800an, tapi kalau penduduk miskin di sini ternyata lebih dari 800 orang kan, susah juga mau dibikin gimana.” (Kepala desa Ciaruteun Ilir, 1 Februari 2012)

“Nggak pernah dapat bantuan. Nggak pernah dikabarin kita, mbak. Kalau misalnya nih ya, ada rapat gitu, kita *mah* selalu diajak, mbak. Tapi disana ya kita diam aja, yang ngomong *mah* cuma orang-orang pintar mbak. Kayak ketua RT apa RW, gitu. Habis rapat nih ya, kalau ntar ada bantuan mah, tahu-tahu ya udah ada aja, kita *mah* nggak pernah diajak, mbak.” (Bpk. AD, 13 Mei 2012)

“Nggak pernah, mbak. Kalaupun ada bantuan, kita *mah* orang-orang kecil begini nggak pernah dianggap, mbak. Nggak pernah diajak. Paling-paling juga yang diajak yang pintar-pintar. Yang tahu *mah* biasanya cuma Ketua RT sama ketua RW aja, ya mereka kan cuma mentingin keluarganya aja, mbak. Kita *mah* nggak pernah dikasih tau apa diajak.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

4.2.1.3 Sempitnya Peluang Masyarakat Miskin Untuk Memiliki dan Menguasai Aset Produksi Terutama Lahan dan Modal

Ketika hasil panen jelek atau tidak berhasil karena cuaca yang buruk, maka para petani seringkali harus mengalami kerugian karena hasil taninya harus dijual dengan harga murah, atau justru tidak bisa dijual sama sekali. Sebaliknya, ketika hasil panen sedang bagus, namun banyak petani di desa yang sedang memanen jenis sayur yang sama dalam waktu yang bersamaan, maka harga sayur

di pasaran biasanya akan murah. Dalam kondisi demikian, petani seringkali harus mengalami kerugian karena harga jual hasil panennya tidak seimbang atau tidak bisa menutupi biaya produksi taninya. Yang terjadi kemudian, petani akan kekurangan modal untuk memulai menanam/ produksi tani selanjutnya.

Sebagian besar petani dan buruh tani di Ciaruteun Ilir yang diwawancara mengatakan bahwa mereka sudah pernah mencoba meminjam uang dari rentenir (yang sering mereka sebut dengan bank keliling). Hal ini mereka lakukan sebagai salah satu strategi untuk bertahan ketika mereka mulai kekurangan modal untuk sarana produksi pertanian. Rentenir menjadi salah pilihan untuk para petani meminjam modal, karena mereka kesulitan akses untuk memperoleh modal, disebabkan selain tidak terdapat koperasi di desa ini, mereka pun kesulitan akses kepada lembaga keuangan mikro yang resmi. Namun, banyak dari mereka yang kemudian sudah tidak mau lagi meminjam dari rentenir, karena berdasarkan pengalaman, mereka sudah merasakan bagaimana menjeratnya meminjam uang dari rentenir. Cicilan yang ditagih harian, bunga yang tinggi, dan denda yang dikenakan apabila terlambat membayar malah semakin semakin menyusahkan mereka, bukan justru memudahkan. Berikut salah satu kutipan dari wawancara dengan beberapa buruh tani dan petani:

“Pernah mbak, dari bank keliling (rentenir). Tapi ya gitu bayarnya berat mbak. Kalau cicilannya agak besar, ditagih mingguan, tapi kalau bisanya nyicil kecil ya ditagih harian, kalau misalnya ga bisa bayar hari ini nih ya , besoknya cicilannya suka di *double* mbak, didenda gitu. Kan kita makin kejeprit ya. Bikin kita makin menderita itu *mah* , mbak . Makanya saya nggak mau lagi, mbak. Nggak ada koperasi setahu saya di Ciaruteun Ilir, mbak” (Bpk. PEP, 12 Mei 2012)

“Pernahnya minjam sama bank keliling (rentenir), mbak. Orang batak itu biasanya, mbak. Tapi, saya kapok nggak kuat bayarnya. Saya nggak mau lagi, mbak. Nagihnya tiap hari, kan kita nggak diupah tiap hari, mana bisa bayar terus-terus. Udah gitu, kalau telat kan kita didenda besoknya. Jadi bayar dua kali gitu. Ada sih yang baik ya, kayak bang Gultom itu, dia mah masih pengertianlah, kalau kita misalnya nggak bisa bayar hari ini dia besoknya nggak denda kita gitu. Tapi sekarang *mah* saya nggak mau lagi, mbak. Jadinya

upahnya kita habis buat bayar itu-itu aja. Nggak kuat, mbak. Kalo koperasi di Ciaruteun Ilir nggak tahu saya apa ada, mbak.” (Bpk. AD, 13 Mei 2012)

“Dulu saya pernah pinjam dari bank keliling mbak, tapi saya ga pernah mau lagi. Bunga sama cicilannya berat buat kita, mbak. Nagihnya setiap hari ya kita ga kuat, uang dari mana, mbak. Kan kita dapat uangnya baru setelah panen, mbak. Jadi saya ga pernah minjam minjam apa ngutang mbak, ya pake uang yang ada ajalah. Koperasi di sini nggak ada, mbak.” (Bpk. UD, 13 Mei 2012)

Satu orang petani yang diwawancarai mengaku pernah mencoba meminjam dari bank, tetapi pinjaman dari bank pun tidak cukup membantu, karena bunga yang ternyata cukup tinggi untuk petani. Kalaupun ada, semacam pinjaman modal dari salah satu kampus di sekitar Bogor sering ditawarkan ke rumah-rumah di Ciaruteun Ilir, namun pinjaman ini memiliki bunga yang cukup tinggi bagi para petani dan buruh tani di Ciaruteun Ilir (sekitar 30%). Salah seorang buruh tani yang diwawancarai mengatakan saat ini sedang meminjam Rp.1.000.000,- dari jasa kredit dari kampus IPB, pinjaman ini harus dilunasi dalam tempo setahun dengan cicilan Rp.30.000,- setiap minggunya. Jumlah ini cukup besar bagi buruh tani yang pendapatannya paling banyak hanya sekitar Rp.35.000 per hari. Terkait dengan hal ini, berikut kutipan hasil wawancara dengan beberapa orang buruh tani dan petani:

“Dulu saya pernah sekali pinjam dari bank, tapi ternyata bunganya tinggi. Saya nggak mau lagi.” (Bpk. GA, 11 Mei 2012)

“Saya dapat pinjaman kredit dari kampus IPB. Pinjamannya 1 juta, dicicilnya selama setahun setiap bulan, bunganya kira kira berapa itu, kita bayarnya Rp.30.000,- setiap minggu, atau Rp.120.000,- tiap bulannya. Kalau dari bank/koperasi *sih* nggak ada.” (Ibu AT, 14 Mei 2012)

Sebagian petani yang diwawancara mengaku pernah mendengar keberadaan pinjaman modal dari PNPM, namun menurut mereka, informasi yang jelas dan resmi mengenai bantuan ini tidak pernah mereka dapatkan. Mereka tidak pernah didata dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan program PNPM. Beberapa petani mengaku, biasanya hanya elit desa seperti ketua RW atau RT saja yang mengetahui dan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang

berhak mendapatkan bantuan. Terkait dengan hal ini, berikut salah satu kutipan hasil wawancara dengan salah satu informan:

“Saya pernah dengar yang namanya PNPM mbak, kayak bantuan pinjaman uang gitu, tapi saya nggak pernah ikut, nggak tahu juga saya caranya, mbak. Nggak pernah dikasih tau. Biasanya kan yang tahu itu ketua RW, RT, sama orang-orang yang dekat sama mereka gitu.” (HU, 12 Mei 2012)

“Saya nggak pernah dapat bantuan apa-apa, mbak. Saya dengar sih ada BLT trus PNPM, tapi saya nggak pernah didata, nggak pernah dapat.” (UT, 15 Mei 2012)

“Saya dengar ada PNPM kasih bantuan modal gitu. Tapi saya nggak ikutan, mbak.” (EN, 11 Mei 2012)

“Kalau PNPM saya pernah dengar mbak, tapi saya nggak pernah diajak.” (UM, 15 Mei 2012)

Keterbatasan lahan dan modal para petani di Ciaruteun Ilir menyebabkan keterbatasan mereka untuk melakukan inovasi pertanian, seperti menanam tanaman organik. Padahal keuntungan yang didapat dari tanaman organik sebenarnya cukup menjanjikan dibandingkan yang non organik, dikarenakan harga organik biasanya stabil dan lebih tinggi daripada tanaman non organik. terkait hal ini, berikut beberapa hasil wawancara dengan beberapa petani:

“Saya nanam non organik. Kalau organik saya nggak kuat, mbak. Nanam organik kan modal harus kuat, karena perlu banyak pupuk.” (Bpk. EN, 11 Mei 2012)

“Saya nggak pernah coba nanam organik, mbak. Karena lahan yang saya kerjakan cuma segini, kecil.” (Bpk. HU, 12 Mei 2012)

“Non organik ini, mbak. Jenis sayurannya kangkung, bayam, chasim, kucai. Kalau organik mah mahal, nggak kuat modalnya, mbak. Ini juga lahannya cuma sedikit.” (Bpk. RA, 12 Mei 2012)

“Saya tanam bayam, kangkung sama daun kemangi. Non organik sekarang saya tanam, mbak. Jenis sayurannya kangkung, bayam, chasim, kucai. Dulu saya pernah tanam sayuran organik selama setahun. Untuk nanam organik perlu modal kuat bisa sampai tiga kali lipat modal untuk non organik, kali mbak. Kan butuh banyak pupuk kandang kalau tanaman organik. Akhirnya saya putusin kembali ke non organik.” (Bpk. SA, 13 Mei 2012)

4.2.1.4. Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut informasi dari salah seorang informan, pemerintah pernah memberi bantuan RPH (Rumah Pengumpul Hasil) untuk tempat penyimpanan sementara hasil tani organik, kemudian ada motor roda tiga (pengangkut barang), dan mesin pencacah untuk membuat pupuk organik. Semua bantuan ini seyogyanya diserahkan untuk dimanfaatkan petani organik di desa Ciaruteun Ilir, bantuan ini kemudian dipercayakan untuk dikelola oleh salah seorang ketua RW di desa. Namun pada pelaksanaannya semua bantuan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ketua RW dan gabungan kelompok taninya saja, tanpa melibatkan petani-petani lain yang ada di desa. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan salah satu petani dan seorang petani organik yang juga seorang ketua RT dan seorang petani di desa Ciaruteun Ilir:

“Kalau bantuan untuk pertanian dari pemerintah *sih* saya sendiri belum pernah terima, mbak. Yang saya tahu pemerintah ada kasih bantuan RPH (Rumah Pengumpul Hasil) untuk penampungan sayuran organik, trus ada juga motor *tosa*, motor roda tiga pengangkut barang itu, sama mesin pencacah untuk bikin pupuk organik. Ini semua dipegang sama Bpk RW.Ucu, dia kan bikin kelompok Mekar Tani, jadi dia yang urusin. Jadi sekarang semua itu, motor sama mesin itu ada di rumahnya, dia yang pegang itu, saya nggak tahu gimana-gimana pemakaiannya. Kalau saya *mah* nggak mau terima bantuan begitu, saya nggak berani kalau nggak bisa bertanggung jawab membagi bantuan ini buat rakyat, gitu. Nggak mau saya.” (Ketua RT Bpk.DA, 2 Februari 2012)

“Pernah saya dengar ada bantuan RPH (Rumah Penyimpanan Hasil) itu kan sekarang cuma buat diurus dan dipake sendiri sama Bapak RW. Kita nggak pernah ikut-ikutan pake.” (Bpk. TI, 13 Mei 2012)

4.2.2. Adanya Disparitas Pembangunan

4.2.2.1. Masalah Pemerataan Akses Layanan Publik dan Infrastruktur

Pemerintah pernah membangun satu irigasi di dusun Tegal Salam, salah satu dusun yang ada di desa Ciaruteun Ilir. Jarak dusun ini kira-kira hampir 1 km jaraknya dari dusun Cairuteun Ilir. Saluran irigasi ini juga sampai ke dusun Ciaruteun Ilir, namun irigasi ini sering sekali tidak berfungsi pada siang hari di

desa Ciaruteun Ilir. Menurut informasi yang didapatkan dari salah satu informan, dikatakan bahwa irigasi ini sering sekali hanya menyala di dusun Tegal Salam pada siang hari, lalu pada malam hari baru menyala di sebelah dusun Ciaruteun Ilir, sehingga para petani yang memanfaatkan irigasi pun sering kali harus menyiram tanaman hingga pukul 12.00 malam hari pada musim kemarau. Beberapa petani ada yang membuat empang untuk menampung air hujan. Mereka memanfaatkan empang ini untuk membersihkan sayur yang di panen atau menyiram tanaman. Sebagian besar petani masih memanfaatkan air sungai juga untuk pengairan. Ada dua sungai yang mengalir di desa ini, yaitu sungai Cairuteun dan sungai Ciantean. Penyiraman pun dilakukan dengan cara manual, masih dengan menggunakan ember dengan pikulan kayu. Berikut ini salah satu kutipan hasil wawancara dengan salah satu informan dan kepala desa Ciaruteun Ilir:

“...selama ini kita ngandalin empang buat nadahin air hujan, tapi kan terbatas ya, kalau kemarau suka cepat kering. Irigasi *sih* ada, tapi juga suka rusak, kalau siang nyala di Tegal Salam kampung sebelah, di sini suka nyalanya malam, jadinya kita suka nyiram malam-malam juga, bisa nyiram jam 8 malam, ada juga yang nyiram sampai jam 12 malam, kalau musim kemarau, mbak” (Bpk.EN, 11 Mei 2012)

“Dulu pemerintah pernah kasih irigasi, tapi dibangunnya nggak di sebelah sini, adanya di dusun Tegal Salam. Alirannya sampai *sih* kesini, tapi katanya suka mati. Kebanyakan petani di sini ambil langsung air dari kali. Kan desa ini dialiri dua kali, mbak. Banyak juga petani sekarang yang bikin empang buat nadahin air hujan, tapi kalau musim kemarau kan suka jadi kering ya.” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 February 2012)

Kondisi jalan umum di desa Ciaruteun Ilir saat ini rusak amat parah, berdasarkan temuan lapangan, pada saat datang hujan di desa ini, kondisi jalan umum yang becek, licin dan berbatu-batu semakin memprihatinkan. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi penduduk yang melintas dengan berjalan kaki, apalagi jika menggunakan kendaraan motor. Berdasarkan informasi dari kepala desa, dikatakan bahwa, jalan umum di desa ini sudah rusak sejak lama. Meski pernah diperbaiki kira-kira lima tahun yang lalu, namun tidak lama kemudian rusak kembali. Untuk fasilitas sanitasi dan air bersih, pemerintah pernah membangun

satu unit MCK di Dusun Tegal Salam yang jaraknya kira-kira satu kilometer dari Dusun Ciaruteun Ilir. Meski umumnya masyarakat desa ini sudah memiliki kamar mandi di rumahnya masing-masing, namun tidak semua dari mereka yang memiliki WC, karena masih lazim buat masyarakat desa ini untuk membuang air di sungai. Terkait hal ini, berikut salah satu kutipan wawancara dengan kepala desa Ciaruteun Ilir:

“Ada sih MCK umum dibangun sama pemerintah, tapi adanya nggak disini, di Tegal Salam, dusun sebelah. Gratis, nggak dipungut bayaran sih. Tapi orang-orang dari sini kejauhan kalau mesti ke sana. Rata-rata semua rumah sih udah punya kamar mandi ya. Cuma, gak semua yang punya WC. Kalau orang-orang mau buang air mah suka di kali aja. Kalau jalan umum, ya seperti yang mbak lihat, kondisinya rusak parah begitu. Dulu sudah pernah diperbaiki sama pemerintah, ada kali lima tahun yang lalu. Tapi ya begitu, belum lama udah langsung rusak lagi.” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 1 February 2012)

Tidak terdapat sekolah SMP dan SLTA di Desa Ciaruteun Ilir, hanya terdapat satu sekolah SD. Angkutan umum yang masuk ke desa juga tidak ada, berikut ini salah satu kutipan wawancara dengan kepala desa:

“...Kalau di desa ini kan adanya cuma sekolah SD, kalau sekolah SMP-SLTA itu jauh, mbak. Adanya di kecamatan Cibungbulang. Ongkos ke sananya juga udah mahal, karena mesti naek ojek, nggak ada angkutan umum di sini, mbak. Makanya kalau orang tua yang nggak mampu, terpaksa anak-anaknya putus sekolah..” (Kepala Desa Ciaruteun Ilir, 11 Mei 2012)

4.2.2.2. Ketiadaan Kebijakan yang Lebih Berpihak Pada Petani Miskin

Dalam sebulan, petani di desa ini bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp. 400.000,- hingga Rp.1.500.000 untuk sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan pestisida. Beberapa petani yang diwawancara memaparkan bagaimana kesulitan mereka jika harga sayur sedang jatuh, sementara biaya sarana produksi saat ini tidak murah, justru selalu naik dari waktu ke waktu. Terkait dengan hal ini, berikut beberapa kutipan wawancara dengan para petani dan seorang ketua RT di Ciaruteun Ilir:

“Kalau misalnya nih bayam banyak yang lagi panen, trus sayurnya lagi bagus-bagus ya harganya jatuh. Rata-rata saya bisa kantongin kira-kira Rp.1.100.000,- lah per bulannya. Kalau pas harga bagus ya bisa lebih. Tapi kalau enggak, ya bisa nombok juga, mbak. Soalnya kan harga pupuk sekarang udah mahal, apa-apa juga mahal, ya kalau harga sayurnya jatuh kita jadi rugi, mbak” (Bpk. PEP, 12 Mei 2012)

“Kesulitannya kalo lagi pas harga sayur jatuh, apalagi kalo panen sayur yang sama *nih* barengan dengan yang lain lain. Jadi, misalnya *nih* ya kalau sayuran bayam lagi bagus numbuhnya, tapi lagi banyak yang panen, ya pasti sayuran kita ditawarnya murah, harganya jatuh mbak. Kalau pas lagi musim hujan gini, bayam suka jelek hasilnya, meski di pasar sayuran lagi dikit, harga bisa mahal, tapi kan sama aja ya kalau kita cuma bisa bawa (jual) sedikit, karena kalau pas musim hujan apalagi kalo terus-terusan bayam suka busuk. Sementara harga pupuk naik terus, mbak.” (Bpk. PE, 11 Mei 2012)

“Butuh modal yang besar sekarang, karena apa apa itu harganya mahal, terutama harga pupuk. Sekarang harga pupuk bisa Rp.4000,- sekarungnya mbak, kalau mau beli 40 karung kan kita suka nggak cukup uangnya mbak. Di warung langganan saya *sih* bisa ngutang pupuk mbak, bayarnya pas panen nanti, tapi ya harganya bisa jadi Rp.6000,- sampai Rp. 7000,- sekarungnya kalau ngutang, jadi ya malah makin kejeput mbak.” (Bpk. Udi, 13 Mei 2012)



BAB 5 ANALISIS

5.1. Kondisi Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir

Menurut Soemardjan (1984), kemiskinan struktural juga meliputi kekurangan pendidikan. Anak-anak yang hendak bersekolah di Ciaruteun Ilir harus menyediakan uang sebesar Rp. 14.000,- untuk ongkos pulang pergi naik ojek, sebab tidak ada angkutan umum di desa ini. Uang sejumlah Rp.14.000,- tentu bukan jumlah yang kecil buat para petani dan buruh tani di sini. Bagaimana tidak, jika rata-rata pendapatan para petani hanya sekitar Rp.850.000,- per bulannya, maka pendapatan mereka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari saja. Terlebih lagi buruh tani yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar Rp.27.000, dengan jumlah pendapatan sekecil ini kebutuhan dasar mereka sehari-hari saja pun belum tentu terpenuhi. Selain keterbatasan penghasilan para petani dan buruh tani, ketidaktersediaan sekolah SMP dan SLTA di wilayah Ciaruteun Ilir, jarak sekolah SMP dan SLTA ada yang terlalu jauh dari wilayah pemukiman Ciaruteun Ilir, ketidaktersediaan angkutan umum, biaya transportasi yang mahal, besarnya tanggungan keluarga yang disebabkan oleh banyaknya anak juga menjadi alasan bagi masyarakat dusun ini untuk memilih tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Sebagian dari mereka justru tidak sempat lulus SD, atau bahkan sama sekali tidak bersekolah, terutama para generasi tua. Penghasilan petani dan buruh tani yang terbatas sementara mereka memiliki jumlah anak yang banyak tentu menuntut para petani untuk mendahulukan kebutuhan pangan keluarganya dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran lain. Dengan demikian, rendahnya kemampuan masyarakat petani dan buruh tani untuk mengakses pendidikan di Dusun Ciaruteun Ilir ini disebabkan rendahnya pendapatan mereka dan kurang memadainya prasarana yang mendukung masyarakat untuk memenuhi pendidikan masyarakat petani di Ciaruteun Ilir

Menurut Sumodiningrat (1999), kemiskinan relatif (struktural) adalah suatu kondisi dimana seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif rendah bila dibandingkan

dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Dari hasil temuan lapangan, ditemukan bahwa para buruh tani di Ciaruteun Ilir mendapatkan upah sekitar Rp. 5000,- hingga Rp.35.000,- per harinya atau Rp. 150.000 hingga Rp.900.000,- per bulannya. Sementara itu penghasilan para petani di Ciaruteun Ilir sekitar Rp.450.000 hingga Rp.1.500.000,-. Jika menggunakan indikator kemiskinan BPS yang menetapkan garis kemiskinan untuk daerah pedesaan sebesar Rp. 213.000,- per bulannya, maka sebagian buruh tani dan keseluruhan petani di Ciaruteun Ilir tidak berada di bawah garis kemiskinan. Namun jika dibandingkan dengan besarnya penghasilan tuan tanah di Ciaruteun Ilir yang mencapai Rp.5.500.000 per bulannya maka penghasilan para buruh tani dan petani ini relatif rendah atau dengan kata lain termasuk ke dalam kategori miskin struktural. Adanya perbedaan penghasilan inilah yang kemudian membentuk lapisan sosial di Dusun Ciaruteun Ilir, yaitu golongan pertama atau tuan tanah, golongan kedua atau petani dengan lahan terbatas, dan golongan ketiga adalah buruh tani.

Kemiskinan struktural menurut Soemardjan (1984) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan tersebut misalnya, para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil. Selain itu, yang termasuk juga golongan miskin struktural adalah para kaum buruh yang tidak terpelajar. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan para petani di Ciaruteun Ilir memiliki lahan yang luasnya sangat terbatas. Luas lahan mereka rata-rata hanya dibawah 0,1 ha. Para petani ini kehidupannya dan keluarganya sangat tergantung dari faktor iklim, karena hal ini akan sangat mempengaruhi hasil panen mereka. Demikian halnya dengan fluktuasi harga, kesempatan pekerjaan tambahan, kenaikan harga pupuk dan sarana produksi pertanian akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, karena semua hal ini sangat mempengaruhi penghasilan dan ongkos pengeluaran sarana produksi pertanian mereka. Hanya ada segelintir golongan pertama atau tuan tanah di desa ini, mereka adalah golongan yang memiliki lahan yang cukup luas, sekitar 0,5 hingga 1 ha. Dengan luas lahan yang mereka miliki ini, tentu mereka bisa mendapatkan hasil panen yang menjamin kehidupan rumah tangganya. Golongan

pertama ini umumnya adalah para tuan tanah atau elit desa yang juga memiliki kedudukan di desa. Mereka adalah ketua RW dan ketua RT di Dusun Ciaruteun Ilir. Dengan demikian para buruh tani yang tidak memiliki tanah, dan para petani yang lahannya sangat terbatas di Dusun Ciaruteun Ilir termasuk dalam kategori miskin struktural.

Untuk kondisi pemukiman, berdasarkan hasil observasi di lapangan di temukan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok pada kondisi pemukiman antara para buruh tani, petani dan para tuan tanah di Dusun Ciaruteun Ilir. Tuan tanah umumnya memiliki rumah dengan kondisi permanen, sudah dialiri listrik, memiliki kamar mandi dan WC dengan sumber air dengan pompa listrik, ukuran rumahnya relatif tidak terlalu kecil dan memiliki ventilasi yang cukup, tidak berdesakan dengan rumah yang ada di sekitarnya karena memiliki luas tanah tempat tinggal yang tidak terlalu sempit. Sementara golongan petani memiliki tempat tinggal semi permanen, rata-rata sudah dialiri listrik dan memiliki kamar mandi dengan sumber air dari pompa listrik, namun hanya sebagian yang memiliki WC, tidak memiliki ventilasi udara yang cukup, luas tanah tempat tinggalnya sempit dan berdesakan dengan rumah yang ada di sekitarnya, jumlah kamar biasanya hanya satu atau dua, mereka umumnya tinggal di rumah orang tuanya. Buruh tani umumnya tidak memiliki tanah, sehingga rumah tersebut dibangun di atas tanah orang lain atau tanah milik orang tuanya, rumah tempat tinggalnya relatif kecil dan tidak permanen, memiliki kamar mandi dengan kondisi yang tidak memadai, sumber air dari sumur galian, tidak memiliki WC, tidak memiliki ventilasi udara yang cukup, mereka biasanya tinggal berdesakan dalam satu rumah yang kecil, karena satu rumah bisa dihuni oleh beberapa kepala keluarga dalam satu keluarga besar. Menurut Soemardjan (1984), kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan pendidikan, tetapi juga kekurangan pemukiman yang sehat, dengan demikian para buruh tani dan petani di Ciaruteun Ilir yang umumnya menghuni rumah dengan kondisi yang kurang sehat seperti dipaparkan di atas, masuk ke dalam kategori miskin struktural.

5.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Petani di Dusun Ciaruteun Ilir

5.2.1. Dampak Pola-pola Organisasi Institusional

Berbicara mengenai kemiskinan struktural di pedesaan tidak terlepas dari struktur sosial yang ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Soedjatmoko bahwa kemiskinan itu memiliki konteks struktural, dan struktur-struktur sosial (dalam hal ini pola hierarki atau stratifikasi sosial) untuk sebagian besar mempengaruhi kemiskinan, karena stratifikasi sosial sedikit banyak mengurangi atau merusak pola kerukunan atau ikatan timbal balik tradisional dan memberi dampak pada pola-pola organisasi institusional yang ada (Soemardjan et. al., 1984, h.56).

Stratifikasi sosial, atau pelapisan sosial, atau apa yang disebut Piritim Sorokin (1928) sebagai struktur sosial vertikal, menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis, berjenjang. Sehingga dalam dimensi struktur ini kita melihat adanya kelompok masyarakat yang berkedudukan tinggi (lapisan atas), sedang (lapisan menengah), dan rendah (lapisan bawah). Kebanyakan desa pertanian memiliki tiga lapisan (Soedjatmoko, 1984) yang meliputi golongan pertama yaitu golongan yang memiliki tanah yang cukup besar untuk menjamin kehidupan yang cukup bagi keluarganya. Golongan kedua terdiri dari petani-petani yang memiliki atau menguasai tanah yang luas atau kualitasnya marginal, sehingga kehidupannya dan keluarganya sangat tergantung, selain dari kesempatan kerja, juga dari iklim dan faktor harga. Golongan ketiga, adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai tanah.

Dengan mengacu pada penggolongan di atas, dari penelitian di desa Ciaruteun ilir ditemukan bahwa sebagian besar petani yang ada di desa Ciaruteun Ilir merupakan petani golongan ketiga dan golongan kedua, hanya beberapa dari mereka yang merupakan petani golongan pertama. Golongan ketiga adalah para buruh tani, dan para petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki tanah. Golongan kedua adalah para petani yang memiliki lahan yang luasnya sangat terbatas. Luas lahan mereka sangat terbatas, rata-rata hanya dibawah 0,1 ha. Hanya ada segelintir golongan pertama atau tuan tanah di desa ini, mereka adalah golongan yang memiliki lahan yang cukup luas, dan dengan luas lahan yang mereka miliki ini, mereka bisa mendapatkan hasil panen yang menjamin

kehidupan rumah tangganya. Golongan pertama ini adalah para tuan tanah atau elit desa yang juga memiliki kedudukan di desa. Mereka adalah ketua RW dan ketua RT di desa Ciaruteun Ilir, yang memiliki lahan dengan luas lebih kurang 1 ha. Adanya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial inilah yang sebagian besar mempengaruhi kemiskinan, karena stratifikasi sosial sedikit banyak mengurangi atau merusak pola kerukunan atau ikatan timbal balik tradisional dan memberi dampak pada pola-pola organisasi institusional yang ada. Pola-pola organisasi institusional yang termaksud di sini diantaranya adalah sistem kontrak kerja antara buruh tani dan majikan, pemberian upah buruh oleh majikan, sistem sewa lahan antara tuan tanah dan petani penggarap, sistem pinjam antara petani dan rentenir, penentuan harga antara petani pengumpul (tengkulak) dengan para petani. Semua hal inilah yang kemudian memberi dampak pada ketergantungan masyarakat miskin terhadap pihak kelas ekonomi sosial yang ada di atasnya; timbulnya kekayaan struktural dan ketidakadilan struktural; sempitnya peluang masyarakat miskin untuk memiliki dan menguasai aset produksi terutama lahan dan modal; serta ketidakberdayaan masyarakat miskin, yang juga berdampak pada kemampuan masing-masing golongan untuk memanfaatkan program-program pemerintah yang ada. Semua hal inilah yang kemudian menjadi factor-faktor penyebab munculnya kemiskinan struktural.

5.2.1.1. Ketergantungan Masyarakat Miskin Terhadap Pihak Kelas Sosial Ekonomi di Atasnya

Bila perspektif tentang kemiskinan dibidikkan ke pedesaan, maka ciri khas dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat dari pihak si miskin kepada pihak kelas sosial ekonomi di atasnya. Seperti dikemukakan oleh Mas'ood, ketergantungan inilah yang berperan besar dalam memerosotkan kemampuan kaum miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang timpang antara majikan dan buruh, begitu juga antara petani penggarap dan pemilik lahan. Buruh tidak mempunyai kemampuan untuk menetapkan upah, petani tidak bisa menentukan harga hasil taninya sendiri, dan petani penggarap memiliki ketergantungan yang kuat terhadap pemilik lahan. Sebagai dampaknya, orang-orang miskin tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses

marjinalisasi karena tidak adanya pilihan alternatif untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik (Mas'ood, 1994).

Hasil penelitian di desa Ciaruteun Ilir terkait upah buruh tani dan sistem upahnya merupakan refleksi dari apa yang dipaparkan Mas'ood di atas. Dari temuan lapangan terlihat bahwa upah buruh tani di desa Ciaruteun Ilir sangat kecil, upah buruh tani pria berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.35.000,-/hari. Sementara itu, upah buruh wanita lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan para buruh tani pria. Buruh tani wanita yang bekerja musiman biasanya hanya mendapat upah antara Rp.12.000,- hingga Rp.17.000,- saja, beberapa buruh tani wanita bahkan ada yang hanya mendapatkan upah Rp.5000 jika hanya bekerja di rumah. Dari gambaran ini terlihat betapa buruh tani di desa Ciaruteun Ilir hanya mendapatkan upah yang kecil, tidak seimbang jika dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan. Buruh tani laki-laki misalnya harus mengerjakan pekerjaan fisik yang berat seperti mencangkul, menyiram dan menghabiskan sepanjang harinya di kebun, sementara buruh tani wanita, meski biasanya hanya bekerja paruh waktu namun beban yang mereka kerjakan juga cukup berat. Untuk mendapatkan upah Rp.12.000,-, seorang ibu harus mengikat sekitar 2000-an ikat kemangi, jika tidak maka upahnya bisa dipotong majikan.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan beberapa buruh tani wanita dikatakan bahwa buruh wanita di desa ini sebagian besar adalah buruh musiman, mereka bekerja berpindah-pindah, karena biasanya hanya dipanggil bekerja ketika musim panen. Karena itu, pendapatan mereka juga tidak pasti dan tidak selalu ada setiap hari, karena panggilan untuk bekerja tidak selalu ada. Tiga orang dari empat orang buruh wanita yang diwawancarai adalah buruh wanita musiman yang bekerja berpindah-pindah sesuai dengan panggilan petani lain di musim panen.

Selain itu, sebagian besar buruh tani pria yang diwawancarai juga mengaku mempunyai istri yang juga bekerja sebagai buruh tani musiman, berdagang kecil-kecilan di rumah atau sama sekali tidak bekerja. Disebabkan pekerjaan istri para buruh tani yang bekerja sifatnya tidak menetap, maka jumlah pendapatan total para buruh tani jika digabung dengan pendapatan istrinya juga tidak menentu, karena para buruh wanita musiman hanya akan bekerja tergantung

panggilan/ kebutuhan musim panen. Begitu juga dengan buruh tani wanita yang diwawancarai, sebagian besar dari mereka mengaku bahwa suami mereka juga memiliki penghasilan yang tidak tetap karena bekerja sebagai buruh tani musiman atau tukang ojek. Rata-rata total pendapatan harian buruh tani bila digabung dengan pendapatan istri/ suaminya adalah sekitar Rp.22.000,- hingga Rp.45.000,-.

Dari gambaran di atas terlihat bagaimana pola hubungan sosial antar kaum miskin dengan kelas sosial yang ada di atasnya, dalam hal ini antara buruh dan majikan di desa Ciaruteun Ilir. Tergambar jelas bahwa bentuk kerjasama yang ada di antara mereka telah melanggengkan ketergantungan yang kuat bagi kaum buruh terhadap majikan, sehingga kaum buruh tidak punya posisi tawar/ bargaining position dalam hubungannya dengan majikannya, mereka tidak mampu menentukan upahnya sendiri. Meski kaum buruh ini mendapat upah yang kecil tapi harus mengerjakan pekerjaan yang berat dalam waktu kerja yang lama, mereka tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang mereka alami, karena mereka tidak punya pilihan alternatif lain untuk menyambung hidup. Hal ini disebabkan sempitnya lapangan pekerjaan pertanian yang ada di desa serta rendahnya daya saing kaum buruh untuk mencari pekerjaan non pertanian akibat rendahnya kualitas mereka sebagai SDM mengingat mereka rata-rata tidak memiliki keterampilan, berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf. Mengacu pada apa yang di katakan Mas'ood (1994), bahwa timbulnya ketergantungan yang kuat antara pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi yang ada di atasnya - dalam hal ini buruh dan majikannya - inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir.

Beberapa petani di Dusun Ciaruteun Ilir masih memanfaatkan jasa pinjaman dari rentenir untuk kebutuhan modal ataupun untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara beberapa informan yang pernah kesulitan keuangan namun tidak berani berhutang kepada rentenir atau jasa kredit lainnya lebih memilih untuk berhutang sembako atau pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya ke warung langganannya di desa. Hal ini mereka lakukan karena berhutang sembako atau kebutuhan pertanian di warung dirasakan lebih aman, sebab ada warung yang memberi kredit tapi tidak memberatkan karena tanpa

bunga. Namun, jika terus-menerus mengandalkan warung untuk berhutang sembako dan kebutuhan pertanian justru membuat ketergantungan bagi para petani dan buruh tani, yang pada akhirnya akan membuat mereka terperangkap dalam hutang yang tak ada habisnya. Begitu pun halnya dengan jeratan rentenir yang biasanya menetapkan bunga tinggi dengan jumlah dan sistem cicilan yang tidak meringankan para petani. Tentu akan memberatkan petani dan buruh tani jika harus terus-menerus membayar hutang pupuk atau sembako ke warung di sekitar tempat tinggalnya atau rentenir yang meminjamkan mereka uang, dikarenakan penghasilan mereka yang kecil dan terkadang tidak tetap. Kebiasaan untuk mengandalkan pinjaman ini pun memunculkan ketergantungan yang kuat antara petani miskin terhadap pemodal atau rentenir. Seperti yang disampaikan oleh Mas' oed (1994) bahwa salah satu penyebab timbulnya kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat antar pihak si miskin terhadap kelas sosial yang ada di atasnya, dalam hal ini petani miskin dan para pemberi pinjaman (rentenir) dan pemilik modal.

Hampir 70 % dari lahan di desa Ciaruteun Ilir dimanfaatkan untuk lahan pertanian (data kantor desa Ciaruteun ilir, 2010). Meskipun demikian, tidak semua petani di desa ini memiliki lahan sendiri. Dari hasil wawancara dengan 22 petani informan, hanya 6 orang petani yang menggarap lahan milik sendiri, sisanya hanya menggarap lahan sewaan, kontrakan, gadaian atau hanya menjadi buruh tani. Beberapa petani menggarap lahan tani milik saudara atau orangtuanya sendiri, namun meskipun masih memiliki hubungan saudara dengan si pemilik tanah, mereka tetap harus membayar sewa lahan yang digarap.

Sistem pembayaran lahan sewaan biasanya dilakukan setelah petani menerima hasil panen, lahan kontrakan dibayar kontraknya per tahun, sementara lahan gadaian bisa sewaktu-waktu ditarik kembali oleh si pemilik. Tiga orang petani yang diwawancarai mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membeli lahan sendiri, lahan yang mereka miliki sekarang ini adalah lahan warisan dari orang tua. Karena ketidakmampuan membeli atau bahkan menyewa lahanlah, banyak dari masyarakat desa Ciaruteun ilir yang hanya jadi buruh tani. Meski menurut informasi dari bapak kepala Desa, belum ada data resmi berapa jumlah pasti buruh tani dan jumlah petani penggarap yang ada di Ciaruteun Ilir sekarang.

Untuk luas lahan garapan, dari hasil temuan lapangan terlihat bahwa rata-rata petani yang diwawancarai hanya menggarap lahan di bawah 1000m² atau hanya dibawah 0,1 Ha.

Ketidakmampuan para petani di desa Cairuteun Ilir untuk memiliki lahan sendiri membawa implikasi timbulnya ketergantungan antara petani penggarap dengan tuan tanah, dan antara buruh tani dengan majikannya. Seperti apa yang disampaikan Mas'ood, bahwa ciri khas dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat dari pihak si miskin kepada pihak kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan inilah yang berperan besar dalam memerosotkan kemampuan kaum miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Para petani penggarap tidak punya kemampuan untuk *bargaining* terkait dengan ongkos sewa lahan yang digarapnya, karena tuntutan kebutuhannya akan lahan yang disewanya. Demikian juga halnya dengan para buruh tani tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan upahnya, karena ketergantungannya pada majikannya. Sebagai akibatnya para buruh tani tidak bisa berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marjinalisasi dari majikannya karena tidak adanya alternatif untuk menentukan nasibnya ke arah yang lebih baik. Ketergantungan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural di desa ini.

5.2.1.2. Ketidakadilan Struktural dan Kekayaan Struktural

Seperti dikemukakan bapak kepala desa, bahwa rata-rata lahan petani di desa Ciaruteun hanya sekitar satu atau dua petak saja (1 petak=200m²). Yang memiliki lahan luas pun hanya sedikit, hanya elit desa atau orang-orang yang punya jabatan di desa, seperti ketua RW atau RT.

Soemardjan mengatakan bahwa kemiskinan struktural timbul karena sebaliknya ada juga kecukupan atau kekayaan struktural, yaitu kekayaan yang dinikmati oleh golongan-golongan dalam masyarakat yang karena kedudukan dan peranannya dalam masyarakat lebih memudahkannya untuk memanfaatkan sumber sumber modal, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan di dalam masyarakat, sehingga mereka tidak mengalami kemiskinan. Demikian juga halnya dalam kasus kepemilikan lahan yang didominasi oleh elit desa di desa Ciaruteun

Iilir. Yang memiliki lahan luas adalah golongan-golongan yang memiliki kedudukan seperti ketua RT atau ketua RW, yang mana karena kedudukan dan peranannya dalam masyarakat, elit desa ini memiliki kemudahan untuk memanfaatkan sumber modal untuk memiliki lahan yang luas. Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang memunculkan kemiskinan struktural.

Bagaimana kemudian ketimpangan dan ketidakadilan struktural di desa Ciaruteun Iilir ini memberi dampak pada pola hidup masyarakat petani di desa ini, tercermin pada bagaimana para buruh tani dan petani memenuhi kebutuhan dasarnya setiap hari. Dengan jumlah pendapatan yang mereka terima, para petani rata-rata hanya mampu mengeluarkan biaya sekitar Rp.8000,- hingga 10.000,-/hari untuk per orang anggota keluarganya, sementara para buruh tani hanya mampu mengeluarkan sekitar Rp.7000,-/hari untuk per orang anggota keluarganya. Tentu angka sebesar ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan saja, itupun tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak para petani secara memadai.

5.2.1.3 Sempitnya Peluang Masyarakat Miskin Untuk Memiliki dan Menguasai Aset Produksi Terutama Lahan dan Modal

Ada beberapa penyebab yang memicu kerugian yang sering dialami petani di desa Ciaruteun Iilir. Ketika dilakukan wawancara dengan beberapa petani, mereka menuturkan bagaimana hasil tani mereka harus dijual murah ketika kondisi cuaca buruk sehingga menyebabkan hasil panen yang jelek atau bahkan tidak berhasil, atau harga jual yang murah ketika ada banyak petani yang memanen sayuran sejenis dalam waktu bersamaan. Dalam kondisi demikian, petani seringkali harus mengalami kerugian karena harga jual hasil panennya tidak seimbang dengan biaya sarana produksi taninya. Yang terjadi kemudian, petani akan kekurangan modal untuk memulai menanam/ memproduksi tani selanjutnya. Begitupun halnya juga dengan kaum buruh tani, mereka memiliki upah dengan jumlah yang sangat kecil dan tidak menentu, karena mereka umumnya hanya dipanggil ketika musim panen tiba. Kondisi keterbatasan

penghasilan ini kemudian mendesak petani dan para buruh tani untuk memikirkan cara mendapatkan modal atau untuk sekedar bertahan hidup.

Berdasarkan informasi dari para informan, tidak ada koperasi atau semacam lembaga keuangan mikro yang resmi di desa Ciaruteun Ilir. Rentenir atau yang sering disebut bank keliling adalah jasa pemberi pinjaman yang paling mudah di jumpai di desa Ciaruteun Ilir. Sebagian besar petani dan buruh tani yang diwawancara mengaku bahwa mereka sudah pernah mencoba meminjam uang dari rentenir. Hal ini dilakukan para petani sebagai salah satu strategi untuk bertahan ketika mereka mulai kekurangan modal untuk sarana produksi pertanian atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ternyata keberadaan rentenir bukannya membantu, para petani dan buruh tani akhirnya merasakan bagaimana menjeratnya meminjam uang dari rentenir. Cicilan yang ditagih harian, bunga yang tinggi, dan denda yang dikenakan apabila terlambat membayar malah semakin menyusahkannya, bukan justru memudahkan.

Selain memanfaatkan jasa rentenir, satu orang petani yang diwawancarai mengaku pernah mencoba meminjam dari bank, tetapi pinjaman dari bank pun tidak cukup membantu, karena bunga yang dikenakan ternyata cukup tinggi dirasakan petani. Menurut Suyanto(2008), sempitnya peluang masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama tanah dan modal. Seperti halnya yang tergambar pada masyarakat petani di desa Ciaruteun Ilir, yang tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebab tidak mempunyai surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal, diakibatkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.

Beberapa petani di desa ini pernah mencoba menanam sayuran organik, namun banyak yang kemudian kembali ke tanaman non organik karena sulitnya pemasaran, lahan yang terlalu sempit dan butuh modal yang lebih besar untuk menanam tanaman organik. Menurut informasi dari salah satu informan, dikatakan bahwa modal untuk menanam tanaman organik bisa mencapai tiga kali lipat jika dibanding tanaman non organik, karena diperlukan jumlah pupuk yang lebih banyak untuk menanam organik. Saat ini hanya tinggal sedikit petani desa

ini yang menanam tanaman organik. Mereka yang menanam organik adalah petani dengan lahan yang cukup luas, memiliki modal yang cukup kuat dan memiliki akses untuk memasarkan hasil tani organiknya, beberapa di antaranya adalah ketua RW dan ketua RT di desa.

Keterbatasan lahan dan kekurangan modal yang dimiliki para petani inilah yang kemudian membatasi mereka untuk maju dan tetap miskin secara struktural. Lahan mereka yang kecil dan profuktifitas mereka yang terbatas mengakibatkan mereka memiliki penghasilan yang terbatas untuk memenuhi dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti apa yang disampaikan oleh Selo Soemardjan (1984) bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

5.2.1.4. Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin

Beberapa informan yang diwawancarai mengaku pernah mendengar tentang adanya bantuan kredit dari PNPM, namun mereka sendiri tidak pernah didata atau dilibatkan. Menurut mereka, hal ini bukanlah sesuatu yang baru, karena setiap ada program bantuan-bantuan lain pun tidak disosialisasikan kepada mereka. Informasi bantuan-bantuan yang ada terkesan tertutup dan tidak transparan, sebab biasanya hanya orang-orang dekat atau keluarga elit desa saja yang mendapatkannya. Kalaupun sesekali para warga diajak rapat, setelah rapat mereka tak pernah dilibatkan.

Hal di atas merupakan wujud dari apa yang disampaikan Soetrisno (2008), bahwa salah satu penyebab kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjangkir bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi, hal ini tercermin dalam masyarakat desa Ciaruteun Ilir pada kasus dimana banyak dari mereka yang mengaku tidak pernah didata dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan program pinjaman modal dari PNPM, bahkan hanya sebagian petani

yang diwawancara mengaku pernah mendengar keberadaan pinjaman modal dari PNPM, informasi yang jelas dan resmi mengenai bantuan ini pun tidak pernah mereka dapatkan. Beberapa petani mengaku, biasanya hanya elit desa seperti ketua RW atau RT saja yang mengetahui dan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Tergambar jelas betapa para petani ini tidak berdaya, meskipun mereka seringkali ditekan atau ditipu oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan inilah yang kemudian melanggengkan kemiskinan struktural di desa Ciaruteun Ilir.

Hasil wawancara di lapangan dengan beberapa buruh tani dan petani di desa Ciaruteun Ilir menunjukkan sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah, beberapa dari mereka justru ada yang tidak mengetahui sama sekali bantuan apa yang pernah dibagikan di desanya. Salah satu petani mengaku sering diajak rapat jika ada rencana pemberian bantuan. Namun pada saat pelaksanaan pemberian bantuan, mereka justru tidak dilibatkan. Beberapa buruh tani pun mengaku bahwa mereka tidak pernah didata sewaktu akan ada pemberian bantuan, padahal mereka sering mendengar berita mengenai bantuan di desa, namun biasanya hanya keluarga atau orang-orang terdekat dari ketua RT dan ketua RW saja yang biasanya mendapat bantuan. Salah satu buruh tani yang diwawancara mengaku pernah mendapat Raskin, dengan menebus beras sebesar Rp. 20.000,- untuk 20 liter pada ketua RT.

Menurut informasi dari salah seorang informan, pemerintah pernah memberi bantuan RPH (Rumah Pengumpul Hasil) untuk tempat penyimpanan sementara hasil tani organik, kemudian ada motor roda tiga (pengangkut barang), dan mesin pencacah untuk membuat pupuk organik. Semua bantuan ini seyogyanya diserahkan untuk dimanfaatkan petani organik di desa Ciaruteun Ilir, bantuan ini kemudian dipercayakan untuk dikelola oleh salah seorang ketua RW di desa. Namun pada pelaksanaannya semua bantuan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ketua RW dan gabungan kelompok taninya saja, tanpa melibatkan petani-petani lain yang ada di desa untuk memanfaatkannya.

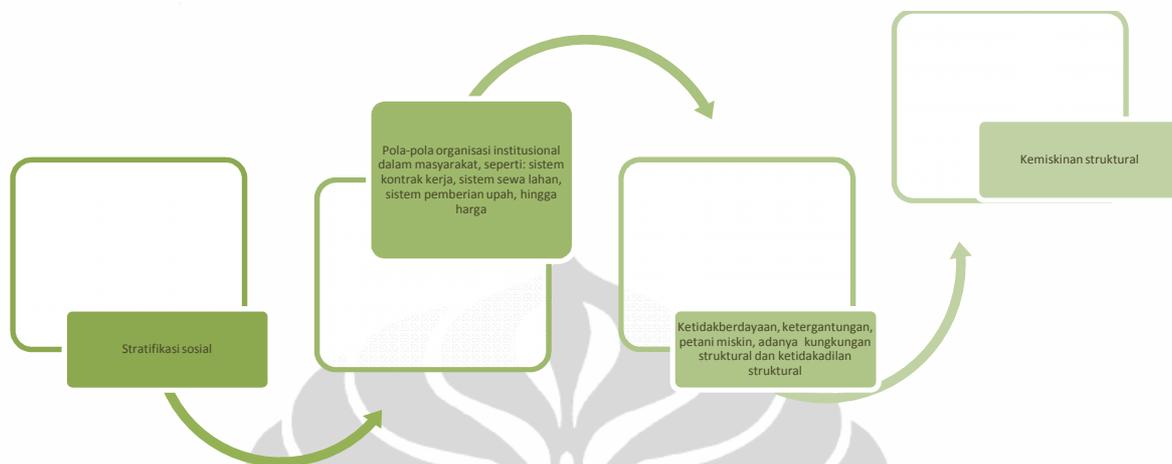
Pada tahun 2009, ada indikasi kecurangan pada proses pelaksanaan pemberian bantuan BLT di desa Ciaruteun Ilir. Beberapa informan yang diwawancara pun mengaku tidak mengetahui berita mengenai rencana pemberian

bantuan, menurut mereka banyak masyarakat yang berunjuk rasa ke kantor kepala desa, mereka memprotes pendataan dan distribusi BLT yang tidak transparan. Mereka menuntut hak karena mereka merasa pantas untuk mendapatkan BLT, namun justru banyak keluarga lain yang lebih mampu yang menerimanya.

Sikap masyarakat petani yang cenderung selalu nrimo dan tidak menghiraukan tergambar dalam kondisi seperti apa yang dipaparkan di atas. Sebagian besar dari informan petani dan buruh tani mengaku sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, beberapa dari mereka justru tidak mengetahui sama sekali perihal adanya bantuan yang diberikan di desa mereka. Beberapa dari mereka justru mengetahui adanya bantuan yang diberikan, namun banyak dari mereka yang tidak didata atau tidak dilibatkan ketika program bantuan berjalan. Meskipun demikian, masyarakat tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yg sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Bantuan-bantuan yang harusnya ditujukan untuk rumah tangga miskin, dimanfaatkan oleh elit desa seperti ketua RT. Sementara itu, bantuan-bantuan yang seharusnya ditujukan untuk para petani, juga hanya dimanfaatkan oleh elit desa seperti ketua RW. Kondisi ini merupakan perwujudan dari apa yang disampaikan Loekman Soetrisno (2008), bahwa orang miskin seringkali ditekan atau ditipu oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaanlah yang kemudian sering mengakibatkan bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi.

Berikut ini adalah gambaran relasi antara perubahan struktural atau stratifikasi sosial yang ada dengan munculnya kemiskinan struktural di desa Ciaruteun Ilir:

Gambar 5.1
Relasi Pola-pola Organisasi Institusional Yang Ada Dalam Masyarakat Dengan Kemiskinan Struktural



Sumber : Telah diolah kembali

5.2.2. Adanya Disparitas Pembangunan

Masalah pemerataan akses dan ketiadaan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada golongan miskin merupakan bagian dari disparitas pembangunan. Hal ini kemudian memberi dampak pada ketimpangan struktural, yang kemudian melahirkan kemiskinan struktural.

5.2.2.1. Masalah Pemerataan Akses Layanan Publik dan Infrastruktur

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, bisa dilihat angka partisipasi sekolah di desa Ciaruteun Ilir sangat rendah. Secara umum mereka hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, begitupun banyak yang tidak menyelesaikannya hingga tamat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa sebagian besar masyarakat di desa ini berpendidikan rendah, bukan hanya karena persoalan penghasilan para petani dan buruh tani yang terbatas, tapi juga ketidaktersediaan sekolah SMP dan SLTA di wilayah desa Ciaruteun Ilir, jarak sekolah SMP dan SLTA ada yang terlalu jauh dari wilayah pemukiman desa Ciaruteun Ilir, ketidaktersediaan angkutan umum, dan biaya transportasi yang mahal. Hanya terdapat satu PAUD dan dua Sekolah Dasar dan satu Madrasah di desa ini. Anak-anak yang hendak bersekolah harus

menyediakan uang sebesar Rp. 14.000,- untuk ongkos pulang pergi naik ojek, sebab tidak ada angkutan umum di desa ini. Uang sejumlah Rp.14.000,- tentu bukan jumlah yang kecil buat para petani dan buruh tani di sini. Bagaimana tidak, jika rata-rata pendapatan para petani hanya sekitar Rp.850.000,- per bulannya, maka pendapatan mereka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari saja. Terlebih lagi buruh tani yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar Rp.27.000, dengan jumlah pendapatan sekecil ini kebutuhan dasar mereka sehari-hari saja pun belum tentu terpenuhi, maka pendidikan menjadi sesuatu yang mahal bagi mereka. Pendidikan yang rendah ini kemudian menjadi salah satu penyebab mobilitas sosial menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan bagi masyarakat dusun ini.

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Suyanto (2008), bahwa adanya kungkungan struktural menyebabkan masyarakat miskin kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Dalam hal ini, semua kesulitan-kesulitan yang ada semakin memicu masyarakat desa ini untuk memilih tidak melanjutkan sekolah karena pendidikan merupakan sesuatu yang mahal bagi mereka. Jika memiliki dana, mereka lebih memilih untuk menggunakannya untuk modal bertani. Masalah pemerataan akses yang belum menjangkau seluruh penduduk, yang disebabkan oleh timpangnya persebaran infrastruktur, fasilitas dan sarana publik, seperti fasilitas pendidikan dan sarana transportasi semakin menyulitkan masyarakat desa ini untuk keluar dari jerat kemelaratan. Semua hal inilah yang merupakan bagian dari proses pemiskinan struktural.

Pemerintah pernah membangun satu irigasi di dusun Tegal Salam, salah satu dusun yang ada di desa Ciaruteun Ilir. Jarak dusun ini kira-kira hampir 1 km jaraknya dari dusun Cairuteun Ilir. Saluran irigasi ini juga sampai ke dusun Ciaruteun Ilir, namun irigasi ini sering sekali tidak berfungsi pada siang hari di desa Ciaruteun Ilir. Menurut informasi yang didapatkan dari salah satu informan, dikatakan bahwa irigasi ini sering sekali hanya menyala di dusun Tegal Salam pada siang hari, lalu pada malam hari baru menyala di sebelah dusun Ciaruteun Ilir, sehingga para petani yang memanfaatkan irigasi pun sering kali harus

menyiram tanaman hingga pukul 12.00 malam hari pada musim kemarau. Beberapa petani ada yang membuat empang untuk menampung air hujan. Mereka memanfaatkan empang ini untuk membersihkan sayur yang di panen atau menyiram tanaman. Sebagian besar petani masih memanfaatkan air sungai juga untuk pengairan. Ada dua sungai yang mengalir di desa ini, yaitu sungai Cairuteun dan sungai Ciantean. Penyiraman pun dilakukan dengan cara manual, masih dengan menggunakan ember dengan pikulan kayu.

Kondisi jalan umum di desa Ciaruteun Ilir saat ini rusak amat parah, berdasarkan temuan lapangan, pada saat datang hujan di desa ini, kondisi jalan umum yang becek, licin dan berbatu-batu semakin memprihatinkan. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi penduduk yang melintas dengan berjalan kaki, apalagi jika menggunakan kendaraan motor. Berdasarkan informasi dari kepala desa, dikatakan bahwa, jalan umum di desa ini sudah rusak sejak lama. Meski pernah diperbaiki kira-kira lima tahun yang lalu, namun tidak lama kemudian rusak kembali. Untuk fasilitas sanitasi dan air bersih, pemerintah pernah membangun satu unit MCK di dusun Tegal Salam yang jaraknya kira-kira satu kilometer dari pusat desa Ciaruteun Ilir. Meski umumnya masyarakat desa ini sudah memiliki kamar mandi di rumahnya masing-masing, namun tidak semua dari mereka yang memiliki WC, karena masih lazim buat masyarakat desa ini untuk membuang air di sungai.

Layanan kesehatan di desa Ciaruteun Ilir masih sangat terbatas. Hanya ada satu puskesmas di desa ini, yang dilengkapi dengan satu orang dokter dan bidan yang bertugas. Untuk proses bersalin, umumnya masyarakat masih memanfaatkan dukun beranak terlatih.

Pemerataan akses yang belum menjangkau seluruh penduduk di desa Ciaruteun ilir, yang disebabkan oleh timpangnya persebaran infrastruktur, fasilitas dan sarana publik, seperti fasilitas pendidikan yang tidak lengkap, layanan kesehatan yang terbatas, ketidaktersediaan sarana transportasi, sarana irigasi, sumber air bersih dan sanitasi yang terbatas, serta kondisi jalan umum yang memprihatinkan, memunculkan berbagai hambatan bagi penduduk di desa ini untuk mendapatkan pelayanan dasar. Kondisi ini merupakan wujud dari apa yang disampaikan World bank (2008), bahwa adanya diskriminasi dan disparitas

pembangunan yang terjadi wilayah desa dan kota menjadi pemicu munculnya kemiskinan struktural di desa ini. Mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mohammad Mustofa dalam Soemardjan (1984), bahwa masalah kemiskinan struktural apabila dipahami dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran adalah masalah jauh dekatnya rakyat dengan sumber daya ekonomi, sosial dan politik serta jauh tidaknya pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar oleh hasil-hasil pengelolaan sumberdaya-sumberdaya tersebut. Kemiskinan struktural adalah sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, yang terwujud sebagai proses pemerataan massal dan perampasan hak-hak dasar. Dalam konteks ini, kondisi pemerataan akses yang tidak terjangkau seluruh masyarakat di desa Ciaruteun ilir kemudian memunculkan ketidakadilan struktural karena masyarakat di desa ini terampas hak-hak dasarnya, dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan struktural.

5.2.2.2. Ketiadaan Kebijakan yang Lebih Berpihak Pada Petani Miskin

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan petani Ciaruteun ilir ditemukan bahwa penghasilan bersih petani di desa ini sekitar Rp. 450.000 hingga Rp.1.500.000 setiap bulannya, jumlah ini sudah dikurangi dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk sarana produksi pertanian. Jumlah penghasilan bersih para petani biasanya tidak tetap, hal ini dikarenakan harga sayuran di pasar bisa naik dan turun. Dalam sebulan, petani di desa ini bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp. 400.000,- hingga Rp.1.500.000 untuk sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan pestisida, upah buruh tani hingga ongkos sewa atau kontrak lahan. Beberapa petani yang diwawancara memaparkan bagaimana kesulitan mereka jika harga sayur sedang jatuh, sementara biaya sarana produksi saat ini tidak murah, justru selalu naik dari waktu ke waktu. Harga pupuk misalnya, cenderung selalu naik dan kenaikan harganya tidak seimbang dengan harga jual hasil tani. Akibatnya, petani sering berada dalam posisi yang rugi.

Mahalnya harga pupuk dan sarana produksi yang lain sementara petani tidak bisa menentukan harga hasil taninya sendiri sudah barang tentu semakin menyulitkan para petani. Tidak cuma itu, para petani sayur desa ini juga harus bersaing dengan serbuan komoditas hortikultura impor. Ketiadaan kebijakan yang

lebih berpihak pada petani miskin, seperti penurunan harga pupuk dan harga kebutuhan sehari-hari serta pembatasan impor dan akses pasar mengakibatkan para petani miskin menjadi tidak berdaya, hal ini merupakan wujud dari apa yang disampaikan oleh Tulung (2008). Ketiadaan kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural pada masyarakat petani di desa Ciaruteun Ilir. Berikut skema relasi antara disparitas pembangunan dengan munculnya kemiskinan struktural:

Gambar 5.2

Relasi Antara Disparitas Pembangunan dan Kemiskinan Struktural



Sumber: Telah diolah kembali

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini dipaparkan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat petani di desa Ciaruteun Ilir, dan 2) mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural pada masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir.

6.1.1. Kondisi kemiskinan masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir

Kondisi kemiskinan struktural di desa Ciaruteun Ilir tidak terlepas dari keterbatasan akses pendidikan, perbedaan upah dan rendahnya penghasilan, keterbatasan akses terhadap tanah (luas dan status kepemilikan lahan pertanian), serta keterbatasan akses terhadap perumahan sehat dan sanitasi.

Keterbatasan penghasilan para petani dan buruh tani, ketidakterediaan sekolah SMP dan SLTA di wilayah Ciaruteun Ilir, jarak sekolah SMP dan SLTA ada yang terlalu jauh dari wilayah pemukiman Ciaruteun Ilir, ketidakterediaan angkutan umum, biaya transportasi yang mahal, besarnya tanggungan keluarga menjadi alasan bagi masyarakat dusun ini untuk memilih tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Sebagian dari mereka justru tidak sempat lulus SD, atau bahkan sama sekali tidak bersekolah, terutama para generasi tua.

Jika dibandingkan dengan besarnya penghasilan tuan tanah di Ciaruteun Ilir maka penghasilan para buruh tani dan petani di Dusun Ciaruteun Ilir relatif rendah atau dengan kata lain termasuk ke dalam kategori miskin struktural.

Jika dilihat dari aksesnya terhadap tanah, para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil termasuk ke dalam kategori miskin struktural. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan para petani di Ciaruteun Ilir memiliki lahan yang luasnya sangat terbatas. Luas lahan mereka rata-rata hanya dibawah 0,1 ha atau tidak memiliki lahan sama sekali. Para petani ini kehidupannya dan keluarganya sangat tergantung dari faktor iklim, karena hal ini akan sangat mempengaruhi hasil panen

mereka. Demikian halnya dengan fluktuasi harga, kesempatan pekerjaan tambahan, kenaikan harga pupuk dan sarana produksi pertanian akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, karena semua hal ini sangat mempengaruhi penghasilan dan ongkos pengeluaran sarana produksi pertanian mereka.

Golongan petani dengan lahan terbatas di Ciaruteun Ilir umumnya memiliki tempat tinggal semi permanen, yang rata-rata sudah dialiri listrik dan memiliki kamar mandi dengan sumber air dari pompa listrik, namun hanya sebagian yang memiliki WC, tidak memiliki ventilasi udara yang cukup, luas tanah tempat tinggalnya sempit dan berdesakan dengan rumah yang ada di sekitarnya, jumlah kamar biasanya hanya satu atau dua, mereka umumnya tinggal di rumah orang tuanya. Begitu juga tempat tinggal buruh, relatif kecil dan tidak permanen, memiliki kamar mandi dengan kondisi yang tidak memadai, sumber air dari sumur galian, tidak memiliki WC, tidak memiliki ventilasi udara yang cukup, mereka biasanya tinggal berdesakan dalam satu rumah yang kecil, karena satu rumah bisa dihuni oleh beberapa kepala rumah tangga.

6.1.2. Faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat petani Dusun Ciaruteun Ilir

Timbulnya ketergantungan yang kuat dari pihak si miskin kepada pihak kelas sosial ekonomi di atasnya, seperti ketergantungan antara buruh tani dan majikannya dan ketergantungan yang kuat antara petani penggarap terhadap pemilik lahan, ketidakmampuan petani menentukan harga hasil taninya sendiri, kurangnya penguasaan dan akses petani akan aset produksi terutama tanah dan modal, serta ketidakberdayaan masyarakat miskin terhadap tekanan dari golongan yang di atasnya, merupakan dampak dari pola-pola organisasi institusional sebagai dampak dari stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat desa Ciaruteun Ilir. Bukan hanya itu saja, stratifikasi sosial yang ada di desa ini juga berdampak pada kemampuan masing-masing golongan untuk memanfaatkan program-program pemerintah yang ada. Pola-pola organisasi institusional inilah yang kemudian memberi dampak pada ketidakadilan struktural dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab munculnya kemiskinan struktural di Dusun Ciaruteun Ilir.

Selain hal di atas, disparitas pembangunan yang dialami masyarakat desa Ciaruteun Ilir merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural di desa ini. Disparitas pembangunan yang dimaksud di sini adalah ketimpangan pemerataan akses dan ketiadaan kebijakan yang berpihak pada petani miskin. Ketimpangan pemerataan akses yang ada di desa ini termasuk diantaranya yaitu, jauhnya akses masyarakat desa Ciaruteun Ilir akan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar seperti fasilitas pendidikan SMP dan SLTA, fasilitas sanitasi, serta infrastruktur seperti sarana jalan umum dan infrastruktur pertanian yang memadai.

6.2. Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin di desa Ciaruteun Ilir masih minim. Kebijakan pemerintah yang ada di desa ini terkesan hanya asal ada. Permasalahan kemiskinan di desa ini tampak tidak serius ditangani. Program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini ada, selain hanya sedikit, juga tidak berhasil menjangkau keseluruhan masyarakat miskin, dan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di desa ini. Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat atau Raskin dan program BLT. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Seperti apa yang ditemukan di lapangan, bahwa ada indikasi kecurangan pada pelaksanaan program BLT di Dusun Ciaruteun Ilir, hal ini tampak pada proses pendataan dan pembagian BLT yang terkesan tidak transparan. Sosialisasi mengenai bantuan pun jarang ada, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui perihal adanya bantuan, contohnya program pembagian bantuan Raskin. Tidak jauh berbeda dengan Raskin, program pemberian pinjaman modal PNPM pun terkesan penuh diskriminasi, karena hanya elit desa yang berhak menentukan siapa yang berhak jadi penerima. Pengadaan bantuan

sarana pertanian yang diserahkan penuh pengelolaannya pada salah satu RW di desa pun tidak dipergunakan untuk pemanfaatan bersama sebagaimana mestinya.

Diperlukan penanganan yang serius untuk menangani kemiskinan di desa ini. Agar dana yang dikeluarkan tidak sia-sia, sebelum membuat kebijakan, perlu dilakukan pengkajian mendalam mengenai karakteristik masyarakat miskin di desa ini, hal ini penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya diperlukan oleh mereka. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional, dalam pelaksanaan program yang akan dibuat, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Selain itu, pengawasan selama pelaksanaan program juga harus tetap dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan program tetap berjalan adil, transparan dan jauh dari praktek korupsi.

Terkait hasil penelitian mengenai analisis kemiskinan struktural masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir ini, berikut beberapa saran yang direkomendasikan:

1. Untuk mengatasi kemiskinan struktural, yang perlu dirubah adalah struktur sosial, struktur-struktur yang membuat masyarakat terus-menerus tergantung dari pihak lain dan terus dieksploitasi oleh pihak itu, yang menimbulkan ketidakadilan dan kekayaan struktural, yang mempersempit peluang masyarakat miskin untuk menguasai dan memiliki aset produksi terutama tanah dan modal, serta yang melahirkan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Diperlukan organisasi-organisasi yang meningkatkan kemampuan desa, termasuk golongan miskin untuk mampu secara mandiri mengatur sendiri keperluan-keperluannya, seperti pengelolaan pupuk, perkreditan, pengelolaan irigasi, dan pemasaran. Organisasi adalah sarana untuk mengurangi ketimpangan dalam bargaining power antara golongan miskin dan golongan yang lebih kaya.
2. Adanya disparitas pembangunan yang meliputi masalah pemerataan akses dan ketiadaan kebijakan yang lebih berpihak pada petani miskin merupakan ketimpangan struktural yang kemudian memantapkan struktur ketidakadilan sosial. Ketimpangan-ketimpangan ini meliputi hubungan pusat dengan daerah dan hubungan antar kota dan desa. Ketimpangan struktural harus dihadapi secara

langung untuk mengatasinya dengan usaha pembangunan daerah, usaha pembangunan daerah pedesaan, dan peningkatan kesempatan kerja.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Alston, Margareth & W.Bowles. (1998). *Research for social worker: An introduction to methods*. Australia: Allen & unwim.
- Baswir, Revriond. (1997). *Agenda ekonomi kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revriond, Dkk. (1999). *Pembangunan dan strategi memerangi kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Babbie, Earl. (1992). *The practice of social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. London: Allyn and Bacon.
- Brodjonegoro, Bambang P.S. et.al., (2007). *Pembangunan perdesaan dan daerah pesisir pada era milenium*. Depok : UI-Press.
- Chamber, Robert. (1988). *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta: LP3S.
- Chamber, Robert. (1996). *Memahami desa secara partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Creswell, John W. (1994). *Research design: qualitative and quantitative approaches*. California, London, New Delhi : Sage Publication.
- Cresswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (1995). *Sumber daya manusia peluang kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk rakyat*. (Memadukan pertumbuhan dan pemerataan). Jakarta: CIDES
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1982). *Masalah-masalah pembangunan*. Jakarta: LP3S.

- Malo, Manasse dan Sri Trisnoningias. (1998). *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PAU-UI, Jakarta.
- Mardimin, Johanes (Ed). (2000). *Dimensi kritis proses pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mas'ood, Mochtar. (1994). *Politik birokrasi dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*. (Matheos Nalle, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexi. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). *Social research methods: Qualitative approach*. Boston: University of Wisconsin at White Water.
- Popkin, Samuel. (1986). *Petani rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. (1998). *Kajian pembangunan pertanian abad ke-21, sistem pertanian berkebudayaan industri dan strategi operasional Repelita VII*. Yogyakarta: UGM.
- Rachyuningsih, Eni. (2007). *Lepas dari jeratan kemiskinan*. Yogyakarta: AR-RUZ Media.
- Raharjo. (2004). *Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Redfield, R. (1986). *Masyarakat petani dan kebudayaan*. Jakarta : Radjawali.
- Sajogyo (Ed). (1999). *Sosiologi pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, James C. (1981). *Moral ekonomi petani*. (Hasan Basari, penerjemah). Jakarta: LP3S.
- Soedjatmoko. (1984). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. Jakarta; LP3S
- Soekartawi. (1996). *Pembangunan pertanian*. Jakarta : UI PRESS.
- Soemardjan, Selo. (1993). *Masyarakat dan manusia dalam pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemardjan, Selo (Ed). (1984). *Kemiskinan struktural*. Jakarta: YISS
- Soeprobo, Tara bakti. (2006). *Country report Indonesia*. Depok: Lembaga

Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Sugihen, Bahren T. (1997). *Sosiologi pedesaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1998). *Perencanaan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan*. Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. (2002). *Pembangunan pertanian, sebuah tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Susanto, Hari. (2006). *Dinamika penanggulangan kemiskinan, tinjauan historis era orde baru*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3S Indonesia.
- Tukiran. (Ed). (2010). *Akses penduduk miskin terhadap kebutuhan dasar*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Vries, Egbert de. (1985). *Pertanian dan kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dokumen

- Bappenas. (2009). *Prioritas pembangunan nasional 2005-2009*. Jakarta: Bappenas
- BPS. (2008). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2009). *Data dan informasi kemiskinan 2008*. Buku 1. Jakarta: BPS.
- Kantor Desa Ciaruteun Ilir. (2010). *Profil Desa Ciaruteun Ilir*.

Serial

- Soetrisno, Lukman., Suyanto, Bagong., Tulung, Freddy., *Jurnal DIALOG. Kebijakan publik*. Depkominfo, Edisi 3, November 2008

Makalah Seminar

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. (2007). *Prosiding seminar nasional: Meningkatkan peran struktur pertanian dalam penanggulangan kemiskinan*. Bogor: PSE-Balitbang Pertanian Bogor

Penelitian

- Sulaksono. (2003). *Faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan (Studi kasus terhadap masyarakat nelayan di kelurahan Kandang kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu)*. Jakarta: S2 Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Turtiantoro. (1995). *Dimensi struktural kemiskinan dalam perspektif Tannas (Studi kasus masyarakat pedesaan di dua kabupaten di Jawa Tengah)*. Jakarta: S2 Program Pascasarjana

Publikasi Elektronik

- BPS. (1 July 2011). *Berita resmi statistik*. <http://www.bps.go.id>
- BPS. (Mei, 2011). *Data BPS Susenas*. <http://www.bps.go.id>
- BPS. (July, 2011). *Survei struktur ongkos usaha tani tanaman pangan (SOUTTP)*. <http://www.bps.go.id>

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Pendidikan terakhir :
 Tanggal wawancara :

A. Kondisi Sosial Ekonomi Petani

- a. Berapa lama ibu/ bapak sudah bekerja sebagai petani ?
- b. Apa pekerjaan ibu/ bapak sebelum bekerja sebagai petani?
- c. Berapa rata rata penghasilan kotor yang ibu/bapak dapatkan per bulan?
- d. Berapa biaya rata rata yang harus ibu/ bapak keluarkan untuk sarana produksi, upah buruh dan sewa lahan (bila ada) per bulan?
- e. Apakah suami/ istri dari ibu/ bapak juga bekerja (punya penghasilan)?
- f. Berapa rata rata penghasilan bersih yang ibu/ bapak dapatkan per bulan? Dan berapa total jumlahnya bila digabung dengan penghasilan suami/ istri (bila ada)?
- g. Berapa rata rata pengeluaran ibu/bapak untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari?
- h. Berapa jumlah orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu/ bapak?
- i. Berapa orang jumlah anggota keluarga ibu/bapak yang menyelesaikan sekolah SD hingga SLTA?
- j. Apa saja kesulitan kesulitan yang ibu / bapak rasakan dalam bertani saat ini?

B. Luas dan Status Kepemilikan Lahan

- a. Berapa luas lahan tani yang ibu/ bapak kerjakan?
- b. Bagaimana status kepemilikan lahan yang ibu/ bapak kerjakan?

C. Jenis Usaha Tani

- a. Jenis tanaman apa yang ibu/ bapak tanam ? Apakah tanaman yang ibu/bapak tanam organik atau non organik?

D. Teknologi Pertanian

- a. Teknologi apa yang ibu/bapak gunakan dalam bertani

E. Modal

- a. Apakah ibu/ bapak pernah meminjam modal dari bank/ koperasi? Jika tidak, bagaimana cara ibu/ bapak untuk mendapatkan uang jika sedang membutuhkan modal?
- b. Apakah ibu/ bapak tahu ada atau tidak koperasi atau lembaga keuangan mikro di desa ini?

F. Pemasaran

- a. Kemana dan bagaimana ibu/ bapak memasarkan hasil tani?

G. Bantuan pemerintah

- a. Apakah ibu/ bapak mengetahui bantuan apa saja yang pernah dan sedang diberikan pemerintah pada petani di desa ini? Jika ada, sejauh ini apa saja manfaat dari program bantuan pemerintah yang pernah bapak rasakan?
- b. Apa harapan bapak terhadap pemerintah dalam membantu petani ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BURUHTANI

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Pendidikan terakhir :
 Tanggal wawancara :

A. Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Tani

- a. Berapa lama ibu/ bapak sudah bekerja sebagai buruh tani ?
- b. Jenis pekerjaan apa saja yang ibu/ bapak kerjakan sebagai buruh tani?
- c. Apa pekerjaan ibu/ bapak sebelum bekerja sebagai buruh tani?
- d. Berapa upah yang ibu/ bapak dapatkan per hari? Bagaimana sistem upahnya?
- e. Apakah ibu/ bapak punya pekerjaan tambahan?
- f. Berapa total pendapatan harian ibu/ bapak jika digabung dengan pendapatan suami/ istri? (jika suami/ istri juga bekerja)
- g. Berapa rata rata pengeluaran ibu/bapak untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari?
- h. Berapa jumlah orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu/ bapak?
- i. Berapa orang jumlah anggota keluarga ibu/bapak yang menyelesaikan sekolah SD hingga SLTA?
- j. Apa saja kesulitan kesulitan yang ibu / bapak rasakan dalam bertani saat ini?

B. Strategi untuk Bertahan Hidup

- a. Apakah ibu/ bapak pernah meminjam uang dari bank/ koperasi? Jika tidak, bagaimana cara ibu/ bapak untuk mendapatkan uang jika sedang membutuhkan uang?
- b. Apakah ibu/ bapak tahu ada atau tidak koperasi atau lembaga keuangan mikro di desa ini?

C. Bantuan Pemerintah

- a. Apakah ibu/ bapak mengetahui bantuan apa saja yang pernah dan sedang diberikan pemerintah pada petani dan buruh tani di desa ini? Jika ada, sejauh ini apa saja manfaat dari program bantuan pemerintah yang pernah bapak rasakan?
- b. Apa harapan ibu/ bapak terhadap pemerintah dalam membantu buruh tani?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Pendidikan terakhir :
 Tanggal wawancara :

A. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Penduduk Ciaruteun Ilir

- a. Secara umum apa mata pencaharian penduduk di Desa Ciaruteun Ilir khususnya Dusun Ciaruteun Ilir?
- b. Berapa rata-rata penghasilan penduduk dusun Ciaruteun Ilir per bulan?
- c. Berapa rata-rata jumlah anggota (anak) dalam keluarga di dusun Ciaruteun Ilir?
- d. Bagaimana pendidikan di dusun Ciaruteun Ilir, apakah secara umum penduduk di desa ini mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Dasar sampai SLTA, jika tidak, apa yang menjadi kendalanya?
- e. Apa pekerjaan yang biasa dilakukan remaja yang sudah lulus atau putus sekolah di dusun Ciaruteun Ilir ini?
- f. Pada usia berapa umumnya laki-laki dan perempuan menikah di dusun ini?
- g. Secara umum apakah rumah di dusun ini sudah permanen atau semi permanen?

B. Status dan Luas Lahan serta Infrastruktur Pertanian

- a. Berapa luas rata-rata lahan petani di dusun ini?
- b. Secara umum bagaimana status kepemilikan lahan yang digarap petani di dusun ini?
- c. Apa saja infrastruktur pertanian yang ada di dusun ini?

C. Jenis Usaha Tani dan Teknologi Pertanian

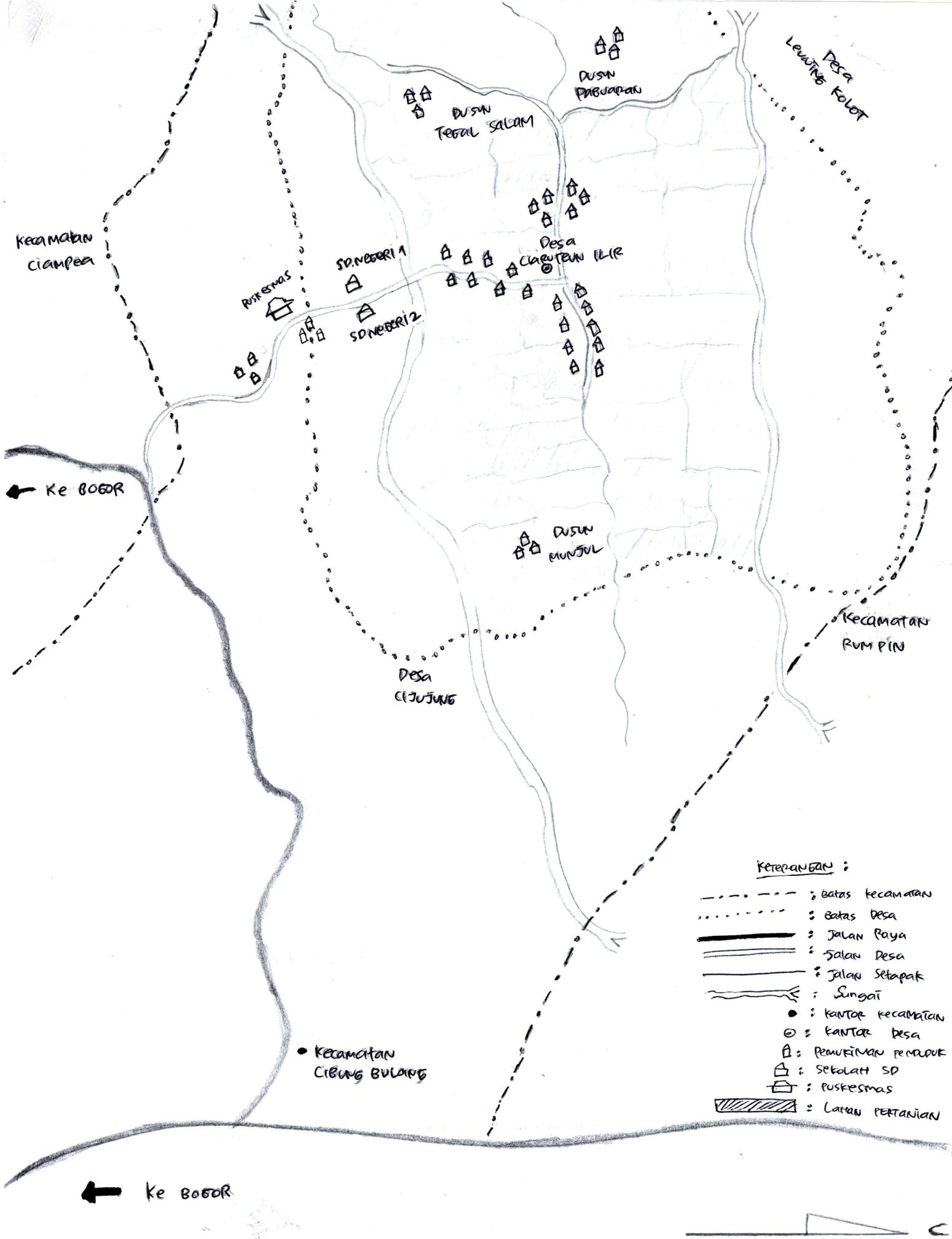
- a. Jenis tanaman apa yang ditanam di dusun ini? Apakah tanaman yang mereka tanam merupakan tanaman organik atau non organik?
- b. Teknologi apa yang digunakan petani umumnya di dusun ini?

D. Modal dan Pemasaran Hasil Tani

- a. Apakah ada koperasi atau lembaga keuangan mikro di dusun ini? Jika tidak ada, bagaimana biasanya petani di desa ini mendapatkan uang atau pinjaman jika sedang membutuhkan modal?
- b. Kemana dan bagaimana biasanya petani di dusun ini memasarkan hasil taninya?

E. Bantuan pemerintah

- a. Bantuan apa saja yang pernah dan sedang diberikan pemerintah pada petani di Desa Ciaruteun Ilir? Jika ada, sejauh ini apa saja manfaat dari program bantuan pemerintah yang dirasakan oleh penduduk desa Ciaruteun Ilir ?
- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam mendistribusikan bantuan pemerintah selama ini?
- c. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap pemerintah dalam membantu masyarakat petani di desa Ciaruteun Ilir?



- Keterangan :**
- - - - - : batas kecamatan
 - : batas desa
 - : jalan raya
 - ==== : jalan desa
 - : jalan setapak
 - ~~~~~ : sungai
 - : kantor kecamatan
 - ⊙ : kantor desa
 - ⊠ : pemukiman penduduk
 - ⊡ : sekolah SD
 - ⊞ : puskesmas
 - ▨ : lahan pertanian